KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANYUMAS

IAIN PURWOKERTO

THESIS

Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

ROQI YASIN
1717611008

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iainpurwokerto.ac.id Email : pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 166/In.17/D.Ps/PP.009/7/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama	:	Roqi Yasin
NIM	:	1717611008
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Judul	:	Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas

Telah disidangkan pada tanggal **30 Juni 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Ekonomi (M.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 13 Juli 2021
Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA
IAIN PURWOKERTO
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama : Roqi Yasin
NIM : 1717611008
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANYUMAS

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		6/7-2021
2	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. NIP. 19741217 200312 1 006 Sekretaris/ Penguji		5/7 - 21
3	Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. NIP. 19731014 200312 1 002 Pembimbing/ Penguji		12/7 2021
4	Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M. NIP. 19680403 199403 1 004 Penguji Utama		12 /7 2021
5	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Penguji Utama		5/7 2021

Purwokerto, 5/7 -21
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag
NIP. 19741217 200312 1 006

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul "Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas" merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atas adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto,22 Juni 2021
Hormat saya,

METERAI TEMPEL
B3DAJX236705252

Roqi Yasin
1717611008

KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANYUMAS

Roqi Yasin
NIM. 1717611008

ABSTRAK

Latar belakang peneliti tertarik melakukan penelitian ini, yaitu; *Pertama*, Program PKH merupakan salah satu kebijakan untuk pengentasan kemiskinan, upaya meningkatkan standar hidup msayarakat miskin, dan perubahan perilaku masyarakat miskin. *Kedua*, Kemiskinan di Banyumas dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan secara signifikan. Didasarkan pada hal tersebut, maka pertanyaan besar dalam penelitian ini yaitu bagaimana Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Banyumas yang diturunkan ke dalam 3 pertanyaan mendasar yakni, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan, Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan ,Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas dan Pandangan Secara Islam Dan Konvensional Tentang Kebijakan PKH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami dan menganalisis Kebijakan PKH dalam Pengentasan Kemiskinan.

Teori ini didasarkan pada Teori Karl Popper. dan Kementrian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, dimana dapat dirumuskan beberapa poin yang merupakan poin mendasar dalam Kebijakan meliputi konsep, prinsip dan implementasi Kebijakan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi multikasus. Subjek utama penelitian ini adalah Kepala Bidang Kejahteraan Sosial, Penanganan fakir Miskin, (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas dan Pelaksana Program PKH Kabupaten Banyumas meliputi Kordinator Pendamping PKH Kabupaten, Pendamping PKH Kecamatan. Sedangkan teknik pengumpulan datanya, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi PKH di kabupaten Banyumas dari Pendataan Calon KPM PKH sampai mendapat Bantuan PKH dan perjalanan menjadi KPM dan sampai Graduasi di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pedum PKH tahun 2020 dan PKH juga memberikan dampak positif pada kondisi masyarakat sekarang yaitu mewujudkan kemajuan dalam masyarakat terutama kemajuan kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat dengan adanya 3971 KPM Gradusi mandiri. Selama periode 2017-2019, jumlah dan persentase penduduk miskin di Banyumas menunjukkan tren penurunan. Namun pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Banyumas mengalami peningkatan. Hal ini mungkin dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Pemerintah dapat menggandeng Lembaga zakat yang ada untuk mengentaskan kemiskinan

Kata Kunci : Kebijakan, Program, Keluarga, Harapan, Dinsospermades, Banyumas, Pendamping, Pengentasan, Kemiskinan, Miskin, Kesejahteraan, Falah, Zakat, Graduasi.

IAIN PURWOKERTO

POLICY OF PROGRAM KELUARGA HARAPAN(PKH) IN POVERTY REDUCTION IN BANYUMAS DISTRICT

Roqi Yasin
NIM. 1717611008

ABSTRACT

ABSTRACT

The background of researchers interested in doing this research, namely; First, the PKH Program is one of the policies for poverty alleviation, efforts to improve the living standards of the poor, and change the behavior of the poor. Second, poverty in Banyumas in the last three years has decreased significantly. Based on this, the big question in this research is how the Program keluarga Harapan (PKH) Policy in Poverty Alleviation in Banyumas is derived into 3 basic questionsnamely,, Implementation of the Program keluarga Harapan (PKH) in alleviating poverty, Contribution of the Program keluarga Harapan (PKH) PKH) in alleviating poverty, Conditions of poverty in Banyumas Distrik and Islamic and Conventional Views on PKH Policies. The purpose of this study is to explore and analyze the PKH Policy in Poverty Alleviation.

This theory is based on Karl Popper's Theory. and the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, General Guidelines for the Program keluarga Harapan, where several points can be formulated which are fundamental points in the Policy covering the concept, principle and implementation of the Policy.

This type of research is qualitative with a multi-case study approach. The main subjects of this study were the Head of the Social Welfare, Handling of the Poor, (Dinsospermades) Banyumas Regency and the Banyumas Regency PKH Program Implementers including the District PKH Facilitator Coordinator, District PKH Facilitator. While the data collection techniques, namely through observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that the implementation of PKH in Banyumas district from the PKH KPM Candidate Data Collection to receiving PKH Assistance and the journey to KPM and until Graduation in Banyumas Regency in accordance with the 2020 PKH Guidelines and PKH also has a positive impact on the current condition of society, namely realizing progress in society especially the progress of health, education and the community's economy with the existence of 3971 independent Graduation KPM. During the 2017-2019 period, the number and percentage of poor people in Banyumas showed a downward trend. However, in 2020, the number of poor people in Banyumas has increased. This may be due to the COVID-19 pandemic. The government can cooperate with existing zakat institutions to alleviate poverty

. Keywords: Policy, Program, Family, Hope, Dinsospermades, Banyumas, Companion, Alleviation, Poverty, Poor, Welfare, Falah, Zakat, Graduation.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…. ‘ ….	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**

IAIN PURWOKERTO

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
◌َ ———	Fathah	A	A
◌ِ ———	Kasrah	I	I
◌ُ ———	ḍammah	U	U

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	**Nama**	**Gabungan huruf**	**Nama**
ي ◌َ —	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
و ◌َ —	Fatḥah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = kaifa هَوْلَ = haula

IAIN PURWOKERTO

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا َ ـــ	fatḥah dan alif	Ā	a dan garis di atas
ي ِ ـــ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ُ ـــ	ḍammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = qāla　　قِيْلَ = qīla

رَمَى = ramā　　يَقُوْلُ = yaqūlu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup

   Ta marbūṭah hidup atau mendapatkan *ḥarakat fatḥah, kasrah,* dan *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūṭah* mati

   Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

   Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h),* namun apabila pembacaannya disambung maka ta marbūṭah ditransliterasikan dengan /t/.

   Contoh:

   روضة الأطفال = rauḍah al-aṭfah *atau* rauḍatul aṭfal

   المدينة المنورة = al-madinah al-munawwarah *atau* al-madinatul munawwarah

   طلحة = Ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda

IAIN PURWOKERTO

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربّنا = rabbanā نزّل = nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan bisa atau tidak dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Penulis lebih memilih menghubungkannya dengan tanda sambung.

Contoh:

الرجل = ar-rajulu القلم = al-qalamu

IAIN PURWOKERTO

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan.

Contoh:

أبو بكر = Abū Bakr

H. Ya' Nisbah

Ya' nisbah untuk kata benda muzakkar (masculine), tanda majrur untuk *al-asmā' al-khamsah* dan yang semacamnya ditulis /ī/.

Contoh:

البخاريّ = al-Bukhārī

أبي = Abī

أبوه = Abūhu

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain dalam transliterasi ini tidak dipisah.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah hingga penulis dapat merampungkan penyusunan Tesis dengan judul "Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas". Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT curah limpahkan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW, beliaulah yang telah menuntun manusia dari kegelapan menuju petunjuk yang terang benderang. Semoga semangat juangnya menjadi *spirit and guidance* kita dalam mengemban tugas sebagai *khalifah fil ardhi*.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan dari Pascasarjana IAIN Purwokerto. Dalam penyusunan tesis ini penulis telah mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa materi maupun moral, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang penulis hormati:

1. Dr. KH. Muhammad Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
3. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
4. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusi bagi terwujudnya tesis ini;
5. Segenap Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan telah memberikan pelayanan terbaik selama peneliti menempuh studi, sehingga dapat digunakan sebagai bekal dalam penyusunan tesis ini

IAIN PURWOKERTO

6. Lili Mudjianto, Kepala Bidang Kejahteraan Sosial. Penanganan fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas;
7. Warno, Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas;
8. Sudendi, Kordinator Pendamping PKH Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas;
9. Raras Maftukhah, Pendamping PKH Kabupaten Banyumas;
10. Teman-teman seperjuangan kelas ES angkatan 2017 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), terimakasih atas kebersamaan, motivasi dan kerjasamanya;
11. Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian; atas perhatian, perkenan dan bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini laksana setetes air yang jatuh dalam luasnya samudra. Sehingga masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengaharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut. Akhir kata, semoga tesis ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Billahi taufiq Wal Hidayah

Purwokerto, 12 Juni 2021

Penulis

IAIN PURWOKERTO

Roqi Yasin

NIM. 1717611008

MOTTO PENULIS

"Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan"

"Kebenaran yang tak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir"

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

(QS: Ar Rad Ayat 11, tt)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Kedua orangtua tercinta, Charis Asyarif (Alm) dan Mutasiyah Kakaku, Mahin Anas Romadhon, S.Pd.I dan Sasi Suci Ning Tyas , S.Pd.I, Adik-adikku, Wajih Ibna Alan. dan Naura Elma Nafa

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Lembar Pengesahan Tesis ii
Lembar Pengesahan Munaqosyah iii
Pernyataan Keaslian iv
Abstraksi Penelitian v
Abstraksi Penelitian English vi
Pedoman Transliterasi Arab-Latin vii
Kata Pengantar xii
Motto Penulis xiv
Persembahan xv
Daftar Isi xvi
Daftar Gambar Dam Tabel xix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Batasan Penelitian dan Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 10
E. Manfaat Penelitian 11
F. Definisi Operasional 12
G. Sistematika Pembahasan 18
BAB II TEORI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPA (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
A. Teori Kebijakan Program 19
1. Pengertian Teori Kebijakan 19
2. Tujuan Kebijakan 21
3. Fungsi Kebijkan 23
B. Manajemen Kebijakan Program Keluarga Harapan 25
1. Pengertian PKH 26
2. Tujuan PKH 28

IAIN PURWOKERTO

3. Konsep PKH 29
4. Prosedur PKH 30
5. Langkah Langkah Pelaksanaan PKH 32
C. Jaminan Sosial Program PKH 34
D. Pengentasan Kemiskinan 37
E. Hasil Penelitian yang Relevan 45
F. Kerangka Berpikir 49
BAB III METODE PENELITIAN
A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian 51
B. Tempat dan Waktu Penelitian 53
C. Data dan Sumber Penelitian 54
D. Teknik Pengumpulan Data 56
1. Observasi 56
2. Wawancara 57
3. Dokumentasi 57
E. Teknik Analisis Data 58
F. Pemeriksa Keabsahan Data 61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPA (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINA
A. Hasil Penelitian 63
1. Gambaran Uumum Kabupaten Banyumas 64
2. Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat 72
3. DINSOSPERMENDES Kabupaten Banyumas 76
B. Pembahasan 79
1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan 79
1) Kebijakan Publik Pengentasan Kemiskinan Nasional 79
2) Kebijakan Pemda Banyumas Mengentaskan Kemiskinan 85
3) Implementasi Program Keluarga Harapan PKH 94
1) Penetapan Calon Peserta PKH 94

IAIN PURWOKERTO

2) Penyiapan Data Awal Validasi 95
3) Pertemuan Awal dan Validasi 97
4) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH 100
5) Penyaluran Bantuan 101
6) Pendampingan 109
7) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) 111
8) Verifikasi Komitmen 113
9) Pemutakhiran Data; 114
10) Pengaduan 115
4) Faktor Pendukung dan Penghambat 118
5) Solusi Kendala dalam Implementasi PKH 120
2. Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas 121
1) Kontribusi PKH dalam dalam Bidang Kesehatan 128
2) Kontribusi PKH dalam Bidang Kesehatan……...130
3. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas dan Pandangan Secara Islam Dan Konvensional Tentang Kebijakan PKH ……..…..132
1) Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas ……...132
2) Pandangan Islam Dan Konvensional Tentang PKH 138
a) Pandangan Secara Konvensional Tentang Kebijakan PKH...138
b) Pandangan Secara Islam Tentang Kebijakan PKH 139
BAB V PENUTUP
A. Simpulan 142
B. Saran 143
C. Rekomendasi 145
DAFTAR PUSTAKA 146
LAMPIRAN INSTRUMEN
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Banyumas 63

DAFTAR TABEL

TABEL **Halaman**

Tabel 1.1 Kondisi Masyarakat Banyumas 8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 42
Tabel 4.1 Pengguna Lahan Kabupaten Banyumas..... 70
Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Banyumas 2017 71
Tabel 4.4 Skema Besaran Bantuan KPM PKH 2021..... 103
Tabel 4.5 Contoh Skema Besaran Bantuan PKH 2021 Komponen Pendidikan . 103
Tabel 4.6 Contoh Skema Besaran Bantuan PKH 2021 Komponen Kesehatan .. 104
Tabel 4.7 Contoh Skema Besaran Bantuan PKH 2021 Komponen Sosial 104
Tabel 4.8 Daftar Penerima PKH Kabupaten Banyumas 2021 106
Tabel 4.9 Graduasi KPM PKH Kabupaten banyumas 2018-2020..... 123
Tabel 4.10 Morbiditas Kabupaten banyumas 2019-2020 128
Tabel 4.11 Angka Pendidikan Kabupaten banyumas 2019-2020 130
Tabel 4.12 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten banyumas 2017-2020..... 133
Tabel 4.12 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten banyumas 2017-2020..... 133
Tabel 4.13 Tabel Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan
Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2017 -2020 Kab Banyumas…….135

IAIN PURWOKERTO

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita luhur dari setiap bangsa adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi yang lebih penting adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang bebas dari kemiskinan. Dalam Pembukaan UUD 1945, UUD mengamanatkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan melindungi darah seluruh bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam penyelenggaraan kemandirian., tatanan dunia tan[pa penjajahan. Perdamaian dan keadilan sosial.

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi perhatian utama pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Kemiskinan dan pengangguran ibarat fenomena gunung es, masih ada hal belum bisa dijelaskan karena masih banyak yang tidak diketahui. Fenomena ini sebenarnya tidak berdiri secara terpisah, tetapi saling terkait dan berhubungan. Pengamat sosial, politik, ekonomi dan budaya telah menyuarakan keprihatinan, dan mereka menyadari bahwa apabila tidak ada contoh dan kerja keras yang serius dari Para pemangku kebijakan, maka fenomena tersebut akan membawa bangsa dan negara kehilangan arah dan rakyat lama-kelamaan tidak mampu menanggung beban yang bertubi-tubi.[1]

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus diteliti dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Tingginya angka kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab keterbelakangan dan menghambat pembangunan nasional. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*Multiplier Effects*)

[1]Wisnu Indrajid V. O. Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan).* (Malang: Intrans Publishing, 2014), hlm.25.

IAIN PURWOKERTO

terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya.[2]

Masalah kemiskinan juga dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori pengangguran terselubung, yang tidak produktif di pekerjaanya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja.[3]

Kemiskinan adalah kondisi multidimensi, dan sulit untuk didefinisikan dengan satu definisi. Banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu telah mencoba untuk mendefinisikan konsep kemiskinan, tetapi belum ada yang mencapai konsensus tentang konsep kemiskinan dalam definisi yang diterima. Perspektif yang digunakanpun beragam mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas.[4] Konsep kemiskinan secara universal mendefinisikan bahwa kemiskinan ialah keadaan seorang ataupun sekelompok orang dimana mereka tidak memilki kecukupan sumber daya untuk penuhi kebutuhan hidup yang aman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, ataupun ukuran spiritual. Definisi ini memfokuskan kemiskinan pada ketidakmampuan seorang dalam penuhi kebutuhan hidupnya.

IAIN PURWOKERTO

Islam memandang kemiskinan bukan cuma semata- mata ketidakmampuan dalam penuhi kebutuhan dasar namun kemiskinan ialah salah satu permasalahan kultural dimana seorang menjadi miskin sebab prilaku buruknya semacam malas buat bekerja serta berusaha.[5]

Kemiskinan kultural ini membahayakan ahlak, kelogisan berfikir, keluarga dan serta warga. Islampun menjawab kemiskinan sebagai bencana

---

[2]Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.280.

[3]Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat..*,hlm. 285.

[4]Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembnagunan, Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm.299.

[5] Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah,* Edisi Revisi, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hlm.70.

serta musibah yang wajib meminta perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Bila kemiskinan itu terus menjadi-jadi, sehingga ini akan menjadi kemiskinan yang mampu menciptakannya sifat lupa kepada Allah serta pula rasa sosialnya terhadap sesama.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus, maka harus ada kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. dalam formulasi Kebijakan wajib memakai riset serta data terbaik yang ada mengenai hasil program untuk membuat keputusan di seluruh tahapan proses kebijakan serta di tiap cabang pemerintahan. Perkembangan kebijakan yang berlangsung pada berbagai tahap serta meluas dari waktu ke waktu untuk merespon serta menanggulangi permasalahan yang ada. Menurut Sanderson bahwa penekanan lebih harus diberikan pada pengembangan basis bukti yang kuat untuk kebijakan melalui evaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan dan program.[6]

Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program bantuan tunai bersyarat atau disebut dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT), program yang cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi Negara-negara lain yang telah melaksanakan program tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) sebelumnya diperkenalkan untuk membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya beli ketika pemerintah menyesuaikan harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin guna memelihara dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin, serta memutus rantai kemiskinan yang telah terjadi selama ini. . Program Keluarga Harapan merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam strategi cluster pertama untuk memerangi kemiskinan di Indonesia. Program ini bersifat bantuan bersyarat dan disesuaikan dengan

IAIN PURWOKERTO

[6] Viqra Ramadanti, *Kebijakan Berbasis Bukti (Based Policy Evidence) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Bappeda Kota Makassar)*, (Thesis tidak diterbitkan Universitas Negeri Makassar), hlm.112.

komponen, kesejahteraan sosial, kesehatan dan pendidikan. Kesembungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan melenium (*Millennium Developmen Goals* atau MDGs).[7]

Kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, antara lain pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dimensi kemiskinan tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi, tetapi juga masalah non-ekonomi.. Kemiskinan tidak hanya berurusan dengan tingkat kesejahteraan sosial, sehingga ukuran kemiskinan sangatlah relatif, yakni individu yang satu akan berbeda dengan individu yang lain.[8]Untuk mendeteksi kemiskinan, ada beberapa strategi, diantaranya adalah strategi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar (*basic needs*) dipakai sebagai alat ukur kemiskinan direkomendasikan *United Nations* (1961), UNSRID (1966), Untuk konteks Indonesia, kebutuhan dasar menurut Biro Pusat Statistik terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).[9] Selain itu kemiskinan juga dapat dilihat dari (1) Terbatasnya akses pendidikan berkualitas, (2) Terbatas akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (3) Terbatasnya peluang mendapatkan pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, (4) Terbatasnya akses air bersih yang layak bagi kesehatan, (5) Terbatasnya akses informasi, (6) Terbatasnya akses transportasi, dan (7) Terbatasnya akses social.[10]

Untuk memahami permasalahan kemiskinan di Indonesia, perhatian juga harus diberikan pada letak tiap daerah yaitu tingkat kemiskinan lokal yang diidentifikasi oleh masyarakat atau pemerintah daerah. Mengembangkan struktur ekonomi yang ideal merupakan mekanisme perencanaan untuk menetapkan strategi sehingga semua keputusan yang

IAIN PURWOKERTO

---

[7]Kementrian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta), hlm.9.

[8] Istiana Hermawati, Dkk, *Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan*, (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2015), hlm.7

[9] Istiana Hermawati, Dkk, *Pengkajian* …., hlm.15

[10] Istiana Hermawati, Dkk, *Pengkajian* …., hlm.19

diambil dapat diambil secara tepat waktu dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Dalam pengambilan keputusan ini, data statistik memiliki perencanaan yang sangat penting untuk perencanaan strategi pengembangan dan hasil yang diperoleh untuk menentukan pedoman masa depan. Ini harus menghasilkan pertumbuhan dan mengubah struktur ekonomi yang ada, seperti perubahan sosial, mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Ekonomi regional bekerja sama antara sektor swasta dan pemerintah masyarakat dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang berkelanjutan. dialami di seluruh dunia Masalah kemiskinan itu sendiri tidak hanya menimpa dunia ketiga dan negara berkembang. Hal ini karena disamping istilah kemiskinan berkaitan dengan orang yang tidak mampu membiyai hidupnya atau mencukupi hidupnya secara layak, namun juga berkaitan dengan adanya ketimpangan diantara penduduk yang berpenghasilan tinggi dengan penduduk yang berpenghasilan rendah.[11]

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, Salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan yang harus dipenuhi adalah pendidikan dan kesehatan. Pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara berhak untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Untuk itu, pemerintah merencanakan berbagai langkah agar masyarakat miskin dapat terus mengakses Pendidikan dan kesehatan. Dan tindakan ini dilakukan pemerintah juga untuk melindungi masyarakat miskin yang notabene sama sekali tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi dirinya dan keluarganya.[12] hal ini seperti konsep dari islam yaitu damān al-Ijtimā. Menurut Muhammad Syauqî al-fanjârî damān al-Ijtimā' adalah tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya untuk memberikan kepada mereka kehidupan yang baik, sekurangnya tercukupi keperluan asas dalam hidup

IAIN PURWOKERTO

[11]Hudiyanto, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakrta, Linkar Media, 2014), hlm.12.

[12] Oktavia Tirani, *Implementasi Program Keluarga Harapan Di Dinas Sosial Kabupaten Poso*, Jurnal Katalogis Vol. 5, No.6 (Juni 2017), hlm.1-9.

mereka melalui bantuan dana yang mencukupi.[13] Maka pemerintah membuat kebijakan dalam pengentasan kemiskinan, seperti PKH atau Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pada tahun 2020 di Indonesia mengalami Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) , Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal Maret 2020 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor lainnya termasuk sosial ekonomi. Menyikapi dampak tersebut, sejak Maret 2020, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung daya beli dan kegiatan usaha masyarakat, yang menyebabkan masyarakat miskin kehilangan pekerjaan atau pendapatannya berkurang. Kelompok yang paling terkena dampak adalah mereka yang bekerja di perkotaan dan sektor informal. Hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pembatasan pengoperasian fasilitas umum.

Masyarakat miskin terutama menanggapi dampak pandemi dengan mengurangi pengeluaran dan mencari penghasilan tambahan. Pengurangan pengeluaran terutama dicapai dengan mengurangi/mengubah pola konsumsi dan menghilangkan uang saku anak. Misalnya, menambah penghasilan dengan berganti pekerjaan, melakukan pekerjaan sampingan, dan berpindah-pindah. Sejumlah kecil keluarga miskin juga melakukan upaya lain, seperti meminjam dan menggunakan tabungan. Keluarga miskin penerima PKH juga memanfaatkan bantuan yang diterimanya sebagai jaring pengaman untuk mengurangi dampak pandemi. Program tersebut membantu KPM meminimalkan dampak pandemi melalui pendapatan tunai, pengurangan pengeluaran, dan penyediaan makanan keluarga.

Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menjadi solusi dari masalah dan upaya pengentasan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga, Di bandingkan dengan program prakerja, Program Keluarga Harapan

IAIN PURWOKERTO

[13] Aidil Alfin, *Konsep Jaminan Sosial Dalam Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Istilah Takāful Al-Ijtimā'î, Damān Al-Ijtimā'î Dan Ta'min Al-Ijtimā'î*, Jurnal Al-Hurriyah Vol. 12, No.2 (Juli 2016), hlm.16.

(PKH) lebih bisa mengentaskan kemiskinan. Kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.[14] Dari definisi itu dapat diketahui bahwa prakerja tidak hanya diperuntukan untuk orang miskin saja. Bantuan prakerja dapat diakses baik yang masih membutuhkan maupun orang yang sudah sejahtera, bahkan yang dapat mengakses bantuan prakerja adalah orang yang sudah melek tekhnologi. Kalau dilihat prakerja memang kurang cocok untuk mengentaskan kemiskinan pleh sebab itu PKH adalah jawaban ketepatan penanggulangan kemiskinan dengan langsung ke akar rumput.

Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan sosial, dalam rangka meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat, menekan pengeluaran dan menurangi beban untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.[15] Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTKD PFM dan OTM) yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.[16] Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.[17]

Program Keluarga Harapan sudah berskala nasional sejak 2007, namun baru diberlakukan di Kabupaten Banyumas sejak 2013. Hal ini

IAIN PURWOKERTO

---

[14] https://www.prakerja.go.id/, diakses pada tanggal 12 Februari 2021

[15] Kementrian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2020*, (Jakarta), hlm.4.

[16] Kementrian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2020*, (Jakarta), hlm.4.

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 *Tentang Penanganan Fakir Miskin* Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1

terjadi karena kebijakan dan sistem pemerintah belum siap saat itu. Bersamaan dengan keputusan dari pemerintah di tahun 2013, sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas mulai menjadi penerima manfaat PKH. Selama kurun waktu itu juga yaitu 2013 sampai 2019 dapat diketahui angka kemiskinan menurun dengan adanya kartu PKH ini, di tahun 2013 dari 296,8 juta jiwa menjadi 211,6 juta jiwa pada tahun 2019. Kabupaten Banyumas memiliki kondisi kesejahteraan keluarga sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1. **Tabel Kondisi Masyarakat Banyumas**

Kemiskinan	**Tahun**						
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	296.8	283.5	285.9	283.9	283.25	226.2	211.6
Persentase Penduduk Miskin (persen)	18.44	17.45	17.52	17.23	17.05	13.5	12.53
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	295,742	309,106	320,585	344,514	357,748	366,442	385,140

Dari Tabel di atas dapat diketahui terjadi penurunan kemiskinan yang lumayan signifikan di Banyumas. Hal ini menjadi salah satu sumbangsih manfaat dari penerapan Program Keluarga Harapan (PKH). Dari 27 kecamatan yang ada di Banyumas, penerima manfaat PKH terdapat sekitar 104.606 keluarga. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: "*Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Banyumas*".

IAIN PURWOKERTO

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu Implementasi prgram Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Banyumas jawa tengah.

PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Millenium. Lima kompenen tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan.[18]

Tesis ini akan membatasi masalah kajianya pada implementasi kebijakan PKH dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Banyumas yang diturunkan pembahasannya menjadi tiga poin yaitu konsep Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan, Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan , Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas di kabupaten Banyumas dan pandangan secara Islam dan konvensional tentang kebijakan PKH.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan meliputi : (1) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan (2 Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan (3) Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas di kabupaten Banyumas dan pandangan secara Islam dan konvensional tentang kebijakan PKH..

C. Batasan Penelitian dan Rumusan Masalah

a) Batasan Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penulisan thesis ini tidak meluas dan tepat sasaran pada pokok pembahasan, maka penulis membatasi pembahasan hanya berfokus pada Peraturan Menteri Sosial Republik

[18] TNP2K, Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera, Jakarta*, Kementrian Sosial RI, 2017,hlm 1

IAIN PURWOKERTO

Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pedoman umum PKH dan analisis hanya dilakukan pada kabupaten Banyumas.

b) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas dan agar penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan yang hendak di capai maka perlu adanya rumusan yang jelas dan terarah, Secara khusus, penelitian ini menyelidiki yaitu konsep Kebijakan Pemda Banyumas dalam mengentaskan kemiskinan, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan ,dampak Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat di rasakan para KPM di kabupaten Banyumas, pandangan secara Islam dan konvensional tentang kebijakan PKH, faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan, dan Solusi kendala dalam Implemnetasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyumas?
3. Bagaimana Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas dan Pandangan Secara Islam Dan Konvensional Tentang Kebijakan PKH?

IAIN PURWOKERTO

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

3. Untuk mengetahui Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas dan Pandangan Secara Islam Dan Konvensional Tentang Kebijakan PKH.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.

b Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

c Sebagai upaya penerapan ilmu yang didapat selama menimba ilmu di Program Studi Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan antara lain meningkatkan peran pemerintah dalam membantu pengentasan kemiskinan di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

b) Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat, bahwa PKH dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya.

c) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan dan informasi di bidang ekonomi, serta diharapkan menjadi literatur ilmiah dan bahan bacaan lainnya bagi yang membutuhkan.

IAIN PURWOKERTO

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman guna menghindari timbulnya salah penafsiran mengenai judul thesis yang penulis lakukan, terlebih dahulu penulis mendefinisikan beberapa istilah penting yang ada dalam judul thesis ini. Istilah-istilah yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

a) Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.[19] Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmapuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.[20]

Kemiskinan (*poverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhanpun tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik.21 Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.22

Dari banyaknya definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang penyebab kemiskinan. Kajian tersebut dapat terlihat pada definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers dan definisi tersebut yang saat ini mendapat perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan

IAIN PURWOKERTO

---

[19]Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan,Teori, Masalah dan Kebijakan, (Yogyakarta: YKPN, 2002),* hlm.112.

[20]Chriswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, (Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 08/No.03/September/2005), hlm.112.

[21] Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.185.

[22] Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm.98-99.

di berbagai negara-negara berkembang. Chambers menyatakan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu:

1) Kemiskinan (*proper*)

   Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

2) Ketidakberdayaan (*powerless*)

   Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of Emergency*)

   Seseorang atau sekolompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.

4) Ketergantungan (*dependence*)

   Lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadapa pihak lain adalah sangat tinggi.

5) Keterasingan (*isolation*)

   Dimensi keterasingan yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.[23]

IAIN PURWOKERTO

---

[23] Rulan Ahmadi, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya)*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 10, No.2 (Desember 2012), hlm.12.

Dengan demikian dapat difahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam: (1) melakukan kegiatan usaha produktif, (2) menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi (3) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, dan (4) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

b) Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Istilah falah berasal dari bahasa arab dari kata aflaha-yuflihu yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaiitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.[24] Falah, adalah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Dengan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat memberikan dampak yang disebut maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik dalam material maupun non material, yaitu yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: (1) agama (*ad-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*), dan (5) intelek atau akal (*aql*).[25] Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak terpenuhi, agar manusia dapat hidup bahagia didunia dan akhirat. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.[26] Kesejahteraan dalam Islam adalah sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

---

[24]Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.2.

[25]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada), hlm.62.

[26]Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam....., hlm.6.

1) Terpenuhi Kebutuhan Lahiriyah

Kesejahteraan yang paling utama didalam Al-Qur'an adalah menyembah tuhan (*Allah*), yang mengandung makna bahwa proses kesejahteraan didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka yang paling utama adalah masyarakat yang benar-benar manjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang khalik.

2) Menghilangkan lapar

Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid, bahwa yang memberikan makan kepada yang lapar tersebut adalah Allah SWT, jadi ditegaskan bahwa rizki merupakan pemberian dar Allah SWT.

3) Menghilangkan rasa takut

Membuat rasa aman, nyaman dan tentram bagian dari indicator sejahtera atau tidaknya masyarakat. Jika masih banyak tindak criminal seperti perampokan, pembunuhan atau kriminal lainnya maka dapat di indikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejatera. Selain ketentraman lingkungan dibutuhkan juga ketentraman batin yakni dengan cara istiqomah dalam keimanan. karena yang memberikan ketenangan yang hakiki hanyalah Allah SWT.

4) Jaminan Sosial

Istilah falah berasal dari bahasa arab dari kata *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaiitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.[27] Falah, adalah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup

[27]Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.2.

IAIN PURWOKERTO

manusia secara seimbang. Dengan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat memberikan dampak yang disebut maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik dalam material maupun non material, yaitu yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: (1) agama (*ad-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*), dan (5) intelek atau akal (*aql*).[28] Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak terpenuhi, agar manusia dapat hidup bahagia didunia dan akhirat. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.[29] Kesejahteraan dalam Islam adalah sebagai berikut:

5) Terpenuhi Kebutuhan Lahiriyah

Kesejahteraan yang paling utama didalam Al-Qur'an adalah menyembah tuhan (*Allah*), yang mengandung makna bahwa proses kesejahteraan didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka yang paling utama adalah masyarakat yang benar-benar manjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang khalik.

6) Menghilangkan lapar

Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid, bahwa yang memberikan makan kepada yang lapar tersebut adalah Allah SWT, jadi ditegaskan bahwa rizki merupakan pemberian dar Allah SWT.

IAIN PURWOKERTO

[28]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada), hlm.62.

[29]Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam...,hlm.6.

7) Menghilangkan rasa takut

Membuat rasa aman, nyaman dan tentram bagian dari indicator sejahtera atau tidaknya masyarakat. Jika masih banyak tindak criminal seperti perampokan, pembunuhan atau kriminal lainnya maka dapat di indikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejatera. Selain ketentraman lingkungan dibutuhkan juga ketentraman batin yakni dengan cara istiqomah dalam keimanan. karena yang memberikan ketenangan yang hakiki hanyalah Allah SWT.

c) Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan *Millenium*. Lima kompenen tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka

IAIN PURWOKERTO

kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan.[30]

d) Tempat Penelitian

Banyumas adalah kabuaten di provinsi Jawa Tengah dengan ibukota Purwokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Brebes di utara, kabupaten Purbalingga, kabupaten Banjarnegara dan kabupaten Kebumen di Timur, serta Kabupaten Cilacap di Selatan dan Barat. Dengan luas wilayah 1.329,02 Km^2

G. Sistematika Penulisan

Susunan sistematis penulisan terbagi menjadi lima bab, tiap bab membahas masalahnya sendiri-sendiri, namun tetap ada keterkaitan antara sub bab dengan bab berikutnya.

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini membahas mengenai (a) latar belakang masalah, (b) Batasan dan rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, dan (e) sistematika pemahasan.

Bab II membahas lebih terperinci mengenai apa pengertian implementasi, Program Keluarga Harapan dan pengentasan kemiskinan.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari : (a) Rancangan Penelitian, (b) Kehadiran Peneliti, (c) Lokasi Penelitian, (d) Sumber Data, (e) Teknik Pengumpulan Data, (f) Analisis Data, (g) Pengecekan Keabsahan Temuan, (h) Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari : (a) Deskripsi Data, (b) Temuan Penelitian. Pembahasan, terdiri dari: (a) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyumas, (b) kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyumas, (c) Untuk mengetahui Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas dan Pandangan Secara Islam Dan Konvensional Tentang Kebijakan PKH

Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dam saran.

IAIN PURWOKERTO

[30]TNP2K, Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan Meraih Keluarga Sejahtera*, Jakarta, Kementrian Sosial RI, 2017, hlm 1.

BAB II
LANDASAN TEORI
KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

A. Kebijakan Program

1. Pengertian Teori Kebijakan

Kata "kebijakan" berasal dari kata bijak yang berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, dan mahir. [31] Kebijakan adalah suatu proses formulasi (merumuskan), implementasi (melaksanakan) dan evaluasi yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan pemerintah dengan *stakeholder* dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai masalah publik, urusan publik dan sumber daya yang ada untuk kemashlahatan.[32]

Kebijakan adalah proses merumuskan, melaksanakan, menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang berkelanjutan dan saling terkait dalam proses pengaturan, pengelolaan, dan penyelesaian berbagai urusan, masalah, dan sumber daya yang ada untuk kepentingan publik oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Dalam tiga proses tersebut yaitu tahapan implementasi dan evaluasi kebijakan publik, kebijakan publik yang dihasilkan harus benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, yang merupakan hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan bahwa setiap kebijakan publik yang dihasilkan harus benar-benar bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.[33]

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah alat atau instrument (sarana) untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang

IAIN PURWOKERTO

[31] Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 115.
[32] Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, hlm 3.
[33] Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, hlm 3.

mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi *reward* (Apresiasi) dan *sanctions* (sanksi). Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah kerangka kerja yang terperinci (*blueprint*) bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Merumuskan dan merancang kebijakan dengan cermat untuk membentuk perilaku kelompok sasaran (kelompok sasaran) sesuai dengan rasionalitas kebijakan dan cara perumusannya.[34]

Thomas R. Dye mendifinisikan kebijakan negara sebagai *is whatever governmenet choose to do or not to do.* Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.[35]

Teori Karl Popper menjelaskan bahwa suatu kebijakan publik dirumuskan untuk memecahkan permasalahan publik seperti kemiskinan, pengangguran, konflik sosial dan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat secara umum. Teori kebijakan yang dinyatakan oleh Karl Popper berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi kebijakan dapat mengukur tingkat keberhasilan kebijakan publik yang telah diputuskan. Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat. Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk

IAIN PURWOKERTO

[34] Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group) 2012, hlm. 20.

[35] Amri Marzali, *Antropologi* …….., hlm. 21.

membuat program berjalan. Berkaitan dengan badan-badan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan.[36]

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mereka mendefinisikan kebijakan dalam hal ini yaitu kenijakan public, mereka mengungkapkan bahwa kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah kegiatan atau rencana tertentu. Kebijakan adalah proses dimana pemerintah dan pemangku kepentingan merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang berkelanjutan dan saling terkait dalam proses pengaturan, pengelolaan, dan penyelesaian berbagai urusan, masalah, dan sumber daya yang ada untuk kepentingan publik. Kebijakan yang disebutkan dalam studi ini merupakan rangkaian konsep atau rencana yang dirumuskan oleh pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan..

2. Tujuan Kebijakan

Carl Friedrich mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang diamaksud.

Kebijakan yang baik pasti memiliki tujuan yang baik pula. Tujuan yang baik memiliki sekurang-kurangnya tiga kriteria, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, dan berorientasi ke depan. Unsur kedua dari kebijakan adalah masalah. Masalah merupakan unsur penting dari suatu kebijakan. Salah dalam menentukan masalah apa yang hendak

[36] Eky Riswiana, Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Keluarga Miskin Di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus Di Kecamatan Wonopringgo). Tesis, 2020. hlm, 64

IAIN PURWOKERTO

dipecahkan, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan.

Menurut Bridgeman dan Davis menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan-tujuan tersebut terbagi dalam tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

1) Kebijakan publik sebagai tujuan

   Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh public sebagai konstituen pemerintah.

2) Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

   Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

IAIN PURWOKERTO

3) Kebijakan publik sebagai hipotesis

   Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai prilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakn juga selalu memuat disensetif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Dalam kaitanya dengan tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa tujuan tentang karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Secara umum, fokus kebijakan publik adalah tindakan dengan maksud atau tujuan tertentu, bukan perubahan atau perilaku acak. Kebijakan publik pada dasarnya mencakup bagian atau modus kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, bukan keputusan terpisah. Kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah untuk mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menyediakan perumahan umum, bukan apa yang akan atau akan dilakukannya. Kebijakan publik bisa berbentuk positif atau negatif. Sisi positifnya, kebijakan tersebut melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas untuk menyelesaikan masalah; sisi negatifnya, kebijakan publik dapat berupa keputusan pejabat pemerintah untuk tidak mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan, bahkan dalam hal ini partisipasi pemerintah adalah sangat dibutuhkan. Setidaknya berdasarkan hukum positif,dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

3. Fungsi Kebijakan

Fungsi kebijakan lebih mengkhususkan diri pada manfaat yang di dapat. Waloupun Sepintas terdengar mirip dengan tujuan. Beberapa poin mungkin terlihat sama persis. Beberapa fungsi kebijakan public sebagai berikut:[37]

1) Ketertiban

Kebijakan public dibuat agar terjadinya ketertiban. Ketertiban ini akan memperlancar pembangunan. Pembangunan di berbagai bidang dapat terlaksana dengan baik. Pihak-pihak yang ingin berinvestasi juga akan percay dengan kondisi suatu Negara khususnya Negara indonesia. semua dapat berjalan dengan adanya kebijakan public. Tanpa adanya

IAIN PURWOKERTO

[37] Eky Riswiana, *Dampak* ……..65

kebijakan public maka masyarakat akan saling bertikai untuk mendapatkan haknya.

2) Menjamin Hak Asasi Manusia

Fungsi lain kebijakan public adalah menjamin pelaksanaan hak asasi. Agar setiap orang dapat terpenuhi hak asasinya. Tidak ada orang yang tertindas karena melanggar hak asasinya. Atau karena orang lain menuntut hak asasi dirinya tanpa memikirkan kepentingan orang lain.

3) Petunjuk program kegiatan

Setiap mencapai tujuan tentu ada rencana untuk kegiatan. Sebuah rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, kebijakan public ini ibaratnya menjadi petunjuk dan rambu dalam mencapai kegiatan. Ada beberapa hal yang tidak tercantum dalam rencana kegiatan. Dengan dikeluarkannya kebijakan public, masalah yang terjadi di tengah akan disesuaikan rambu kebijakan public yang dibuat.

4) Arah kepada pelaksana

Kebijakan public dibuat atau dikeluarkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Dengan kebijakan akan menentukan kapan pekerjaan harus selesai. Pelaksanaan akan mencari jalan bagaimana agar pekerjaan dan program selesai tepat waktu.

5) Menyelengarakan Administrasi dan Urusan Tata Usaha

Kebijakan public berfungsi sebagai penyelenggara administrasi dan urusan tata usaha. Setiap kebijakam akan dicatat, sehingga jelas pelaksaan, tujuan, dan hasilnya untuk kemudian dievaluasi. Tanpa kebijakan public, seorang pemimpin bisa saja mengeluarkan pernyataan tentang sesuatu, tetapi tidak dijadikan atauran atau ketentuan.

IAIN PURWOKERTO

B. Manajemen Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)

Kebijakan program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan untuk beberapa kriteria yang telah dipaparkan diatas, dalam penelitian ini kebijakan Program Harapan ditujukan untuk pengentasan atau penanggulangan Kemiskinan. Adapun dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk :[38]

1) Pengembangan potensi diri

   Pemerintah dan oemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Pengembangan potensi diri sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental,spriritual, dan ketrampilan

2) Bantuan pangan dan sandangpenyediaan pelayanan perumahan

   Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan

3) Penyediaan pelayanan kesehatan

   Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Selanjutnya, pembiayaan penyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaan melalui sistem jaminan sosial nasional.

4) Penyediaan pelayanan pendidikan

   Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa

5) Penyediaan akses kesemoatan kerja dan berusaha

   Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesmepatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:

IAIN PURWOKERTO

[38] Undang-Undang republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

a) Penyediaan informasi lapangan kerja
b) Pemberian fasilitas pelatihan dan ketrampilan
c) Peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro, dan/atau
d) Penyediaan faislitas bantuan permodalan

6) Pelayanan sosial

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial. Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a) Meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup
b) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
c) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan, dan
d) Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada KPM atau Keluarga Penerima Manfaat yang memiliki Komponen Kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan social dalam keluarganya, komponen itu sendiri yang terdiri dari anak sekolah SD, SMP, SMA, Balita 0-15 tahun dan/atau ibu hamil, Lansia dan disabilitas, dimana penerima bantuannya adalah ibu.

PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun system perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yan gterjadi selama ini.[39] Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH memungkinkan keluarga miskin khususnya ibu hamil dan anak untuk menggunakan berbagai fasilitas

[39] Aprilia Saraswati, *Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, 2018, hlm. 32

IAIN PURWOKERTO

pelayanan kesehatan (FASKES) dan fasilitas pelayanan pendidikan (FASDIK) di sekitarnya. Selain itu juga mulai mendorong manfaat PKH, yaitu mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan menjaga derajat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan tugas Presiden Nawacita Republik Indonesia.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memperoleh dan menggunakan pelayanan sosial dasar untuk memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan bantuan, termasuk akses ke berbagai program perlindungan sosial lainnya, yang merupakan program pendamping berkelanjutan. PKH bertujuan menjadi pilar pengentasan kemiskinan yang memungkinkan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional saling melengkapi.

Sejak 2007, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bukanlah kelanjutan dari program subsidi tunai langsung yang selama ini berjalan, program untuk membantu keluarga miskin menjaga daya beli saat pemerintah menyesuaikan harga BBM. Tujuan PKH lebih untuk membentuk sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin, dan memutus rantai kemiskinan yang selama ini telah terbentuk. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang telah masuk dalam kategori pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan terkait dengan pendidikan, kesehatan dan pencapaian dasar lansia dan penyandang cacat berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian *Millennium Development Goals*. Lima kompenen tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan.[40]

IAIN PURWOKERTO

[40]TNP2K, Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017), 1.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) diartikan sebagai program bantuan yang telah masuk dalam strategi penanggulangan kemiskinan gelombang pertama di Indonesia. Rencananya adalah bantuan tunai bersyarat yang terkait dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan keseluruhan PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap dan perilaku keluarga sangat miskin (RTSM) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk lebih mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Salah satu kebijakan sosial yang dirumuskan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin. Imbalannya, KPM harus memenuhi persyaratan terkait upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tujuan jangka pendek PKH adalah memberikan efek pendapatan dengan mengurangi biayaSementara tujuan jangka panjangnya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan KPM melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak *(price effect*) serta memberikan kepastian akan masa depan anak (*insurance effect*) dan mengubah perilaku (*behaviour effect*) keluarga miskin. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan KPM. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas :

1) Meningkatkan kondisi social ekonomi RTSM
2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM
3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah dari RTSM

IAIN PURWOKERTO

Sedangkan tujuan PKH yang lain dipaparkan sebagai berikut:[41]

1) Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan,kesehatan, dan kesejahteraan social.
2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.
3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan,
5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Tujuan yang tek kalah penting adalah Meningkatkan akses atas kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KPM PKH. KPM yang menjadi sasaran PKH adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap, yang terikat oleh pertalian darah (keluarga batih) yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah garis fakir miskin dan terdaftar pada Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS.[42]

IAIN PURWOKERTO

3. Konsep Program Keluarga Harapan

Istilah *falah* asal muasalnya dari bahasa arab yaitu dari kata *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yang dapat di artikan kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.[43]

Falah, adalah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Dengan tercukupinya kebutuhan hidup

---

[41] Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Buku Kerja Pendampingan Program Keluarga Harapan (ED. Revisi, 2021), hlm. 23

[42] Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Buku Kerja Pendampingan Program Keluarga Harapan (ED. Revisi, 2012), hlm. 1

[43]Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.2.

masyarakat memberikan dampak yang disebut maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik dalam material maupun non material, yaitu yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia..[44] Kesejahteraan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) Terpenuhi Kebutuhan Lahiriyah

   Kesejahteraan yang paling utama dalam Alquran adalah beribadah kepada Allah, artinya perkembangan tauhid sebelum proses kesejahteraan, maka sebelum kemakmuran masyarakat, yang terpenting adalah masyarakat yang benar-benar berelindung Allah .

2) Menghilangkan lapar

   Dan serahkan diri Anda sepenuhnya kepada sang pencipta Artinya tauhid harus diulangi dulu, Allah SWT-lah yang memberi makan kepada yang lapar, maka penting untuk ditegaskan bahwa Rizky adalah anugerah Allah SWT.

3) Menghilangkan rasa takut

   Ada tidaknya rasa aman, nyaman dan damai merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Jika masih banyak kejahatan seperti perampokan, pembunuhan atau kejahatan lainnya, berarti masyarakat belum sejahtera. Selain ketentraman lingkungan, juga harus ada ketentraman batin, yakni melalui keimanan kepada Islam. Karena hanya Allah SWT yang bisa memberikan ketenangan dasar.

IAIN PURWOKERTO

4. Prosedur Kriteria Program Keluarga Harapan

Peserta PKH adalah Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang dapat di sebut juga rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin (RTSM) yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penanganan Fakir Miskin (DTKS PFM) dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program atau yang di sebut Komponen.[45]

---

[44]Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam..., hlm.6.

[45] Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, (Ed. Revisi, 2013), h. 19.

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian sebagai berikut: [46]

1) Komponen kesehatan

   Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

   a. Ibu hamil/

      Ibu hamil adalah kodisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi 2 Kehamilan

   b. Anak Usia Dini

      Anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur di hitung dari ulang tahun terakhir) yang belum sekolah

2) Komponen Pendidikan

   Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. anak usia sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

3) Komponen Kesejahteraan Sosial

   Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

   a) Lanjut usia. Dalam hal ini yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga

   b) Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain

IAIN PURWOKERTO

[46] Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Buku Kerja Pendampingan Program Keluarga Harapan (ED. Revisi, 2021), hlm. 23

dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam Kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga

5. Langkah-langkah Pelaksanaan PKH

proses pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan, tahapan tersebut terdiri dari beberapa hal yaitu antara lain:[47]

1) Perencanaan

   Perencanaan dilakuakn untuk menentukan lokasi dan jumlah calon KPM. Lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dapat dikecualikan bagi korban bencana alam, bencana sosial dan komunitas adat terpencil (KAT). Penetapan calon KPM PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

2) Pertemuan Awal dan Validasi

   Pendampingan sosial PKH melaksanakan sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA) agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH.

3) Penetapan KPM PKH

   Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data KPM PKH exizting hasil pemutakhiran data dan data hasil validasi calon KPM PKH sesuai kriteria kepesertaan PKH. Data yang status rekening aktif selanjutnya ditetapkan menjadi KPM PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga

4) Penyaluran Bantuan Sosial

   a) Bentuk Bantuan Sosial

IAIN PURWOKERTO

[47] Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Buku Kerja Pendampingan Program Keluarga Harapan (ED. Revisi, 2021), hlm. 27

Bantuan sosial PKH memberikan dalam bentuk uang kepada seseorang, eluarga atau masyarakat miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH melalui Surat Keputusan Direktur Jendral Sosial Keluarga

b) Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran Bantuan Sosial untuk penerima manfaat PKH dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran berjalan berdasarkan skema penyaluran bantuan sosial seusia yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial.

c) Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Peyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS(atau buku tabungan).

5) Pemutakhiran Data

Maksud dan tujuan pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar pogram perlindungan sosial. Khusus p=PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan.

6) Verifikasi komitmen

a) Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH mensyaratkat pemenuhan Kwajiban terkait pemanfaatan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan sosial oleh KPM PKH.

b) Verifikasi komitmen bertujuan untuk memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftra, hadir dan mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan secara rutin sesuai dengan protocol kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

c) Pelaksanaan entri data verifkasi komitemn dilakukan oleh pendamping setiap bulan melalui aplikasi e-PKH untuk

IAIN PURWOKERTO

mencatat kehadiran seluruh anggota KPM pada setiap kunjungan ke layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

d) Data hasil entri verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar penyaluran, penangguhan, dan penghentian bantuan.

7) Pendampingan

Pendampingan bagi PKM PKH diperlukan untuk mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

8) Transformasi Kepesertaan

Kepsesertaan penerima bantuan PKH selama enam tahun, setelah itu diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap KPM PKH dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial serta peningkatan status sosial ekonomi. Transformasi kepesertaan merupakan proses pengakhiran sebagai KPM PKH melalui kegiatan resertifikasi. Dalam tahap resertifikasi, KPM PKh kembali dilakukan pendataan ulang dan evaluasi status sosial ekonominya.

IAIN PURWOKERTO

C. Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan

Istilah *falah* asal muasalnya dari bahasa arab yaitu dari kata *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yang dapat di artikan kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.[48] *Falah*, adalah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Dengan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat memberikan dampak yang disebut maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik dalam material

[48]Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.2.

maupun non material, yaitu yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Jika kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang, maka hal itu terwujudnya sebuah *falah*, *Falah* itu sendiri yaitu adalah kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat memiliki dampak yang disebut *maslahah*. *Maslahah* adalah mendatangkan kebaikan dari segala bentuk, baik materiil maupun non materi, yang dapat meningkatkan status manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) suatu masyarakat bergantung pada upaya mencari dan memelihara lima tujuan pokok, yaitu: agama (*ad-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*) dan kecerdasan atau kecerdasan (*aql*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar umat manusia, yaitu kebutuhan yang benar-benar terpenuhi, agar umat manusia dapat hidup bahagia di dunia ini dan akhirat. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kebahagiaan hidup pasti tidak akan sempurna..[49]

Istilah jaminan sosial adalah terjemahan dari kata *social security*, merupakan istilah yang muncul pertama kali dalam undang-undang Amerika (United State/U.S) *"the Social Security Act 1935*". Istilah yang sering dipakai oleh para sarjana. Muslim ketika membahas isu jaminan sosial ini adalah *takāful al-ijtimā'ī, damān al-ijtimā'ī* dan *ta'min al-ijtimā'ī*.

Bab 1, Pasal 6, Menteri Keuangan Republik Indonesia mendefinisikan jaminan sosial sebagai rencana yang dilembagakan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kehidupan yang layak.[50] Negara / daerah yang menyelenggarakan jaminan sosial memiliki pemahaman yang berbeda tentang jaminan sosial, tergantung dari rencana yang mereka implementasikan. Namun sebenarnya pada tulisan kali ini, penulis tidak akan menjelaskan definisi jaminan sosial berdasarkan perspektif masing-masing negara, melainkan akan menjelaskan definisi jaminan sosial dari

[49]Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam...,hlm.6.
[50] Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

IAIN PURWOKERTO

perspektif hukum Barat / konvensional atau ulama dan hukum Islam / cendekiawan Muslim.

Sedangkan Ibn Hazm mendefinisikan jaminan sosial sebagai jaminan, pembebanan, pertanggungan, penerimaan (pengalihan hak). Jadi orang yang menjamin adalah orang yang menerima jaminan, menanggung,bertanggung jawab,menjadi beban. Pada umumnya kebolehan jaminan itu pada setiap hak orang yang menjual atau lainnya. Oleh karena itu tidak pada jual beli semata tetapi pada dasarnya hanya pada pengalihan hak saja. Selanjutnya, Ibn Hazm juga mengungkapkan konsep jaminan sosial dalam ekonomi islam yaitu bahwa dlaam sebuah Negara, ada keharusan bagi orang-orang yang mampu (kaya) untuk menanggung kehidupan terhadap masyarakat yang miskin. Karena itu tugas bagi pemerintah adalah menegakkan pelaksanaanya terhadap mereka, ketika mereka tidak membayar zakat atau harta lainnya yang menjadi milik dari pada kekayaan kaum muslimin.[51]

Menurut Kenneth Thomson salah seorang pakar pada Organisasi *International Social Security Association* (ISSA) di Genewa, jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya terhadap berbagai resiko atau peristiwa tertentu dengan tujuan sedapat mungkin mencegah berlaku peristiwa-peristiwa tersebut yang bisa menyebabkan hilangnya atau berkurangnya sebahagian besar penghasilan, dan juga bertujuan untuk memberikan rawatan medis dan atau bantuan keuangan jika terjadi peristiwa tersebut.

Jaminan sosial menurut International Labour Organisation (ILO) dan diterapkan dalam undang-undang buruh adalah perlindungan masyarakat terhadap anggota-anggotanya melalui seperangkat kebijakan umum untuk menghadapi resiko ekonomi dan sosial yang disebabkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan karena sakit, cedera, kemalangan kerja, hilangnya

IAIN PURWOKERTO

[51] Syufa'at . Fikih *Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ibn Hazm (994-1064 M).* Jurnal IAIN Purwokerto, 2015. hlm, 116

pekerjaan, usia tua dan kematian dengan memberikan pelayanan medis atau jaminan keuangan kepada keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan.[52]

Jaminan sosial sendiri merupakan salah satu komponen dari bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam BAB 1 pasal 4 huruf B yaitu yang berisi:

> Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud yaitu meruakan bagian serta tugas dari Kementerian Negara/Lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan program perlindungan sosial,rehabilitas sosial,jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar, dan penanggulangan bencana.[53]

Salah satu kebijakan jaminan sosial yang diterapkan di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan. Sejak tahun 2007, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB), yang saat ini dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH), untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Program Bantuan Tunai Bersyarat (CCT) telah dilaksanakan di banyak negara dan telah mencapai sukses besar dalam mengurangi kemiskinan yang dihadapi oleh negara-negara pelaksana.

IAIN PURWOKERTO

D. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana ketidakmampuan secara ekonomi tidak dapat memenuhi standar rata-rata kebutuhan dasar di suatu daerah. Penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan menggambarkan keadaan ketidakmampuan ini..[54] Kemampuan berpenghasilan rendah tidak hanya menyebabkan kebutuhan dasar tidak mencukupi, tetapi juga mempengaruhi

---

[52] Aidil Alfin, Konsep Jaminan Sosial Dalam Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Istilah Takāful Al-Ijti Mā'î, Damān Al-Ijti Mā'î Dan Ta'min Al-Ijti Mā'î). Jurnal Stain Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2011, hlm. 17

[53] Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

[54]Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan,Teori, Masalah dan Kebijakan, (Yogyakarta: YKPN, 2002),* hlm.112.

ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi standar hidup rata-rata, seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan..[55]

Kemiskinan (*poverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhanpun tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik.[56] Atau dalam situasi ekonomi, kelompok tersebut memiliki kesempatan terbatas untuk memperoleh sumber daya pembangunan.[57]

Kemiskinan sendiri merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang mengalami keadaan pendapatan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan shari-hari. Masyarakat miskin sendiri dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada BAB 1 Pasal 1 yaitu masyarakat yang berdasarkan kriteria tertentu ditetapkan oleh kementerian Negara/Lembaga.[58]

Dari banyaknya definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang penyebab kemiskinan. Kajian tersebut dapat terlihat pada definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers dan definisi tersebut yang saat ini mendapat perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang. Chambers menyatakan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu:

1) Kemiskinan (*proper*)

   Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

IAIN PURWOKERTO

---

[55]Chriswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, (Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 08/No.03/September/2005), hlm.112.

[56] Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.185.

[57] Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm.98-99.

[58] Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

2) Ketidakberdayaan (*powerless*)

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of Emergency*)

Seseorang atau sekolompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.

4) Ketergantungan (*dependence*)

Lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadapa pihak lain adalah sangat tinggi.

5) Keterasingan (*isolation*)

Dimensi keterasingan yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.[59]

IAIN PURWOKERTO

Dengan demikian dapat difahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam: (1) melakukan kegiatan usaha produktif, (2) menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi (3) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, dan (4) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

---

[59] Rulan Ahmadi, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya)*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 10, No.2 (Desember 2012), hlm.12.

Baidhawy menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui 3 pokok yakni merevitalisasi peran Negara, menegakkan daulat masyarakat, dan oenguatan institusi keluarga. Negara menurut Baidhawy harus menegakan keadilan ekonomi politik melalui kerjasama multilateral, menyusun berbagai regulasi pro-masyarakat miskin dan pro-syariat ang berhubungan dengan kegiatan perekonomian, menghidupkan tanah mati untuk dibuat lahan pertanian atau usaha yang lain agar dapat menambah lapangan pekerjaan dan mendukung proses pengentasan kemiskinan, menghentikan eksploitasi SDA demi kepentingan public dan masyarakat miskin. Kemudian menegakkan kedaulatan masyarakat melalui jalur politik,ekonomi, dan kebudayaan. Serta yang tidak kalah adalah menguatkan institusi keluarga dengan menanamkan nilai islami berupa sikap konsumsi sederhana dan proporsional.[60]

Sesuai dengan buku profil PMKS Kemensos tahun 2011, disampaikan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga maupun kelompok masyarakat yang mengalami hambatan serta gangguan dalam melaksanakan fungsi sosial sehingga menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan hidup baik jasmani, rohani dan sosial secara normal. Hambatan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, tuna sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Kriteria penentuan PMKS dikaitkan melalui kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup makanan pokok, lauk pauk dan pakaian, kemudian pemenuhan kebutuhan sosial berupa pendidikan dasar, tempat tinggal, keluhan kesehatan, derajat ketelantaran, keberadaan ayah kandung (khusus PMKS golongan anak-anak). Pentingnya tujuan menciptakan suatu kondisi kesejahteraan sosial yakni agar terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan warga negara dapat hidup

IAIN PURWOKERTO

[60] Muhammad Iqbal, *Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Islam*, 2017

layak serta mampu mengembangkan diri untuk melaksanakan fungsi sosialnya sebagaimana mestinya.[61]

Pada buku profil hasil pendataan keluarga BKKBN tahun 2013 dijelaskan sebagaimana kesejahteraan suatu rumah tangga dalam setiap kabupaten diklasifikasikan menjadi lima tingkatan diantaranya Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus. Tingkatan keluarga pra sejahtera dimaknai sebagai keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan keluarga sejahtera I. Adapun tingkatan keluarga sejahtera I yaitu mereka yang baru dapat memenuhi indikator-indikator seperti (1) kesempatan anggota keluarga untuk makan dua kali sehari atau lebih, (2) anggota keluarga memiliki pakaian berbeda selama di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, (3) rumah mempunyai atap, lantai, dinding yang baik, (4) kemampuan membawa anggota keluarga sakit ke sarana kesehatan, (5) kemampuan pasangan usia subur untuk mendapatkan fasilitas KB di sarana pelayanan kontrasepsi, (6) semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Tingkatan keluarga sejahtera II adalah mereka yang sudah dapat memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera I (indikator 1 s/d 6) ditambah indikator berikut, (7) anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, (8) minimal seminggu sekali seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur, (9) seluruh anggota keluarga mampu membeli minimal satu pasang pakaian baru dalam setahun, (10) luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah, (11) tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, (12) terdapat seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan, (13) seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis, (14) pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat kontrasepsi. Selanjutnya tingkatan keluarga sejahtera III merupakan mereka yang sudah memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II (indikator 1

IAIN PURWOKERTO

[61] Dokumen PMKS Kemensos 2011 Tentang Kemiskinan

s/d 14) ditambah indikator berikut, (15) keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama, (16) sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang, (17) kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi, (18) keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, (19) keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv. Terakhir, tingkatan keluarga sejahtera III plus yaitu mereka yang memenuhi indikator tahapan keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II dan keluarga sejahtera III (indikator 1 s/d 19) ditambah indikator berikut, (20) keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial, (21) terdapat anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/ yayasan/institusi masyarakat.

Menurut analisis data kemiskinan BPS, jumlah penduduk miskin versi pengukuran BPS makro diperoleh melalui pendekatan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan atau disebut juga pendekatan moneter. Kriteria dalam menentukan penduduk miskin versi pengukuran BPS makro adalah mereka yang pengeluarannya berada dibawah garis kemiskinan maka dianggap sebagai orang miskin. Garis kemiskinan merupakan nilai dari pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan per kapita per bulan. Batas kecukupan pada makanan disebut dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM), terdiri dari 52 komoditi dasar makanan yang sering dikonsumsi meliputi beras, gula pasir, telur ayam ras, dan lain-lain. Nilai pengeluaran dari paket komoditi tersebut kemudian disetarakan menjadi 2.100 kilokalori per kapita per hari. Angka tersebut dijadikan standar minimum untuk makanan memadai yang harus dikonsumsi oleh seseorang dalam sehari. Komponen berikutnya yaitu dinilai berdasarkan status Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penjumlahan nilai kebutuhan minimum komoditi non makanan mencakup pengeluaran diantaranya untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama, serta barang dan jasa esensial lainnya. Penghitungan jumlah penduduk miskin versi pengukuran BPS mikro

IAIN PURWOKERTO

menggunakan pendekatan non moneter. Pengukuran kemiskinan BPS mikro yang mampu menyediakan data mengenai rumah tangga miskin sampai dengan nama dan alamatnya. Versi pengukuran kemiskinan BPS mikro mengklasifikasikan rumah tangga miskin menjadi empat kondisi diantaranya sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin lainnya. Adapun beberapa hal yang dijadikan standar dalam pengukuran kemiskinan mikro meliputi keterangan umum Anggota Rumah Tangga (ART) terdiri dari nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, hubungan dengan kepala keluarga, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, kecacatan, dan penyakit kronis.[62] Keterangan selanjutnya diukur berdasarkan standar perumahan berupa status kepemilikan rumah, luas lantai, jenis lantai, jenis dinding, jenis atap, sumber air minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan utama, daya terpasang, bahan bakar energi untuk memasak, penggunaan fasilitas buang air besar, tempat pembuangan tinja serta aset yang dimiliki.

Kemiskinan menurut BPS, adalahketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Garis kemiskinan makanan mengacu pada pengeluaran seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimum makanannya sebanyak 2.100 kalori per orang. World Bank menetapkan garis kemiskinan US $ 2 per orang per hari. World Bank mendifinisikan kemiskinan merupakan kemampuanatau sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga.

Umumnya, suatu keadaan disebut miskin bila ditandai oleh kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial,

IAIN PURWOKERTO

[62] Dokumen BPS Pengukuran Kemiskinan 2012

sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah. Kriteria lain yang digunakan untuk mengukur kemiskinan penduduk menurut Zulkifli Husin adalah dengan menggunakan Rasio Kebutuhan Fisik Minimum (RKFM). Apabila diasumsikan kebutuhan fisik minimum sesuai dengan kondisi yang dihadapi sekarang ini, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum empat sehat lima sempurma adalah sebesar Rp 2.500,00 perkapita perhari, dapatditentukan besarnya kebutuhan fisik minimum per bulan. Dengan nilai tersebut dapat dihitung nilai kebutuhan fisik minimum per bulan sebesar Rp 2.500,00 X 30 hari = Rp 75.000,00, dan per tahun sebesar Rp 2.500,00 X 365 hari = Rp 912.500,00.

Apabila nilai kebutuhan fisik minimum per kapita per tahun dijadikan sebagai pembagi, maka akan diperoleh Rasio Kebutuhan Fisik Minimum (R-KFM). Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dikategorikan apakah penduduk tersebut miskin atau tidak. Apabila nilai R-KFM yang diperoleh sama dengan satu, berarti penduduk tersebut dikategorikan sebagai miskin, karena tingkat pendapatannya setingkat dengan tingkat subsisten *(subsistence level).* Artinya, pendapatan yang diperoleh orang tersebut hanya cukup untuk mempertahankan hidup. R-KFM diformulasikan sebagai berikut:

a. Miskin sekali, apabila R-KFM 0,75
b. Miskin apabila, R-KFM 0,76 -1,00
c. Nyaris miskin, apabila R-KFM 1,01 -1,50
d. Nyaris kaya apabila, R-KFM 1,51 - 2,00

Relevansinya dalam usaha penanggulangan kemiskinan atau pengentasan kemiskinan, memang diakui bahwa secara nasional telah dilaksanakan melalui program jaring pengaman sosial QPS) atau social safety net (SSN) dan program kompensasi (CP) yang dipadu dengan Program Penanggulangan Kemiskinan atau Poverty Allevation (PA). Pada prinsipnya, program JPS bertujuan untuk membantu penduduk miskin agar tidak menjadi semakin miskin dan terpuruk, serta agar dapat hidup layak . Dengan demikian dapat dipahami bahwa orang miskin adalah mereka yang selalu tidak berdaya

IAIN PURWOKERTO

atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu tidak mampu: (1) melakukan kegiatan usaha yang produktif, (2) memperoleh peluang sumber daya sosial ekonomi. , (3) menentukan nasib sendiri dan Selalu didiskriminasi; (4) Singkirkan gagasan dan budaya yang buruk, serta selalu memiliki harga diri dan harga diri yang rendah Upaya lain untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah partisipasi aktif seluruh masyarakat melalui kampanye berskala besar. Kampanye tersebut diluncurkan untuk menghilangkan kesan bahwa penanggulangan kemiskinan "hanya" menjadi tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip silih asih, silih asuh dan silih asah. Kepedulian pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat melalui program untuk mensejahterkan masyarakat dengan Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, atau salah satunya melalui program jaminan social yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).[63]

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, selain mengambil dari buku referensi penulis juga menelaah penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan kebijakan program keluarga harapan (PKH).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Munawwarah Sahib (2016) Tesis	Indpenden: *Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)* Dependen: *Penanggulangan Kemiskinan* Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier	Program Keluarga Harapan sesuai dengan prinsip Tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khalifah dan prinsip keadilan.	Pemasalahan yang dihadapi

[63] Yulianto Kadji, *Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya*. Jurnal. Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ung

IAIN PURWOKERTO

2.	Santoso Wibowo (2011) Tesis	Independen: *Implementasi Program Keluarga Harapan* Dependen: *Derajat Kesejahteraan Masyarakat Miskin* Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier.	Implementasi Program Keluarga Harapan diperlukan sinergi, sinkronisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, komitmen kelembagaan baik ditingkat pusat, propinsi maupun daerah guna mengoptimalkan koordinasi lintas sektoral dalam meningkatkan hasil kinerja program sangat dibutuhkan.	Variabel yang diteliti dan Permasalahan yang dihadapi
3.	Eni Kusumawati (2019) Tesis	Independen: *Implementasi PKH* Dependen: *Pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin* Menggunakan metode penelitian kualitatif	Program Keluarga Harapan di Desa Soko dari tahun 2013-2017 sudah terlaksana dengan baik.	Variabel yang diteliti dan Permasalahan yang dihadapi
4.	Irma Mutmainnah Khoirun Nisa (2020) Tesis	Independen: *Implementasi Program Keluarga Harapan* Dependen: *Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam* Menggunakan metode penelitian kualitatif	Program PKH tersebut masih berjalan sampai saat ini dan akan berhenti apabila program ini telah sukses.	Variabel yang diteliti dan Permasalahan yang dihadapi

IAIN PURWOKERTO

5.	Claudio Usman (2018) Tesis	Independen: *Efektifitas Program Keluarga Harapan* Dependen: *Penanggulangan Kemiskina*n Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier	Bahwa apabila program keluarga harapan dapat berjalan dengan efektif maka dapat sangat membantu dalam menanggulangi kemiskinan yang ada.	Variabel yang diteliti dan Permasalahan yang dihadapi
6.	Santoso Wibowo (2011) Tesis	Independen: *Kajian Implementasi Program Keluarga Harapan* Dependen: *Penanggulangan Kemiskina*n *Program Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngawi* Menggunakan metode penelitian kualitatif	Implementasi Program Keluarga Harapan diperlukan sinergi, sinkronisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, komitmen kelembagaan baik ditingkat pusat, propinsi maupun daerah guna mengoptimalkan koordinasi lintas sektoral dalam meningkatkan hasil kinerja program sangat dibutuhkan	Variabel yang diteliti dan Permasalahan yang dihadapi
7.	Apando Ekardo, Firdaus dan Nilda Elfemi, Jurnal Ilmu Sosial	Independen: *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)* Dependen: *Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan* Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier.	program PKH di Nagari Lagan Hilir Punggasan sudah efektif jika dilihat dari tujuan program. Serta Dana bantuan PKH bagi RTSM sudah meringankan beban pengeluaran, namun RTSM masih menganggap belum	Variabel yang diteliti dan Permasalahan yang dihadapi

IAIN PURWOKERTO

			cukup, menurut pengakuan mereka bahwa perlengkapan pendidikan anak-anak	
8.	Hajar Hari Antoro, Skripsi tidak diterbitkan	*Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya* Menggunakan metode penelitian kualitatif	Berdasarkan aspek produktivitas bahwa pelaksanaan PKH di bidang pendidikan di desa Sungai Kakap tidak produktif, karena belum mampu meningkatkan taraf pendidikan bagi penerima bantuan PKH serta belum bisa meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan dari aspek keseluruhan prestasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Bidang Pendidikan di desa Sungai Kakap tidak berprestasi	Variabel yang diteliti dan Permasalahan yang dihadapi
9.	Yohana Floridina Purba (2014)	*Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor* Menggunakan metode penelitian kualitatif	Seluruh responden terhadap alat ukur penelitian yaitu ketepatan sasaran program, kepuasan terhadap program, keberhasilan pelaksanaan program, tujuan dan manfaat,	Variabel yang diteliti dan Permasalahan yang dihadapi

IAIN PURWOKERTO

			menghasilkan jawaban efektif	
10.	S.Lindawati, Jurnal	Independen: *Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan* Dependen: *Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pendidikan Keluarga* Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier.	Salah satu strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.	Variabel yang diteliti dan Permasalahan yang dihadapi

F. Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

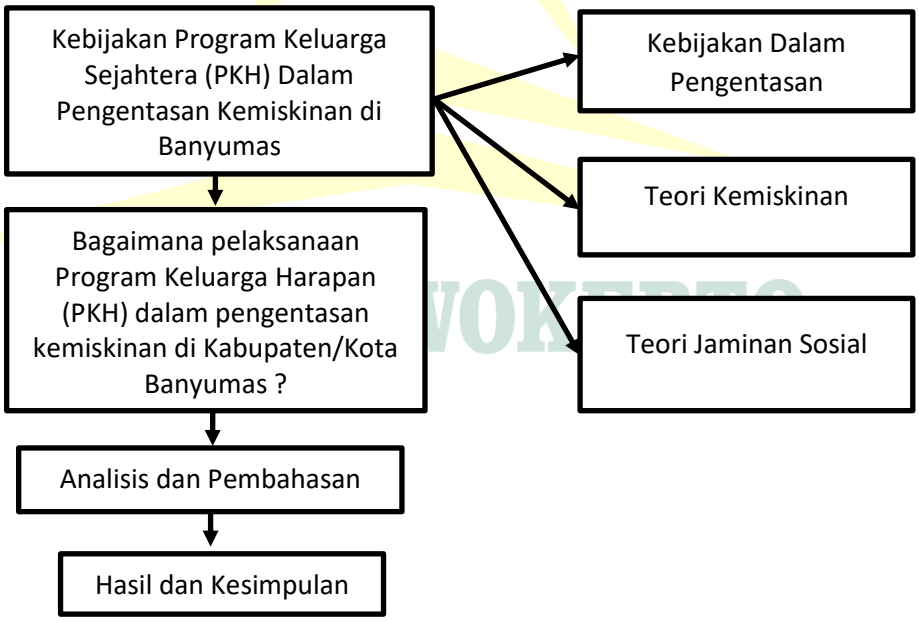

Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mengatasi masalah kemiskinan dan upaya dalam kehidupan keluarga Dibandingkan dengan program pra-kerja, PKH dapat mengurangi kemiskinan lebih jauh lagi. PKH merupakan program perlindungan dan bantuan sosial yang termasuk dalam kelompok pertama dari

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Indonesia, yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan perwujudan dasar lansia dan cacat berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian *Millennium Development Goals.*

bertujuan untuk mengubah perilaku dan kemandirian keluarga penerima dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat. Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan kurang beruntung serta meningkatkan pendapatan mereka, sehingga mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Sejak tahun 2007, "Program Keluarga Harapan" telah dilaksanakan secara nasional, namun baru dilaksanakan di Banyumas sejak tahun 2013. Ini karena kebijakan dan sistem pemerintah belum siap saat itu. Menyusul keputusan pemerintah tahun 2013, 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas mulai menjadi penerima PKH. Fokus penelitian ini lebih pada implementasi pelaksanaan PKH dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas, adanya dari beberapa hal tentang teori kemiskinan serta penyebab dari kemiskinan tersebut dan juga teori tentang jaminan sosial yang menjadi salah satu program dan wacana. Berangkat dari adanya data dan informasi yang relevan, akan dilakukan analisis dan kajian agar dapat dipahami berdasarkan fakta dan fakta sesuai dengan dilaksanakan program PKH di Kabupaten Banyumas.

IAIN PURWOKERTO

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma menentukan pandangan peneliti.[64] Sehingga paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah naturalistic paradigma atau paradigma alamiah.[65] Penelitian ini memang terjadi secara alamiah, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya.[66] Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Cik Hasan Bisri, paradigma naturalistik juga tepat digunakan sebagai model penelitian fikih.[67]

Paradigma alamiah bersumber pada pandangan fenomenologis. Fenomenologis berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak, atau senantiasa masuk ke dalam dunia konseptual para manusia pelaku yang menjadi subjek peneliti.[68] Sebab apa yang tampak di permukaan (tingkah laku) merupakan pantulan dari ide atau makna yang tersembunyi di bagian dalam, maka untuk memahaminya diperlukan penghayatan.[69]

IAIN PURWOKERTO

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan.[70] selain itu penenlitian ini juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam

---

[64]K. Denzin dan Yunonns S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (Terj) Darianto, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.123.

[65]Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), hlm.50.

[66] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm.12.

[67] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Cet 1, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.24.

[68]Saparinah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar- Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3 Malang, 1990), hlm.13.

[69]Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., hlm.50.

[70]Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*..., hlm.51.

penelitian kualitatif atau sebagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Seorang peneliti berangkat langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.[71] Penelitian lapangan (field research) dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, yang dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam mengenai suatu cara unit sosial tersebut. peneliti lapangan pada lazimnya membuat catatan lapangan secara efektif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis.[72]

Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di mana objek yang diteliti yaitu kalangan masyarakat ekonomi lemah dan beberapa tokoh masyarakat di Banyumas untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan yakni "Kebijakan Program Keluarga Sejahtera (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Banyumas ".

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung kelapangan.[73] Penelitian yang dilakukan tanpa menggunakan pengolahan data dengan angka-angka melainkan dengan hasil pengamatan peneliti terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Umar, pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diolah dalam bentuk kalkulasi angka-angka, melainkan dengan cara menyampaikan pemikiran atau wawasan peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang sedang diteliti.[74] dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena menggunakan metode kualitatif lebih mudah untuk menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda selain itu, metode ini

IAIN PURWOKERTO

[71]Conny semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: gramedia,2010), hlm. 9.

[72] Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualittaif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.22.

[73] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 3.

[74] Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 36.

menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. Penelitian yang menggunakan perspektif kualitatif lebih memusatkan diri untuk memahami persepsi individu mengenai dunia, dan berupaya mencari wawasan.[75] Dalam hal ini, akan mendapatkan data- data yang akurat dan otentik, dikarenakan peneliti langsung mewancarai dan berdialog dengan informan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi tempat atau lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan, dengan lokasi penelitian di Banyumas Jawa Tengah. Banyumas adalah kabuaten di provinsi Jawa Tengah dengan ibukota Purwokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Brebes di utara, kabupaten Purbalingga, kabupaten Banjarnegara dan kabupaten Kebumen di Timur, serta Kabupaten Cilacap di Selatan dan Barat. Dengan luas wilayah 1.329,02 $Km^{2.}$

Ada beberapa alasan peneliti memilih lokasi tersebut. Pertama, berdasarkan studi pendahuluan telah ditemukan beberapa hal yang berkaiatan dengan tingginya tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia, tetapi di Kabupaten Banyumas ini keberadaan PKH sudah mulai direalisasikan dan terbukti adanya tingkat penurunan kemiskinan yang lumayan signifikan di Banyumas sebab adanya program PKH dengan yang menjadi sasaran merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Kesejahteraan Soaial Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTKS PFM dan OTM) yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kedua, lokasi penelitian yang terjangkau bagi penenliti sehingga dapat meminimalisir pembiayaan

IAIN PURWOKERTO

[75]Judith Belib, *Melakukan Proyek Penelitian Secara Mandiri*, Cet. IV (Jakarta: PT Indeks, 2006), hlm.4.

penenlitian ini. Ketiga, beberapa pihak yang terkait seperti Kepala Dinas Kabupaten, Kordinator PKH Kabupaten, Kordinator PKH Kecamatan, Pendamping PKH, KPM PKH sangat responsive dan antusias dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

2. Waktu Penelitian

Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan pada tahun 2021 dari bulan Februari-Maret 2021. sehingga terhitung lama waktu pelaksanaan penenlitian yaitu dengan kurun waktu selama 2 Bulan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data Penelitian

Adapun dalam penelitian ini sebelumnya data dapat di klasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Pokok

1) Data mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan Meliputi:

a) Program yang dikembangkan dan direncanakan oleh Pemda Banyumas

b) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan

c) Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan

2) Data tentang Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan

3) Data tentang mengetahui Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas dan Pandangan Secara Islam Dan Konvensional Tentang Kebijakan PKH

b. Data Pengunjung

Data ini berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu meliputi:

IAIN PURWOKERTO

1) Letak geografis Kabupaten Banyumas
2) Data mengenai keadaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banyumas
3) Data persebaran penduduk Kabupaten Banyumas terutama data tentang tinkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas

2. Sumber Data Penelitian

Menurut Arikunto mengemukakan sumber data merupakan subyek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini data diperoleh dari data primer dan data sekunder, diantaranya yaitu:[76]

a. Data Primer *Natural Setting* (Kondisi Alamiah)

Sumber data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari sumber aslinya melalui informan yang dijadikan sebagai objek penelitian. Data primer dapat diperoleh melalui penelitian lapangan, prosedur, dan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder ini biasanya diperoleh di perpustakaan atau lapangan dengan melakukan penelitian terlebih dahulu. Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan melalui kajian pustaka dengan mencari sumber referensi buku di perpustakaan, dan referensi dari internet berupa jurnal penelitian.

Sedangkan adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Responden yaitu Kepala Dinas Kabupaten, Kordinator PKH Kabupaten Banyumas

IAIN PURWOKERTO

[76] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 172

b. Informan yaitu Kordinator PKH Kecamatan, Pendamping PKH, KPM PKH yang ada dilingkup Kabupaten Banyumas.

c. Dokumen yaitu berupa catatan yang memuat rekaman atau gambar keadaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak bisa mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[77] Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Observasi juga dapat diartikan dengan pengamatan dan pencatatan. Peneliti dalam melakukan observasi partipatif dalam menemukan kejadian yang ditemui, dirangkum secara mendalam, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber datanya.[78] Observasi sebagai alat pengumpul data yang dimaksud adalah dengan melakukan observasi secara sistematis bukan sekedarnya saja. Dalam observasi ini diusahakan mengamati hal yang wajar dan yang sebenarnya terjadi tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhinya, mengatur, atau memanipulasinya.

Observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan memperoleh gambaran tentang pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas

IAIN PURWOKERTO

[77] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*..... hlm. 193.
[78] Cholid Narkubo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.70.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik utama dalam metodologi penelitian kualitatif, demikian pula dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk menangkap arti secara mendasar dalam interaksi yang spesifik. Dalam teorinya Sutrisno Hadi diterangkan bahwa, metode *interview* adalah metode untuk mengumpulkan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih, hadir secara fisik dalam proses tanya jawab.[79]

Hal ini berbeda dengan pendapat menurut Sugiyono wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.[80]

Untuk memahami implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas, peneliti melakukan wawancara dengan dinas terkait antara lain Kepala bidang Dinas Sosial, Koordinator PKH Kabupaten Banyumas, Koordinator PKH Kecamatan, Koordinator PKH, PKH di KPM Kabupaten Banyumas. Setelah penulis melakukan observasi, metode wawancara ini dapat digunakan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, sehingga penulis dapat menemukan pertanyaan yang lebih mendalam dari yang diwawancarai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan informasi atau datadata melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.[81] Metode pengumpulan data dengan

IAIN PURWOKERTO

[79] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2002), hlm.136.
[80] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*..... hlm. 194.
[81] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm.100.

menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan suatu lembaga (obyek penelitian). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari sesseorang.[82]

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data. Dalam penelitian ini peneliti melengkapi penelitian dengan metode dokumenter, memperoleh dan memperkuat data tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang penulis maksud di sini adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen, arsip, jurnal, transkrip, agenda dan data lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari, menyusun dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumetasi, serta data-data yang lain secara sistematis, sehingga dapat dipahami, dimengerti, dan bermanfaat bagi orang lain.[83]

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan upaya berlanjut, berulang dan sistematis. Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat pengumpulan data dan setelah data terkumpul.[84] Dapat dipahami bahwa sejak awal data sudah mulai dianalisis, karena data akan terus bertambah dan berkembang. Jadi manakala terdapat data yang masih kurang, maka data tersebut dapat segera dilengkapi. Analisis data ini dilakukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian berupa temuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan tiga tahap analisis data, yakni penyajian data, reduksi data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

IAIN PURWOKERTO

---

[82] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*..... hlm. 82.
[83] Ahmad Tanzen, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011),hlm. 95-96
[84] Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012) hlm, 171

Adapun Secara umum, langkah-langkah dalam menganalisa data adalah sebagai berikut:

a. Penyajian data

Adapun penyajian data dimaksudkan untuk memaparkan data secara rinci dan sistematis setelah dianalisis ke dalam format yang disiapkan untuk itu. Namun data yang disajikan masih dalam bentuk data sementara untuk kepentingan peneliti dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut secara cermat, sehingga diperoleh tingkat keabsahannya. Jika ternyata data yang disajikan telah teruji kebenarannya maka akan bisa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan kesimpulan-kesimpulan sementara. Akan tetapi jika ternyata data yang disajikan belum sesuai, maka konsekuensinya belum bisa menarik kesimpulan melainkan harus dilakukan reduksi data kembali. Pada penelitian ini data yang telah teroganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sitematis dalam bentuk narasi dan tabel, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.

b. Reduksi data

adalah bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak relevan, dan mengorganisasikannya, sehingga kesimpulan akhir dapat dirumuskan, menseleksi data secara ketat, membuat ringkasan dan rangkuman inti, merupakan kegiatan-kegiatan mereduksi data. Tahap reduksi ini merupakan tahap dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.

IAIN PURWOKERTO

c. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

hal ini dimaksudkan untuk memberi arti atau memakai data yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Analisis data dilakukan setelah data terkumpul melalui siklus yang bersifat interaktif antara peneliti dan data-data yang diperoleh di lapangan.[85]

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui dua tahap, yakni (1) menyusun simpulan pertama dan (2) menarik simpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Berpedoman pada pendapat Arifin tersebut, penarikan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :[86]

a. *Pertama*, menyusun simpulan sementara. Dikatakan sementara karena selama penelitian masih berlangsung, akan diperoleh data tambahan, maka perlu dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari data-data yang ada dan melakukan diskusi dengan teman sejawa dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih tepat dan objektif. Demikian seterusnya sampai proses penelitian selesai.
b. *Kedua*, menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah penelitian secara konseptual.

IAIN PURWOKERTO

Dalam penelitian ini penulis mencari makna data yang tergali dan terkumpul, kemudian membentuk tema, pola, persamaan, hubungan, hal-hal yang sering muncul dan sejenisnya dari data yang diperoleh mengenai, Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Penulis akan mencoba megambil kesimpulan yang diperoleh dituangkan dalam

[85]Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.69.
[86] Zainal Arifin, *Penelitian* ……171

bentuk laporan penelitian yang mencakup dalam dokumen, wawancara, dan observasi.

F. Pemeriksaan Kebasahan Data

Pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data, dalam teorinya Sugiyono menambahkan bahwa penelitian dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.35 Dalam teorinya Moleong juga menyebutkan bahwa ada empat kriteria yaitu: *pertama* kredibilitas (*validitas internal*), *kedua* transferabilitas (*validitas eksternal*), *ketiga* dependabilitas (*reliabilitas*), dan *keempat* konfirmabilitas (*objektivitas*).[87]

a. Kredibilitas

Dalam penelitian ini dipenuhi dengan melalui beberapa kegiatan, pertama, aktivitas yang dilakukan untuk membuat temuan dan interpretasi yang akan dihasilkan lebih terpercaya. Kedua melakukan pengamatan secara terus menerus; disini peneliti mengadakan observasi terus menenerus sehingga memahami gejala dengan lebih mendalam, sehingga mengetahui aspek yang penting, terfokus dan relevan dengan topic penelitian.

b. Transferabilitas

Adalah berfungsi untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara “uraian rinci” untuk menjawab persoalan sampai sejauh mana hasil penelitian dapat “ditransfer” melalui beberapa konteks lain. Dengan teknik ini peneliti akan melaporkan penelitian dengan rinci dan secermat mungkin, dalam menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan dengan mengacu pada fokus penelitian.

c. Dependabilitas

IAIN PURWOKERTO

[87] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*..., hlm.32.

Adalah kriteria menilai apakah proses penelitian bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertahankan dengan audit dependabilitas oleh auditor independen guna mengkaji kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini yang menjadi auditor independen adalah pembimbing yang secara langsung terlibat dalam penelitian ini.

d. Konfirmabilitas

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data, informasi dan interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit (audit trail). Dengan demikian pendekatan konfirmabilitas lebih menekankan pada karakteristik data yang menyangkut kegiatan para pengelolanya untuk mewujudkan konsep tersebut. Upaya ini berujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa data yang diperoleh itu benar-benar obyektif, bermakna, dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

a. Kondisi Umum Derah Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas terletak di sebelah barat Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 132.759 ha. Secara administratif Kabupaten Banyumas meliputi 27 Kecamatan dengan 301 desa dan 30 kelurahan. Wilayah Kabupaten Banyumas dibatasi oleh:[88]

a. Sebelah Utara :Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap

c. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes

d. Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

Gambar 4.1 **Peta Wilayah Kabupaten Banyumas**

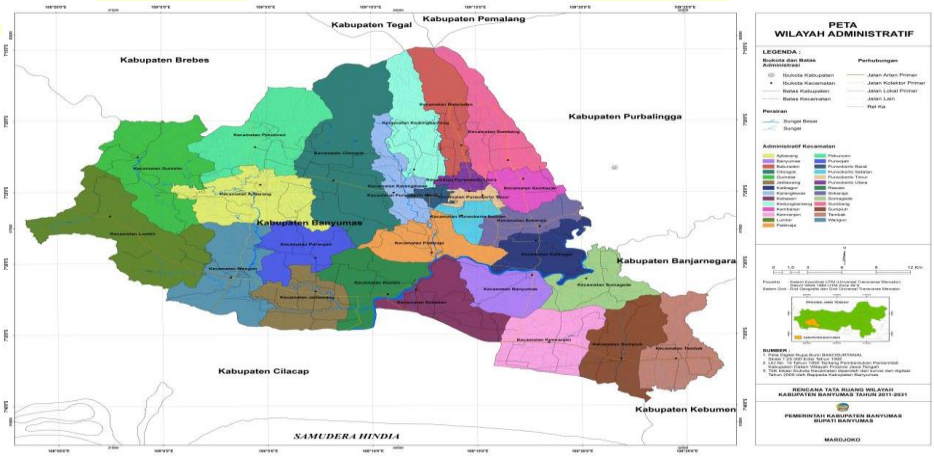

[88] Dokumen Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Bab II

b. Kondisi Geografis Kabupaten Banyumas

Secara geografis wilayah Kabupaten Banyumas terletak di antara 108^{0}39'17"BT – 109^{0}27'15"BT dan di antara 7^{0}15'05"LS – 7^{0}37'10"LS. Wilayah Kabupaten Banyumas terletak pada posisi strategis, yaitu pada persimpangan perhubungan lintas daerah dari Jawa Barat pada lintas Selatan menuju Yogyakarta, Cilacap dan daerah Pegunungan Dieng atau sebaliknya, serta dari Jawa Barat lintas Utara melalui Kabupaten Tegal menuju Cilacap, daerah Pegunungan Dieng dan Yogyakarta atau sebaliknya.[89]

a. Topografi

Kondisi topografi di wilayah Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan kondisi ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Berdasarkan ketinggian tanahnya wilayah Kabupaten Banyumas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dataran dengan ketinggian > 0 – 250 meter di atas permukaan laut (dpl) seluas kurang lebih 95.335,47 ha atau 71,81% dari luas wilayah, meliputi perkotaan Purwokerto, Kecamatan Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, sebagian Kecamatan Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Banyumas, Kebasen, Patikraja, Rawalo, Purwojati, Jatilawang, Wangon, Ajibarang, Lumbir, Gumelar, sebagian Pekuncen, sebagian Cilongok, sebagian Karanglewas, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Baturraden, dan sebagian Kecamatan Sumbang.
2) Dataran dengan ketinggian >250 - 500 meter dpl seluas kurang lebih 19.918,27 ha atau 15,00% dari luas wilayah, meliputi sebagian Kecamatan Cilongok, sebagian Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Baturaden, sebagian

[89] Dokumen Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Bab II

IAIN PURWOKERTO

Kecamatan Sumbang, sebagian Kecamatan Gumelar, sebagian kecil Kecamatan Lumbir, sebagian kecil Kecamatan Wangon, sebagian kecil Kecamatan Ajibarang, sebagian kecil Kecamatan Purwojati, sebagian kecil Kecamatan Jatilawang, sebagian kecil Kecamatan Kebasen, sebagian kecil Kecamatan Banyumas, sebagian kecil Kecamatan Kemranjen, sebagian Kecamatan Somagede, sebagian Kecamatan Sumpiuh, dan sebagian Kecamatan Tambak.

3) Dataran dengan ketinggian >500 – 1500 meter dpl seluas kurang lebih 13.511,18 ha atau 10,18% dari luas wilayah, meliputi sebagian wilayah cilongok, sebagian kecamatan karanglewas, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Baturaden, sebagian Kecamatan Sumbang, sebagian kecil Kecamatan Somagede, sebagian kecil Kecamatan Sumpiuh, dan sebagian kecil Kecamatan Tambak. Dataran dengan ketinggian >1500 – 2500 meter dpl seluas kurang lebih 3.578,76 ha atau 2,70% dari luas wilayah, meliputi sebagian kecil Kecamatan Cilongok, sebagian Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Baturaden, dan sebagian Kecamatan Sumbang.

4) Dataran dengan ketinggian >2500 – 3500 meter dpl seluas kurang lebih 411,93 ha atau 0,31% dari luas wilayah, meliputi sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Baturraden, dan sebagian Kecamatan Sumbang.[90]

5) Dataran dengan ketinggian >3000 – 3900 meter dpl seluas kurang lebih 3,39 ha atau 0,003% dari luas wilayah, meliputi puncak Gunung Slamet yang ada di Kecamatan Baturraden dan Sumbang.

IAIN PURWOKERTO

[90] Dokumen Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Bab II

Sedangkan berdasarkan kemiringan tanahnya wilayah Kabupaten Banyumas diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Kemiringan 0° – 2° meliputi areal seluas kurang lebih 43.876,9 ha atau 33,05 % dari luas wilayah, meliputi wilayah bagian tengah dan selatan
2) Kemiringan 2° – 15° meliputi areal seluas kurang lebih 21.294,5 ha atau 16,04 % dari luas wilayah, meliputi sekitar Gunung Slamet.
3) Kemiringan 15° – 40° meliputi areal seluas kurang lebih 35.141,3 ha atau 26,47 % dari luas wilayah, meliputi daerah lereng Gunung Slamet.
4) Kemiringan > 40° meliputi areal seluas kurang lebih 32.446,3 ha atau 24,44 % dari luas wilayah, meliputi daerah lereng Gunung Slamet.

b. Geologi

Kabupaten Banyumas secara fisiografi terletak pada zona pegunungan Serayu Utara, Zona Serayu dan Pegunungan Serayu Selatan. Zona pegunungan Serayu Utara sebagian besar tertutup oleh produk endapan Gunung Slamet sedangkan Pegunungan Serayu Selatan ditempati oleh pegunungan lipatan yang memanjang dari Barat Laut–Tenggara mulai dari Kecamatan Lumbir hingga pegunungan di sekitar Kebasen dan pegunungan di sebelah selatan Banyumas. Antara pegunungan Serayu Utara dengan pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh zona depresi longitudinal memanjang dari Barat Timur yang disebut zona Serayu. Zona Serayu Selatan pada umumnya ditempati batuan hasil endapan turbidit laut dalam, sedangkan zona Serayu ditempati oleh endapan aluvium gunung api.[91]

IAIN PURWOKERTO

[91] Dokumen Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Bab II

Secara stratigrafi, Kabupaten Banyumas terdiri atas formasi 1) Endapan Aluvial/Aluvium, 2) Endapan Gunung Api, 3) Formasi Tapak, 4) Formasi Kumbang, 5) Formasi Halang, 6) Anggota Batugamping Formasi Halang, 7). Anggota Breksi Formasi Halang, dan 8) Formasi Rambatan.[92]

Endapan aluvial atau aluvium menempati porsi yang cukup besar di wilayah Kabupaten Banyumas. Penyebarannya di bagian Selatan wilayah Kabupaten Banyumas, yaitu di Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Rawalo, Jatilawang dan Wangon. Kawasan endapan aluvium ini merupakan kawasan yang subur.

Kondisi geologi Kabupaten Banyumas juga menyimpan potensi bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Bahan galian yang ada di Kabupaten Banyumas tersebar merata hampir di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas.

c. Hidrologi

Kondisi hidrologi menggambarkan potensi sumber daya air yang meliputi distribusi, pergerakan dan kualitas sumber daya air. Kondisi hidrologi dipengaruhi oleh struktur tanah, topografi, geologi, geomorfologi dan curah hujan. Sumberdaya air di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi curah hujan, air permukaan (sungai dan mata air) dan air tanah. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai debit (Q) sebesar 45.456.342 m3/hari atau 16.591.564.830 m3/tahun yang berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayu, Sungai Tajum, Sungai Kranji, Sungai Pelus, Sungai Banjaran, Sungai Logawa serta sungai-sungai kecil lainnya.[93]

IAIN PURWOKERTO

[92] Dokumen Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Bab II

[93] Dokumen Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Bab II

Kondisi hidrologi menyediakan potensi sumber daya air yang diperlukan oleh berbagai kegiatan budidaya manusia. Air tanah yang telah termanfaatkan di wilayah Kabupaten Banyumas berasal dari Cekungan Air Tanah Purwokerto–Purbalingga dengan jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 503.000.000 m3/tahun dan jumlah aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 10.000.000 m3/tahun; Cekungan Air Tanah Kroya jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 65.000.000 m3/tahun dan Cekungan Air Tanah Cilacap dengan jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 43.000.000 m3/tahun.

Kabupaten Banyumas termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimeneng, Serayu, Ijo, dan Tipar. Keempat DAS ini mencakup beberapa sungai dan anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Sungai-sungai tersebut merupakan sumber daya pertanian, sumber air baku untuk air minum, dan sumber energi terbarukan. Namun demikian potensi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Banyumas tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Banyumas tidak memiliki potensi air permukaan sedangkan potensi air tanah sulit untuk diperoleh seperti terdapat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Cilongok. Beberapa desa di wilayah Kabupaten Banyumas juga tidak berada pada cekungan air tanah dan memiliki kualitas air tanah yang kurang baik.

IAIN PURWOKERTO

d. Klimatologi

Kondisi klimatologi wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai iklim tropis basah dengan rata-rata suhu udara bulanan 26,3°C, dengan suhu minimum tercatat 24,4°C dan suhu maksimum 30,9°C. Sedangkan curah hujan di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 rata-rata sebesar 4.601 mm/tahun. Angka ini menunjukkan bahwa curah hujan di Kabupaten Banyumas cukup

tinggi, hal tersebut didukung oleh kondisi geografis wilayah yang terletak di lereng Gunung Slamet.[94]

Beberapa daerah yang mempunyai curah hujan tinggi adalah Kecamatan Baturraden dengan stasiun penakar hujan di Bendung Ketenger Baturraden yaitu 8.134 mm/tahun, Stasiun hujan Rempoah Baturraden 5.835 mm/tahun, Stasiun Bendung Sumbang, Banjarsari Kulon Sumbang 5.746 mm/tahun. Adapun curah hujan minimum 3.189 mm/tahun di Stasiun Bendung Tajum, Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang

Daerah yang mempunyai hari hujan terbanyak adalah Kecamatan Baturraden dengan stasiun penakar hujan di Bendung Ketenger Baturraden yaitu 307 hari hujan/tahun, Stasiun hujan Rempoah Baturraden 245 hari hujan/tahun, Stasiun Bendung Kedung Kancil, Bogangin, Sumpiuh 225 hari hujan/tahun. Adapun hari hujan minimum 172 hari hujan/tahun di Stasiun UPT Banyumas, Sudagaran, Banyumas. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08 % dibanding dari luas wilayah Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah sekitar 32.528 Ha atau 24,50 %, lahan pertanian bukan sawah seluas 69.026 Ha atau 51,99 % dan lahan bukan pertanian seluas 31.204 Ha atau 23,50 %. Berikut luas wilayah Kabupaten Banyumas menurut penggunaannya dapat dilihat pada table Luas Wilayah Kabupaten Banyumas Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2013 – 2017

IAIN PURWOKERTO

[94] Dokumen Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Bab II

Tabel 4.1 **Pengguna Lahan Kabupaten Banyumas**

No	Luas Penggunaan Lahan (Ha)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Lahan Pertanian	93.864	93.845	85.187	101.554	NA
	a. Lahan Sawah	32.266	32.255	32.600	32.528	NA
	b. Lahan Pertanian Bukan Sawah	61.598	61.590	52.587	69.026	NA
2.	Lahan Bukan Pertanian	38.395	38.914	47.572	31.205	NA
		132.759	132.759	132.759	132.759	NA

e. Demografi

Total jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2017 sebesar 2.040.878 jiwa yang terdiri dari 1.029.453 laki-laki dan 1.011.425 perempuan. Sebaran penduduk di Kabupaten Banyumas masih belum merata, hal ini dapat diketahui dari jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Cilongok sebanyak 138,978 jiwa, terdiri dari 70.353 laki-laki dan 68.625 perempuan, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Purwojati sebanyak 43,515 jiwa, terdiri dari 22.012 laki-laki dan 21.503 perempuan.[95]

IAIN PURWOKERTO

Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas 1.327,59 kilometer persegi yang didiami oleh 2.040.878 jiwa, maka rata – rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 adalah sebanyak 1.522,24 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Purwokerto Barat yaitu sebanyak 8.075,92 jiwa/km, dan terendah terdapat di Kecamatan Lumbir yakni sebanyak 575.01 jiwa/km2.[96]

[95] Dokumen Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Bab II

[96] Dokumen Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2018 *Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun* 2018 Bab II

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Banyumas 2017

No.	Kecamatan	Luas wilayah (km²)	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk (jiwa/km²)
1.	Lumbir	102,66	59,031	575.01
2.	Wangon	60,78	99,430	1,635.90
3.	Jatilawang	48,16	85,829	1,782.16
4.	Rawalo	49,64	64,343	1,296.19
5.	Kebasen	54,00	78,059	1,446,00
6.	Kemranjen	60,71	85,808	1,413.41
7.	Sumpluh	60,01	69,157	1,152.42
8.	Tambak	52,03	58,853	1,131.14
9.	Somagede	40,11	43,560	1,086.01
10.	Kalibagor	35,73	63,270	1,770.78
11.	Banyumas	38,09	61,202	1,606.77
12.	Patikraja	43,23	67,078	1,551.65
13.	Purwojati	37,86	43,515	1,149.37
14.	Ajibarang	66,5	116,171	1,746.93
15.	Gumelar	93,95	62,155	661.58
16.	Pekuncen	92,7	88,104	950.42
17.	Cilongok	105,34	138,978	1,319.33
18.	Karanglewas	32,5	72,348	2,226.09
19.	Kedungbanteng	60,22	100,841	1,674.54
20.	Baturaden	45,53	90,339	1,984.16
21.	Sumbang	53,42	102,046	1,910.26
22.	Kembaran	25,92	59,527	2,296.57
23.	Sokaraja	29,92	67,271	2,248.36
24.	Purwokerto Selatan	13,75	84,765	6,164.73
25.	Purwokerto Barat	7,4	59,747	8,073.92
26.	Purwokerto Timur	8,42	65,799	7,814.61
27.	Purwokerto Utara	9,01	53,652	5,954.72
	Jumlah Total	1.327,59	2,040,878	1,522.24

Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan yang berbeda mencerminkan adanya perbedaan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan penduduk. Pada wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi akan membutuhkan infrastruktur l e b i h banyak dibanding wilayah yang kepadatannya rendah. Demikian juga akan berpengaruh terhadap perubahan tata guna lahan,

IAIN PURWOKERTO

dengan konsekuensi pengurangan intensitas dan densitas flora dan fauna. Permasalahan kependudukan yang banyak dihadapi adalah pada wilayah perkotaan.[97]

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan yang diukur dengan pengeluaran (GNP). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang meliputi tidak hanya kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama di setiap daerah, termasuk di Banyumas.

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya.

Selama periode 2017-2019, penduduk miskin di Banyumas menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun pada tahun 2020, penduduk miskin di Banyumas mengalami peningkatan. Hal ini dapat disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berakibat banyak penduduk bekerja yang kehilangan pekerjaannya karena perusahaan tempat bekerja mengalami kebangkrutan sehingga harus mengurangi jumlah pegawai atau bahkan menutup sementara perusahaan selama pandemic Covid-19.

Peningkatan angka kemiskinan terjadi di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah baik pusat maupun daerah. Upaya cepat tanggap dalam rangka membantu masyarakat

IAIN PURWOKERTO

[97] Dokumen Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2018 *Tentang*.....

terdampak Covid-19 telah dilakukan pemerintah yakni dengan memberikan bantuan pangan.

Garis kemiskinan digunakan sebagai ambang batas untuk mengklasifikasikan orang miskin dan tidak miskin. Orang miskin adalah orang yang rata-rata pengeluaran bulanannya di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Banyumas meningkat secara bertahap dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Banyumas sebesar Rp. 366.442 kemudian meningkat menjadi Rp 406.250 pada tahun 2020. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran ratarata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Banyumas selama periode 2017 hingga 2020 cukup menggembirakan. Selama empat tahun terakhir, tingkat kedalaman kemiskinan mengalami penurunan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin besar ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tak berbeda jauh dengan P1, P2 juga mengalami penurunan. Indeks keparahan kemiskinan tahun 2020 sebesar 0,50 atau turun 0,16 poin dari tahun 2019.

IAIN PURWOKERTO

Meski beberapa indikator kemiskinan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun upaya prioritas penanggulangan kemiskinan di perdesaan tetap diperlukan untuk membebaskan masyarakat dalam kondisi miskin yang "terlalu dalam dan terlalu parah". Selain indikator garis kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik rumahtangga miskin dapat dilihat pada kondisi demografi, pendidikan dan pekerjaan kepala rumah tangga. dan kondisi kehidupan. Pemahaman tentang karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar untuk

merumuskan strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan tujuan mereka.

Peningkatan tingkat pendidikan berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin ideal kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang meningkat, yang pada akhirnya mengurangi kemungkinan berada dalam kondisi yang buruk. Dalam penanggulangan kemiskinan, tidak hanya pendidikan kepala rumah tangga tetapi juga pola asuh anak-anak rumah tangga miskin harus diperhatikan. Kemampuan untuk keluar dari kemiskinan di masa depan memegang peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin ideal kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan berpenghasilan tinggi meningkat, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan Anda akan berada dalam kondisi yang buruk. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan adalah pendidikan kepala rumah tangga, yaitu pendidikan anak-anak dari rumah tangga miskin. Kemiskinan di masa depan.

Menurunnya persentase penduduk miskin di Jawa Tengah, antara lain dipengaruhi oleh membaiknya karakteristik pendidikan penduduk miskin itu sendiri. Persentase penduduk miskin yang tidak tamat SD cenderung menurun dari sebesar 35,47 persen pada tahun 2015 menjadi 31,82 persen pada tahun 2018. Sementara untuk penduduk miskin yang tamat SD/SLTP dan juga tamat SLTA ke atas selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat menjadi 56,22 persen dan 11,97 persen pada tahun 2018. Dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan penduduk miskin, diharapkan dapat menjadi modal yang kuat di masa depan untuk penanggulangan kemiskinan.

Persentase Angka Melek Huruf (AMH) penduduk miskin untuk usia 15-24 tahun stabil angkanya mencapai 100 persen selama tahun 2016-2019. Artinya penduduk miskin pada usia muda-remaja (15-24 tahun) semua sudah bisa membaca dan menulis. Sementara untuk kelompok usia 15-55

IAIN PURWOKERTO

tahun, persentase AMH lebih rendah dibandingkan kelompok usia muda-remaja namun capaiannya relatif stabil. Pada tahun 2016 tercatat 96,97 persen pada tahun 2015, empat tahun kemudian menjadi 96,89 persen pada tahun 2019. Besaran angka tersebut menunjukkan masih ada sekitar 3 persen pada kelompok usia 15-55 tahun yang tidak dapat membaca dan menulis.

Indikator kedua pasca pendidikan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik rumah tangga miskin adalah Pekerjaan. Kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sembako dan nonpangan yang diukur dengan biaya tercermin dari karakteristik pekerjaan rumah itu sendiri. Menurunnya jumlah maupun persentase penduduk miskin selama tahun 2017 hingga 2019 berlawanan arah dengan karakteristik ketenagakerjaan penduduk miskin itu sendiri. Penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja meningkat dari 58,64 persen pada tahun 2017 menjadi 61,64 persen pada tahun 2018, tetapi pada tahun 2019 menurun menjadi 59,06. Meskipun persentase penduduk miskin yang bekerja cenderung menurun namun secara keselurahan persentase penduduk miskin juga menurun, hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas penduduk miskin makin meningkat atau rata-rata anggota rumah tangga penduduk miskin semakin kecil.

IAIN PURWOKERTO

Jika diamati penduduk miskin yang bekerja menurut lapangan pekerjaan terlihat persentase penduduk miskin di Sektor Pertanian semakin menurun sebaliknya yang bekerja di luar Sektor pertanian semakin meningkat. Realita ini menunjukkan dua kemungkinan, penduduk miskin bekerja yang mampu keluar dari garis kemiskinan lebih banyak dari sektor pertanian atau beralihnya pekerjaan penduduk miskin dari pertanian ke non pertanian makin besar.[98]

[98] BPS Kabupaten Banyumas, 2020. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas 2020*. Banyumas

3. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pernerintahan bidang sosial, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang merupakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.[99]

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud adalah mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan urusan Pemerintahanbidang sosial, pernberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.
2) Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala daerah.
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dan urusan Permerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;

IAIN PURWOKERTO

[99] Peraturan Bupati Banyumas No 67 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas

4) pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan pernerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang Kepala daerah.
5) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :[100]

1) Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
2) Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
3) Pengkoordinasian kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
4) Pengkoordinasian, permbinaan dan penataan orgamsasi dan tata laksana bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
6) Pelaksanaan kebijakan kegiatan kegiatan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ;
7) Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan

IAIN PURWOKERTO

[100] Peraturan Bupati Banyumas No 67 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas

9) Pelaksanaan fungsi ked inasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.[101]

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai berikut:[102]

a. Kepala Dinas : Ir. Widarsono. MM
b. Sekretaris : Pardiyono, SH
c. Kasubag Perencanaan : Toipah, S.E
d. Kasubag Keuangan : Dwi Satya Wardini, S.E
e. Kasubag Umum dan Kepegawaian : Setyowati, S.E
f. Kabid Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial : Budi Suharyanto, SH
g. Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin : Lili Mudjianto, S.Sos
h. Kabid Pemberdayaan Ekonomi Desa SDA dan TTG : Dra. Siti Zaefatun
i. Kabid Permerdayaan Masyarakat Desa : Drs. Agus Eko Budianto
j. Kabid Bina Pemerintah Desa : Drs. Sutiarto, M.Si
k. Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial : Drs. Mey Dwikoranto
l. Kasi Rehabilitasi Sosial : Nur Indra Pratiwi, S.E
m. Kasi Pemberdayaan Sosial : Sri Mulyani, S.Sos
n. Kasi Penanganan Fakir Miskin : Dewi Kusmayanti S.H

IAIN PURWOKERTO

[101] Peraturan Bupati Banyumas No 67 Tahun 2018 *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa* Kabupaten Banyumas

[102] Dokumen Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas 2021

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan

1) Kebijakan Publik Pengentasan Kemiskinan Nasional

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Timbul pertanyaan sejauh mana pentingnya Kebijakan publik sebagai bagian dari negara Teori Karl Popper menjelaskan bahwa kebijakan publik dirumuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik seperti kemiskinan, pengangguran, konflik sosial dan masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Teori politik yang dikemukakan oleh Karl Popper sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan publi. Penerapan arahan tersebut dapat mengukur keberhasilan arahan publik yang diadopsi.Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat. Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Berkaitan dengan badan-badan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan.[103]

Pemerintah dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia dan menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas

IAIN PURWOKERTO

[103] Eky Riswiana, *Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Keluarga Miskin Di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus Di Kecamatan Wonopringgo)*. Tesis, 2020. hlm, 64

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 dan dijabarkan lebih detail setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan dijadikan acuan bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan tahunan[104]. Arah kebijakan dan strategi dirumuskan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan mendesak yang akan segera dilaksanakan pada periode 2020-2024 dan akan berdampak besar pada pencapaian tujuan nasional dan sasaran strategis Kementerian sosial periode tersebut. Orientasi dan strategi kebijakan nasional tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, arah dan strategi kebijakan tersebut dijabarkan dalam Renstra Kemensos 2020-2024. Mereka dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, arah kebijakan dan strategi nasional yang menjadi tugas RPJMN 2020-2024, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial. Untuk mempertajam arah kebijakan dan strategi, Kementerian Sosial membutuhkan regulasi yang efektif dan dapat ditegakkan untuk mencapai tujuan strategis tersebut, yang pada akhirnya akan mencapai tujuan nasional. Pedoman dan / atau persyaratan regulasi Regulasi berupa rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan rancangan peraturan Kementerian Sosial dijabarkan dalam kerangka peraturan Kementerian Sosial tahun 2020-2024.. [105]

Pelaksanaan kebijakan dijabarkan menurut program beserta Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) di lingkungan Kementerian Sosial. IKP ini hanya dinyatakan sebagai ukuran, bukan angka capaian atau angka target pada tahun

IAIN PURWOKERTO

104 Dokumen Rencana Strategis Kementrian Sosial 2020-2025 BAB 3 hlm 65
[105] Dokumen Rencana Strategis … hlm 65

tertentu. Pertama Program Dukungan Manajemen . Program ini bertujuan untuk: [106]

a) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dapat diakses, dan responsif
b) Mewujudkan reformasi birokrasi berbasis transformasi digital berbiaya rendah dan murah serta dapat diakses.
c) Meningkatkan keterikatan dan keterlibatan (engagement) masyarakat melalui media sosial sebagai salah satu instrumen untuk edukasi dan mainstreaming isu.
d) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kesejahteraan sosial serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.
e) Meningkatkan efektivitas birokrasi serta tata kelola Kementerian Sosial yang bersih dan terpercaya.
f) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas teknis lainnya.
g) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial.
h) Menyempurnakan kurikulum dan sistem pelatihan kesejahteraan sosial.
i) Menyediakan informasi untuk perumusan kebijakan teknis berskala nasional bidang kesejahteraan sosial.
j) Menyediakan informasi hasil penilaian SDM kesejahteraan sosial dengan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penelitian, dan pengembangan sistem dan metodologi penilaian.
k) Memfasilitasi penyusunan standar mutu akreditasi serta sertifikasi; dan 107

IAIN PURWOKERTO

[106] Dokumen Rencana Strategis … hlm 108

[107] Dokumen Rencana Strategis … hlm 108

l) Mengintegrasikan modul pelayanan standar di lingkungan Kementerian Sosial berbasis data.

Program Kedua yaitu Program Perlindungan Sosial Program ini bertujuan untuk:[108]

m) Memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan;
n) Memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok PPKS diantaranya yaitu penyandang disabilitas, lansia, anak, tuna sosial, korban penyalahgunaan napza, dan penyandang HIV/AIDS;
o) Memberikan pemberdayaan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan
p) Memberikan penanganan bagi fakir miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah kegiatan atau rencana tertentu yang pedomannya merupakan proses merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi langkah-langkah yang berkesinambungan dan saling terkait dan dilaksanakan. digunakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai masalah, urusan, dan sumber daya yang ada untuk Kebijakan publik. Sebagaimana dikemukakan Handoyo: kebijakan rangkaian konsep atau program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi upaya pencapaian tujuan atau pencapaian tujuan dan sasaran.[109]

IAIN PURWOKERTO

[108] Dokumen Rencana Strategis … hlm 111
[109] Eko Handoyo…….hlm, 111

Perincian Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Program Perlindungan Sosial adalah sebagai berikut:[110]

a) Sasaran Program Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan dengan Indikator Kinerja Program : Persentase (%) KPM yang meningkat kepemilikan aset produktifnya dan Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar.
b) Sasaran Program : Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesos dengan Indikator Kinerja Program : Indeks Partisipasi Sosial.
c) Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan layanan terpadu penanggulangan kemiksinan dengan Indikator Kinerja Program : Persentae (%) daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan.
d) Sasaran Program : Meningkatnya keberfungsian sosial penduudk miksin dan rentan dengan Indikator Kinerja Program : Indeks Keberfungsian Sosial.
e) Sasaran Program : Meningkatnya kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui perlindungan social adaptif dengan Indikator Kinerja Program : Persentase (%) KPM PKH yang mengalami perubahan perilaku (dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) dan Persentase (%) KPM PKH yang graduasi.[111]
f) Sasaran Program : Meningkatnya produktivitas sosial ekonomi serta kemampuan keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan Indikator Kinerja Program : Persentase (%) korban bencana alam yang meningkat kemampuan bertahan

IAIN PURWOKERTO

[110] Eko Handoyo…….hlm, 111
[111] Eko Handoyo…….hlm, 112

hidupnya, Persentase (%) korban bencana sosial yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya,Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluarannya dan Persentase (%) keluarga miskin yang meningkat produktivitas sosial ekonominya.

g) Sasaran Program : Meningkatnya kualitas dan layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta terciptanya sistem informasi layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang handal dengan Indikator Kinerja Program : Persentase (%) Daerah yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS, Persentase (%) individu di DTKS yang teridentifikasi pada data adminduk, Persentase (%) ketepatan sasaran penerima program dan Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan DTKS dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiksinan.

h) Sasaran Program : Meningkatnya kapasitas SDM dan kualitas lembaga di bidang kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan Indikator Kinerja Program :Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikat kediklatan dan profesi, Persentase (%) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang terstandar kesejahteraan Persentase (%) desa/kelurahan/nama lain yang telah membentuk masyarakat berketahanan social, Persentase masyarakat/non-ASN yang mengikuti diklat kesejahteraan social, Persentase SDM kesejahteraan sosial yang tersertifikasi,Persentase lembaga penyelenggara diklat kesejahteraan sosial terakreditasi, Persentase LKS yang

IAIN PURWOKERTO

terakreditasi dan Persentase desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan social.112

Perlu adanya rencana strategis dalam penangan kemiskinan bukan dalam pandangan normal tetapi penangan kemiskinan dalam kejadian luar biasa seperti Pandemi Virus dan keadaan darurat seperti perang atau konflik untuk lebih mengantisipasi dan mempersiapkan hal yang dapat membuat orang mati karena kemiskinan, orang jatuh miskin karena daruratnya situasi.

2) Kebijakan Pemda Banyumas Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya menekan angka kemiskinan. Tahun 2019 ini mereka berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 1 persen. Badan Pusat Statistik Banyumas pada tahun 2019 telah merilis angka kemiskinan sebesar 12,53 persen. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2018 lalu sebesar 13,5 persen.

"Ada beberapa program dalam pengentasan kemiskinan, program tersebut berbasis dengan data serta terfokus untuk menekan kemiskinan. Program pertumbuhan yang berkaitan dengan investasi maupun peningkatan perekonian serta pemerataan. Misal bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Jambanisasi, Bantuan Sosial Pangan arau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) serta Kartu Banyumas Sehat harus sampai kepada warga yang membutuhkan, Satu SKPD Satu Desa Binaan dan Bantuan Sosial Tunai(BST)".[113]

Dalam upaya menekan angka kemiskinan di Banyumas. salah satu program lainya yaitu program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Banyumas melakukan pembinaan terhadap satu

[112] Eko Handoyo…….hlm, 113

[113] Wawancara Kepala Bidang Kejahteraan Sosial, Penanganan fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas, Lili Mudjianto tanggal 22 Februari 2021 jam 09:30

desa miskin sampai memiliki kehidupan yang layak. Program 1 SKPD 1 Desa Miskin Binaan tersebut akan dimonitor keberhasilannya dengan melihat ada tidaknya peningkatan kesejahteraan di desa setempat. program ini adalah program gagasan dari Gubernur Ganjar Pranowo, bahwa tujuan akhir dari program ini adalah pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan mulai bangkit. Sedangkan bagi SKPD, akan melatih kepemimpinan, sehingga muncul tokoh inspiratif dan mendekatkan dengan masyarakat. sistem kerjanya yaitu Pendampingan memberikan motivasi atau pelatihan agar orang miskin memiliki niat untuk lepas dari jerat kemiskinan.

> "Jembatan Kali Sarangan merupakan salah satu hasil dari program satu SKPD satu desa binaan yang dicanangkan Pemprov Jateng. Pembangunan jembatan Kali Sarangan itu merupakan andil dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jateng yang menjadi pembina Desa Karangsalam."[114]

Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan salah satu program yang dlaksanakan pemerintah. Dengan begitu masyarakat tidak mampu atau berpengahsilan rendah dapat menempati rumah yang layak huni. Sesuai Komitmen Bupati Banyumas, Pemkab Banyumas akan terus berupaya melaksanakan program rehab RTLH, karena jumlah RTLH di Banyumas masih cukup banyak.

Warno Sebagai Kordinator PKH kabupaten Banyumas dalam wawancaranya "Memang tidak bisa tertangani sekaligus, jadi ada tahapan, proses, prosedur, dan prioritas untuk menentukan

[114] Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00

sasaran” .[115] Lili Mudjianto selaku Kepala Bidang Penangan Fakir Miskin Dinas sosial menjelaskan,

> “Upaya yang telah dilakukan antara lain program BSPS (Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya) yang tahun ini memiliki kurang lebih 1.230 unit rumah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) perumahan dengan alokasi 195 Unit Perumahan dan Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeuprov).) untuk 156 desa, dengan tiga unit untuk tiap desa, artinya ada 496 unit. Selain dana negara, kami juga mencari dana dari CSR misalnya dari Basnas, Lazisnu, Lazismu, REI, serta dari perbankan”.[116]

Perlu diketahui ada Penyaluran tiga jenis bantuan sosial (bansos) pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas, pada tahun 2021 ini tidak berubah.

> “Tahun 2021 ini, tiga jenis bansos tetap sama seperti tahun lalu modelnya. Dua melalui penciaran tunai, satu berbentuk sembako.” [117]

Kata Kepala Bidang Kejahteraan Sosial, Penanganan fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas, Lili Mudjianto, Dijelaskan,

> ”program keluarga harapan (PKH), disalurkan tunai melalui kartu kesejahteraan sosial (KKS). Kemudian bantuan sosial tunai (BST) disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia dan sejumlah bank pemerintah. Sedangkan penyaluran bansos sembako BPNT, juga ditransfer tunai ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, saat membelanjakan sembako, KKS dapat digesek melalui *e*-warung (agen) Untuk penyaluran paling awal, yang PKH kita

---

[115] Wawancara Kepala Bidang Kejahteraan Sosial, Penanganan fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas, Lili Mudjianto tanggal 22 Februari 2021 jam 09:30

[116] Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00

[117] Wawancara Kepala Bidang Kejahteraan Sosial, Penanganan fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas, Lili Mudjianto tanggal 22 Februari 2021 jam 09:30

sudah melaksanakanya. Untuk sembako setiap bulan pertengan bulan. Sedangkan BST dimulai tanggal 9 Januari sampai april."[118]

BST sendiri merupakan Bantuan sosial untuk memulihkan ekonomi masyarakat dikala pandemic Corona Pencairan BST ini disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia, diteruskan ke desa masing-masing, sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Namun dari jumlah tersebut, ada yang langsung ditransfer ke rekening KPM, melalui Bank Himbara, yakni bank pemerintah yang ditunjuk. Yakni BNI 46, Bank Mandiri, BRI dan BTN.Menurutnya, BST untuk warga terdampak Covid-19, Wawancara dengan Kepala Bidang Kejahteraan Sosial, Penanganan fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas, Lili Mudjianto

"BST sebenarnya adalah kebijakan pemerintah Kementerian Sosial yang membantu meringankan orang yang terkena pandemi melalui sistem perlindungan sosial dengan indeks Rp 300.000 / bulan / KPM".[119]

Untuk BPNT Kepala Bidang Kejahteraan Sosial, Penanganan fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas, Lili Mudjianto menjelaskan

"BPNT adalah perlindungan pangan sosial diberikan dalam bentuk bantuan pangan sosial bagi keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah / miskin dan rentan. Bantuan pangan sosial bertujuan untuk mengurangi pengeluaran keluarga miskin dan rentan guna memenuhi kebutuhan pangan. Bantuan pangan sosial yang sebelumnya merupakan

[118] Wawancara Kepala Bidang Kejahteraan Sosial, Penanganan fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas, Lili Mudjianto tanggal 22 Februari 2021 jam 09:30

[119] Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00

subsidi Rastra dan diubah menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT) di 44 kota terpilih pada tahun 2017"[120].

Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT. Menambahkan Warno Sebagai Kordinator PKH kabupaten Banyumas

"BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang".[121]

Tujuan program Sembako BPNT itu sendiri adalah Mengurangi beban pengeluaran KPM dalam pemenuhan kebutuhan pangan, Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga KPM, Memberikan pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan karena tidak semua KPM memerlukan Kebutuhan pangan yang sama.

Kepala Bidang Kejahteraan Sosial, Penanganan fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas, Lili Mudjianto menambahkan

"Untuk Manfaat program Sembako BPNT itu ada bebrap dimensi yang pertama dimensi kebutuhahan pokok dan ekonomi yaitu memenuhi dan Meningkatnya ketahanan pangan atau

[120] Wawancara Kepala Bidang Kejahteraan Sosial, Penanganan fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas, Lili Mudjianto tanggal 22 Februari 2021 jam 09:30

[121] Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00

kebutuhan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskina, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan, Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dalam dimensi lainmemberikan pembelajaran dan pengetahuan baru tetang laynan keuangan, perbankan dan transaki nontunai". [122]

Pelaksanaan program Sembako harus memenuhi prinsip:[123]

a) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warong;
b) KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada e-Warong terdekat;
c) E-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan;
d) E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM;
e) Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
f) Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;

[122] Wawancara Kepala Bidang Kejahteraan Sosial, Penanganan fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas, Lili Mudjianto tanggal 22 Februari 2021 jam 09:30

[123] Dokumen Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 Hlm 14-16

g) Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan
h) Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

Untuk PKH Besaran nilai uang yang diterima masing-masing keluarga tidak sama.

"Jika dalam satu keluarga itu memenuhi semua komponen, seperti ada ibu hamil, anak sekolah, lansia dan kriteria lainya, maka yang diterima maksimal bisa sampai Rp 225.000-Rp 1.500.000 lebih. Untuk penerima, terakhir tahun lalu sekitar 97 ribu. Penerima PKH ini, juga penerima bansos sembako.Penyaluran tiap tiga bulan sekali, namun tetap dihitung per bulan. Untuk pemanfaatannya, nanti dikontrol oleh pendamping PKH".[124]

Sedangan penerima bantuan sembako total sekitar 210 ribu KPM. Setiap KPM menerima Rp 200.000. Sedangkan BST, nilai yang diterima Rp 300.000, dan KPM yang menerima sekitar 49 ribu. Lili mengatakan,

"permintaan pemerintah pusat menyalurkan bansos tiga jenis lebih awal (Januari), di antaranya untuk membantu memulihkan perekonomian di daerah".[125]

Ini disalurkan langsung dari awal bulan. Untuk meningkatkan ketahanan nasional, karena pasca Covid-19, perekonomian harus mulai dipulihkan. Kalau uang tidak beredar, regulasi perdagangan tidak lancar bisa berbahaya.

"karena ada program penyaluran sembako, maka petani tidak mengalami masa paceklik, karena hasil pertanian bisa

[124] Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00

[125] Wawancara Kepala Bidang Kejahteraan Sosial, Penanganan fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas, Lili Mudjianto tanggal 22 Februari 2021 jam 09:30

terserap. Ada program sembako, harga menjadi stabil, sehingga inflasi secara nasional maupun di daerah bisa ditekan".[126]

Untuk Pelaksanaan PKH Sesuai dengan pedum dan uu yang belaku, tidak ada tabahan peraturan dari dinsos, (sisi sama seperti wawancara dengan Korkab PKH Bantumas, Warno)

" Untuk pendaftaran DTKS kabupaten Banyumas slalu mengikuti aturan dari pusat, tidak ada kriteria miskin khusus dari dinsos Banyumas, dan penyaringan pun desil 1-4 semua dari pusat bukan dari dinsos, Untuk tupoksi dinsos Banyumas ada di pergub, semua kita sesuai normative yang berlaku".[127]

Bantuan sosial PKH berupa uang untuk seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mampu, kurang mampu dan / atau rentan terhadap risiko sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mewujudkan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan sosial yang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Keluarga Penerima Manfaat dapat Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Dibutuhkan pengelolaan kemiskinan yang lebih komprehensif, yaitu tidak hanya melihat kemiskinan dari perspektif pendapatan per kapita yang diterima, tetapi lebih pada pendekatan yang komprehensif ketika melihat kemiskinan dari segi lokasi ekonomi, sosial, budaya dan geografis daerah tersebut. Namun, langkah-langkah tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik kemiskinan di suatu daerah. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik kemiskinan di suatu daerah dari segi letak ekonomi, sosial, geografis dan budaya berbeda dengan daerah lain. dengan

[126] Wawancara Kepala Bidang Kejahteraan Sosial, Penanganan fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas, Lili Mudjianto tanggal 22 Februari 2021 jam 09:30

[127] Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00

seperti itu akan diperoleh informasi lengkap tentang potret kemiskinan yang sebenarnya dan solusi yang harus di lakukan.

Kabupaten Banyumas lebih banyak melaksanakan program dari pusat kurang nya program pengentasan kemiskinan dari pemkab Banyumas itu sendiri, Penyelenggaraan otonomi daerah memang membuka banyak peluang untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan pelayanan publik yang murah, cepat, dan berkualitas. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, sehingga daerah berdaya untuk merencanakan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan. Hal ini meningkatkan kemungkinan mengintegrasikan pengentasan kemiskinan ke dalam kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan daerah. Kondisi ini memberikan peluang bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih kondusif di daerah yang akan mendukung upaya tersebut di tingkat nasional Seperti pada Peraturan Bupati Banyumas No 67 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas Dinas sosial dapat merumuskan dan mengkonsep sebuah agenda dalam bidang pengentasan kemiskinan. Namun Kenyataan bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama ini belum menunjukkan perbaikan yang nyata dalam pengentasan kemiskinan dan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat miskin.

3) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

a) Menetapkan calon peserta PKH

Penetapan Calon peserta PKH ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementrian Sosial RI atas dasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTKS PFM dan OTM). Sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Data DTKS itu sendiri berasal dari survei BDT atau DTKS yang dilakanakan oleh masing masing daerah kabupaten kota.

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan miskin, bukan hanya miskin dan rentan, tetapi orang yang miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTKS PFM dan OTM) yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.[128] Adapun mengenai prosedur mendapatkan PKH menurut pak dendi selaku pendamping PKH kecamatan, Raras Maftuhah sebagai pendamping PKH Kecamatan Cilongok dan kordinator pkh kabupaten melaui wawancaranya yaitu:

"Cara keluarga tidak mampu agar mendapatkan bantuan PKH pada intinya keluarga itu harus terdaftar di DTKS data terpadu kesejahteraan sosial yang diusulkan oleh desa melalui dinas sosial yang dikoordinir dan diinput di aplikasi SIKS-NG setelah data masuk di SIKS-NG maka nanti akan diusulkan menjadi data DTKS setelah itu menunggu verifikasi verval atau dapat kuota dari Kementerian Sosial, kalau masuk dalam

[128] Kementrian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2020*, (Jakarta), hlm.4.

mapping nanti akan dapat mendapatkan bantuan PKH atau tidak. Penerima bantuan PKH termasuk dalam indikator orang miskin yang sesuai dengan definisi undang-undang tentu karena program PKH ini masuk di hasil 1 atau miskin otomatis penerimaan bantuan PKH ini masuk di indikator orang miskin."

Dari kesimpulan dari wawancara diatas dalam pelaksanaan penunjukan kepesertaan PKH tidak ada sebuah tebang Pilih atau peserta titipan dari Pendamping PKH, Desa samapai dinas sosial, tetapi basis data yang di ambil adalah dari DTKS, dan apabila masih banyka ketimpanga yang terjadi yang harus di perbaiki adala data DTKS itu sendiri agar, Tidak ada lagi bantuan yang di anggap salah sasasran atau peserta PKH titipan dari salah stau pihak.

b) Penyiapan Data Awal Validasi

Direktur Jaminan Sosial Keluarga mengeluarkan surat keputusan penetapan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima PKH menurut wilayah provinsi, kabupaten / kota, dan kecamatan sebagai data calon peserta yang akan disahkan oleh pelaksana PKH di Wilayah. Data pertama yaitu Data terpadu program penanganan fakir miskin yang akan divalidasi dengan identifikasi data sumber, pertama-tama data terintegrasi program untuk memperhitungkan masyarakat miskin, kecuali korban bencana alam, korban bencana sosial dan masyarakat adat terpencil sesuai dengan peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 01 tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 terkait program Keluarga Harapan. yang kedua data usulan Baru dari daerah. sebagai pemerintahan daerah dapat mengajukan ke Kementerian Sosial dengan mekanisme tersendiri.

Hasil wawancara dengan Raras dan dendi, mengatakan bahwa:

"Calon peserta PKH itu sudah ada BNBA (By Name By Adress) langsung dari pusat degan acuan yang terdaftar di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial atau usulan dari daerah melalui mekanisme Verif DTKS terlebih dahulu, semua Calon KPM itu datanya dari DTKS dengan beberapa kriteria komponen, yaitu komponen Kesehtan, Pendidikan, dan Kesejahteran Sosial, untuk komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil dan anak yang berusia 0-6 tahun. Untuk komponen pendidikan terdiri dari anak SD, SMP, dan SMA yang usianya tidak melebihi 21 tahun. terakhir ada kelompok kesejahteraan sosial yang terdiri dari lanjut usia minimal 70 Tahun dan penyandang disabilitas berat.[129]"

Korkab Warno Menambahkan

"Calon penerima PKH di Banyumas semua terdaftar dalam DTKS, secara Aturan itu Iya, namun ada yang belum karena terutama PKH tahun 2013 itu dulu kan acuan datanya bukan DTKS yaitu yang penting data kemiskinan namun setelah data DTKS data di SIKS-NG itu ada belum, namun Seiring berjalannya waktu peserta PKH itu terdaftar di DTKS tapi untuk calon peserta DTKS kedepannya pasti terdaftar di DTKS. Dalam proses keluarga yang belum menjadi KPM PKH menjadi KPM PKH yaitu tadi harus didaftarkan di DTKS dulu baru nanti dapat kuota PKH, kalau keluarga masih menerima PKH yang sudah tidak ada komponen maka dia tidak akan muncul besaran bantuannya atau di non elijibelkan".[130]

Berdasarksan hasil wawancara dengan pendamping PKH dan Kordinator PKH jika dikaitkan dengan aturan Pedoman umum maka penetepan calon peserta PKH sudah sesuai dengan pedoman umum PKH 2020, dimana di Kabupaten Banyumas calon peserta PKH adalah data dari Pusat, data orang miskin yang terdaftar pada DTKS kemudian di kirimkan ke UPPKH Dinas Sosial dan UPPKH memferifikasi dan memvalidasi setelah itu hasilnya yang kemudian dikirimkan ke pusat.

[129] Wawancara Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Raras tanggal 22 Februari 2021 jam 10:00 Secara terpisah senada dengan keterangan raras, Wawanca dengan Dendi juga selaku Pendamping Sosial Kabupaten banyumas 25 Februari 17 : 23

[130] Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00

c) Pertemuan awal dan Validasi

Saat pertemuan awal, KPM PKH harus mengetahui tentang PKH dan dipersiapkan sebagai penerima PKH. Oleh karena itu pendamping PKH melakukan sosialisasi pada saat pertemuan awal. Kegiatan pertemuan awal sekaligus dapat digunakan untuk memvalidasi data dengan cara membandingkan data dasar peserta PKH dengan bukti dan fakta dari kondisi saat ini untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai kriteria komponen PKH (memenuhi syarat). Apabila datanya sesuai dan calon kpm tersebut masih terdapat komponen maka akan di laporkan sebagai calon KPM tetapi apabila datanya tidak sesuai makan akan di laporkan sebagai calon KPM yang tidak memenuhi syarat atau calon KPM tolak menjadi KPM PKH.

Pertemuan awal dan validasi dilakukan dalam satu proses. Data awal calon peserta PKH dikirim ke Pendmping PKH untuk divalidasi melalui aplikasi e-PKH. Pendmping sosial PKH mempersiapkan pertemuan pertama (AP) sebagai berikut: Tempat pertemuan pertama berkoordinasi dengan camat / lurah. Undangan dari desa setempat kepada aparat desa, kesehatan, pendidikan masyarakat dan sektor terkait. Bagikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada calon KPM PKH sesuai nama dan alamat yang Terdaftar.

Pada pelaksanaan pertemuan awal hal-hal yang perlu disampaikan oleh pendamping sosial PKH yaitu:[131]

i. Menginformasikan tujuan PKH
ii. Menjelaskan syarat (eligible) menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukaan rekening bank;

[131] Kementrian Sosial RI, *Pedoman Umum PKH Tahun 2020*, (Jakarta)

iii. Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program;

iv. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH;

v. Menjelaskan hak dan kewajiban KPM PKH;

vi. Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH;

vii. Penjelasan komitmen kesehatan disampaikan oleh petugas kesehatan; h. Penjelasan komitmen pendidikan;

viii. Penjelasan tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lanjut usia minimal 70 tahun keatas;

ix. Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program; dan

x. Menjelaskan tentang penyaluran bantuan sosial PKH.

Kegiatan validasi dapat dilakukan bagi calon KPM yang diundang untuk menghadiri pertemuan awal. Sedangkan calon KPM diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal, kegiatan validasi dapat dilakukan oleh petugas PKH yang berkunjung ke rumah KPM (Home Visit). Calon KPM PKH menandatangani komitmen pada formulir validasi.

Agar KPM PKH bisa mendapatkan akses bank untuk penyaluran KKS PKH, hasil validasi data KPM PKH kini harus memenuhi syarat minimal now Your Customer (KYC) terdiri dari nama, nomor identitas, tanggal lahir, nama ibu kandung sesuai KK dan alamat rumah. Data-data ini menjadi prasyarat pembukaan rekening bank..

Berdasrkan wawancara dengan Raras dan Dendi, selaku pendamping PKH kabupaten Banyumas mengatakan bahwa

pada saat pertemuan awal melakukan pencocokan data apakah yang menrerima PKH atau tidak.

"Saat pertemuan awal saya melakukan validasi dan veriikasi atau pencocokan data, apakah calon KPM PKH tersebut benar-benar masyarakat miskin dan terdapat komponen yang terdaftar pada data, seperti yang saya jelaskan tadi Apabila datanya sesuai dan calon kpm tersebut masih terdapat komponen maka akan di laporkan sebagai calon KPM Di terima dan Burekol tetapi apabila datanya tidak sesuai makan akan di laporkan sebagai calon KPM yang tidak memenuhi syarat atau calon KPM tolak menjadi KPM PKH, dan untuk calon KPM Di terima dan Burekol maka saya menjelasakn apa tujuan PKH, Pembukaan rekening, dan syarat-syarat pembukaan rekening seperti KTP dan KK utuk kebutuhan KYC Bank"[132]

Sebagaimana di kemukakan oleh ibu Waryanti dan ibu Sumiyati selaku KPM PKH :

"Bahwa untuk mendapatkan PKM PKH ada syaratnya yaitu harus mempunyai komponen, komponen saya anak SMP dan Balita, lalu di berikan kartu ATM bantuan dan masuknya bantuan sebulan sekali, ada yang tiga bulan sekali jadi ada dua kali dan setahun empat kali serta mengikuti pertemuan kelompok sebulan sekali." [133]

Berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH dan KPM PKH kabupaten Banyumas tersebut, jika dikaitkan dengan Aturan Pedoman Umum PKH 2020 maka sedah sesuai dengan pedoman umum PKH 2020 tentang pertemuan awal dan Validasi, dimana pendamping melakukan kemudian melakukan pertemuan awal, validasi atau pencocokan data, dan apabila calon KPM di terima dan Burekol maka pendamping

[132] Wawancara Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Raras tanggal 22 Februari 2021 jam 10:00 Secara terpisah senada dengan keterangan raras, Wawanca dengan Dendi juga selaku Pendamping Sosial Kabupaten banyumas 25 Februari 17 : 23

[133] Wawancara KPM PKH Kabupaten Banyumas, Waryanti tanggal 22 Februari 2021, jam 09:00. Secara terpisah senada dengan keterangan sumiyati KPM PKH lainya, wawancara Pada 23 Februari 2021, jam 10:00

menjelaskan tujuan Program PKH dan tentang tata cara pembukaan rekening.

d) Penetepan Keluarga Penerima Manfaat PKH

KPM PKH yang ditetapkan adalah Calon KPM yang telah divalidasi, diverifikasi dan memenuhi komponen dan kriteria PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian akan dibukakan rekening bank; dan harus memenuhi Hasil verifikasi komitmen P2K2, Komitmen Komponen yang di punyai dan/atau pemutakhiran data.

Hasil wawancara dengan Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno mengatakan

> "hasil dari validasi data calon KPM PKH yang memenuhi syrat maerima Bantuan PKH akan di input oleh pendmping PKH lewat system E-PKH setelah itu akan secara otomatis di terimakan oleh Kemnsos pusat untuk di tetapkan sebagai KPM PKH. bahwa Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH tetap dilakukan melalui keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. KPM PKH yang ditetapkan adalah keluarga yang memenuhi komponen dan kriteria PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendamping hanya melaksanakan verifikasi dan validasi kalopun nantinya di tetapkan atau tidak di tetapkan nya KPM PKH itu oleh Direktur JSK Kemensos. Pendamping kan mengimput data KPM tersebut ke EPKH dengan data yang valid KYC nya, dan kita kan menunggu data sudah valid tersebut ditetapkan untuk menerima bantuan PKH dan akan di buakan rekening"[134]

Berdasarkan wawancara dengan Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas jika dikaitkan dengan Pedoman Umum 2020, maka pentepan Penerima PKH telah sesuai dengan pedoman umum PKH dimana Pendamping melakukan penginputan di system E-PKH data yang sesui

[134] Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00

dengan syarat PKH atau Calon KPM yang memenuhi syarat dalam validasi pertemuan awal, setelah itu penetapan akan di lakukan oleh direktur JSK Kementrian sosial maka dinyatakan dia yang berhak untuk menerima PKH dan kemudian di lakukan pembuatan rekening KPM PKH.

e) Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan sosial PKH didasarkan komponen KPM PKH yang di tetapkan setelah KPM PKH Mengikuti komitmen dalam proses bisnis PKH. Dalam penyaluran bantuan, KPM sebelumnya harus memenuhi kewajiban berdasarkan kriteria komponen PKH. Dan setelah itu tinggal menunggu SK penyaluran dari Kementrian Sosial

Setelah SK tersedia dari Kementerian Sosial, akun rekening tersebut akan diperiksa. Data tersebut akan dikirim ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mendapatkan status rekening. Data KPM yang sudah diberikan rekening selanjutnya dijadikan dasar pendistribusian melalui 56 Subbid Kepesertaan sebagai SK. Kemensos mengirimkan dana ke KPPN berdasarkan dana dari Kementrian Sosial BNBA KPM PKH yang memiliki rekening koran aktif. Kementerian Sosial RI mengirimkan surat rujukan ke Bank penyalur pusat. Bank Penyalur kemudian melakukan Transfer dan bantuan sosial non tunai dari rekening bank penyalur bantuan sosial ke rekening penerima bantuan selambat-lambatnya 10 hari kalender setelah uang ditransfer.

Kementerian Sosial mengirimkan surat pemberitahuan ke Dinas Sosial Provinsi tentang persiapan penyaluran bansos beserta data KPM berdasarkan SP2D. Provinsi kemudian mengirimkannya ke Koordinator Kabupaten. Bank Pusat

Penyalur memberi tahu cabang daerah. Dan untuk penyalurannya, pihak cabang akan berkoordinasi dengan dinas sosial kabupaten guna mempersiapkan pelaksanaan Penyaluran Bantuan PKH . Setelah koordinasi, dana PKH dapat ditarik dari KPM PKH didampingi pendamping di masing-masing kecamatan..

Jadwal penyaluran bansos PKH dibagi menjadi empat tahap per Tahun, yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober. Final Closing berlangsung pada akhir setiap 3 bulan sekali . Jika bertepatan dengan hari libur nasional, maka pelaksanaan final closing akan ditunda hingga hari kerja berikutnya. Final closing adalah penentuan apakah KPM PKH masih layak di berikan bantuan atau di tuna atau dapat bantuan di tahap itu, dengan kriteria komitmen P2K2, Verifikasi Komitmen Pendidikan, kesehatan dan Kesejahteraan Sosial . Nominal Bantuan yang di terima oleh KPM PKH berubah setiap tahun Sesuai dengan SK Kementrian Sosial. Pada tahun 2021, KPM akan mendapatkan bantuan PKH sesuai dengan komponen hak miliknya.

IAIN PURWOKERTO

Tabel 4.4 **Skema Besaran bantuan (KPM) PKH tahun 2021**

Skema Bantuan	Besaran Bantuan
Bantuan Komponen Pendidikan	
Anak SD	Rp 900,000
Anak SMP	Rp 1,500,000
Anak SMA	Rp 2,000,000
Bantuan Komponen Kesehatan	
Ibu Hamil	Rp 3,000,000
Balita	Rp 3,000,000
Anak Usia Dini	Rp 3,000,000
Bantuan Komponen Kesejahteraan Sosial	
Lanjut Usia	Rp 2,400,000
Disabilitas	Rp 2,400,000

Tabel 4.5 **Contoh Skema Skema Besaran bantuan (KPM) PKH tahun 2021 Komponen Pendidikan**

	Komoponen			Jumlah Pertahun yang di Terima	Jumlah Pertahap yang di Terima
Keluarga Bu Agus	Anak SD	Anak SMP	Anak SMA		
Jumlah Komponen	1	1	1	3 Komponen Pendidikan	3 Komponen Pendidikan
Bantuan Pertahun	Rp. 900.000	Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000	Rp. 4.400.000	-
Bantuan Pertahap	Rp. 225.000	Rp. 375.000	Rp. 500.000	-	Rp.1.100.000

IAIN PURWOKERTO

Tabel 4.6 **Contoh Skema Skema Besaran bantuan (KPM) PKH tahun 2021 Komponen Kesehatan**

	Komoponen		Jumlah Pertahun yang di Terima	Jumlah Pertahap yang di Terima
Keluarga Bu Budi	Ibu Hamil	Balita		
Jumlah Komponen	1	1	2 Komponen Kesehatan	2 Komponen Kesehatan
Bantuan Pertahun	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000	-
Bantuan Pertahap	Rp. 750.000	Rp. 750.000	-	Rp.1.500.000

Tabel 4.7 **Contoh Skema Skema Besaran bantuan (KPM) PKH tahun 2021 Komponen Kesejahteraan sosial**

	Komoponen		Jumlah Pertahun yang di Terima	Jumlah Pertahap yang di Terima
Keluarga Bu Cahya	Lansia	Disabilitas Berat		
Jumlah Komponen	1	1	2 Komponen Kesos	2 Komponen Kesos
Bantuan Pertahun	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000	Rp. 4.800.000	-
Bantuan Pertahap	Rp. 600.000	Rp. 600.000	-	Rp.1.200.000

IAIN PURWOKERTO

Dengan catatan untuk Komponen, Untuk Hamil, Kehamilan ke 1 dan ke 2 yang di hitung, apabila KPM da yang hamil ke 3 dan seterusnya tidak masuk dalam komponen bantuan PKH hal ini untuk mendukung program KB, untuk Komponen Pendidikan, dapat di akumulasi apabila beda status tingkat Pendidikan, contohnya apabila KPM dengan komponen Pendidikan Anak pertama SMP dan Nak kedua SD maka akan dapat di akumulasi bantuan SMP di tambah SD, tetapi apabila

KPM mempunyai 2 Anak sekolah dan semua anak SD maka hanya akan di hitung satu komponen yaitu hanya 1 anak SD, dan untuk komponen kesejahteraan, lansia juga hanya aan di hitung satu bantuan, Walopun ada dua lansia hanya dapat 1 babntuan kompnen. Sekma Bantuan juga bias terjadi dalam satu keluarga terdapat komponen kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Penyaluran PKH melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berbentuk ATM, bantuan PKH di salurkan dengan tujuan untuk mendukungan dan membantu KPM PKH dalam segi ekonomi, atau dapat di gunakan transportasi ke layana kesehatan seperti puskesmas, pembelian makanan bergizi bagi Balita dan lansia sehingga kebutuhan protenin dan gizi anak dan lanisa terpenuhi, transportasi ke sekolah atau dapat untuk membayar kebutuhan sekolah sehingga bias meringankan biaya pendidikan, serta modal perdagangan untuk pengembangan bisnis KPM.

KPM PKH di bekali dengan kartu kombo artinya kartu satu untuk bantuan sosial PKH dan yg ke dua bantuan sosial pangan atau sembako, satunya bisa dipakai dua. Nominal PKH yang di terima keluarga penerima pemanfaat KPM nominalnya beragama, besaran jumlah yang diterima oleh KPM PKH berbeda beda sesuai jumlah Komponen yang di miliki oleh KPM dari anak SD, SMP, atau SMA, jumlah balita, serta ada tidaknya hamil dalam rumah tangga miskin di kabupaten Banyumas.. KPM yang menerima bantuan dibagi 4 kali Tiap 3 bulan atau triwulan, cara KPM dalam pengambilan bantuan yaitu pengambilan uang di ATM bisa di agen atau di warung bisa. Pernah terjadi bantuan di kartu kombo kosong karena saldonya belum di top up sama Kementerian, yaitu solusinya

dilaporkan melalui perjenjang melalui korkap, Korwil dan seterusnya

Berdasarkan data yang saya terima dari UPPKH Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, tahun 2021 Perfebruari terdapat 111.311 KPM PKH Aktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.8 **Daftar Penerima PKH Kabupaten Banyumas**

NO	KECAMATAN	BU MIL	AUD	SD	SMP	SMA	LANSI A	DISABIL	JUMLAH KPM
1	AJIBARANG	83	1709	2998	1763	1393	2242	25	6627
2	BANYUMAS	21	795	1488	877	678	973	5	2910
3	BATURRADEN	31	932	1847	1072	820	1036	19	3603
4	CILONGOK	119	3266	5751	3305	2507	3464	50	11372
5	GUMELAR	11	712	1371	771	572	1681	22	3502
6	JATILAWANG	25	965	1997	1351	944	2040	64	4606
7	KALIBAGOR	17	790	1600	997	741	1021	19	3260
8	KARANGLEWA S	29	1447	2651	1493	1140	1185	48	4769
9	KEBASEN	25	1305	2422	1510	1146	1231	64	4764

IAIN PURWOKERTO

10	KEDUNG BANTENG	32	1354	2522	1354	1105	1513	24	4810
11	KEMBARAN	21	1280	2266	1287	995	1396	25	4516
12	KEMRANJEN	24	1043	2004	1185	1014	1182	35	4047
13	LUMBIR	28	883	1836	1059	752	1662	36	4135
14	PATIKRAJA	26	994	1923	1147	883	1046	27	3689
15	PEKUNCEN	36	1623	2836	1624	1261	2575	149	6355
16	PURWOJATI	7	651	1169	746	564	907	10	2593
17	PURWOKERTO BARAT	8	354	740	375	409	315	6	1336
18	PURWOKERTO SELATAN	7	511	1099	645	544	402	4	1901
19	PURWOKERTO TIMUR	2	339	728	467	380	362	10	1376
20	PURWOKERTO UTARA	5	289	612	382	308	419	11	1217
21	RAWALO	24	749	1643	1124	964	1146	45	3531
22	SOKARAJA	20	856	1916	1098	960	1039	12	3698
23	SOMAGEDE	19	704	1339	896	700	1009	16	2914

IAIN PURWOKERTO

24	SUMBANG	81	2697	4446	2361	1643	2518	51	8397
25	SUMPIUH	25	854	1702	1080	912	932	42	3422
26	TAMBAK	18	682	1423	875	706	875	13	2897
27	WANGON	15	1091	2240	1407	1049	1837	37	5064
	Grand Total	**759**	**28875**	**54569**	**32251**	**25090**	**36008**	**869**	**111311**

Sumber: Data UPPKH Dinas Sosial Kab Banyumas[135]

Hasil wawancara dengan Raras, salah satu Pendamping PKH Kabupaten Banyumas

"penyaluran PKH dalam satu tahun dilakukan beberapa tahap yaitu tahap 1 Januari, tahap 2 April, tahap 3 Juli dan tahap 4 Oktober"[136].

Senada juga keterangan dari Warno Selaku Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas

"Pada tahun 2021 tahap penyaluran dimulai tahap 1 pada bulan Januari. Dalam satu tahun Bantuan PKH disalurkan dalam 4 tahap. Jadi mulai dari januari utuk tahap 1, April tahap 2, Juli tahap 3 dan Oktober tahap 4, setiap tahap pu KPM dapat menerima namtuan dengan jumlah berbeda tergantung ada tidaknya perunahan data dari KPM seperti Lansia meninggal atau Anak sekolah yang naik kelas maupun sudah lulus sekolah."[137]

Dari hasil wawancara dengan raras dan warno di atas bahwa apabila di rujuk Pedoman Umum 2020 maka penyaluran bantuan PKH di Kabupaten Banyumas sesui dengan apa yang

[135] Data Final Closing, UPPKH Dinas Sosial Kab Banyumas Februari 2021

[136] Wawancara Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Raras tanggal 22 Februari 2021 jam 10:00

[137] Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00

tercantm pada Pedoman Umum PKH 2020 penyaluran bantuan yang tertera di pedoman PKH, dimana di Kabupaten Banyumas tahapannya dimulai di Bulan Januari untuk tahap 1, April untuk tahap 2, Juli untuk tahap 3 dan Oktober untuk tahap 4.

f) Pendampingan

KPM PKH membutuhkan dukungan untuk mempercepat pencapaian tujuan program. Pekerja sosial PKH melakukan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi keluarga penerima PKH untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, pendidikan dan sosial. Pekerja sosial PKH juga memastikan bahwa KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai aturan dan persyaratan KPM PKH untuk perubahan perilaku. Dukungan itu adalah Pendampingan untuk komponen kesehatan, pendidikan dan sosial.

Untuk mempermudah melaksanakan tugas pendampingan, Pendamping PKH dapat membuat kelompok-kelompok KPM PKH sesuai wilayah yang mereka Dampingi. Pembentukan kelompok PKH KPM bertujuan untuk memfasilitasi dukungan dalam rangka peningkatan kemampuan dan kapasitas keluarga penerima manfaat, pemutakhiran data, pemantauan penyaluran bantuan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH. Pembentukan kelompok dapat berisikian atau beranggotaan 10 hingga 30 KPM dengan kriteria masing masing pendamping.

Pendampingan adalah mendampingi KPM PKH untuk menerima haknya dalam bantuan uang di KPM masing – masing. Pendampingan yang diterima KPM, pendampingan berupa verifikasi komitmen baik faskes dan fasdik pertemuan kelompok atau P2K2 pendampingan dalam penyaluran bantuan

dan memutakhiran data apabila terjadi ada perubahan, Pendamping PKH mendampingi dan mengadvoaksi agar KPM PKH mendapat bantuan komplementer seperti sosial pangan atau sembako kartu Indonesia sehat atau kartu Indonesia pintar. KPM PKH banyak yang tidak mendapatkan bantuan komplementer, KPM PKH mempunyai kewajiban dalam setiap komponen kesehatan memeriksakan kandungan Posyandu, kesehatan anak sekolah, kewajiban lancar dengan didampingi secara Intens di cek verifikasi komitmennya.

Hasil wawancara dengan Raras, salah satu Pendamping PKH Kabupaten Banyumas

"peran pendamping yang sangat vital pada saat pendampingan, karena kita bukan hanya memastikan bantuan PKH di terima oleh KPM sesuai jumlah, waktu, tepat sasarsn tetapi juga mendampingi KPM dalam FDS membantu merubah perilaku KPM, Verifikasi faskes kesos dan fasdik bukan hanya itu kita juga berperan sebagai motivator bagi KPM agar terus semangat dan dapat mentas dari jurang kemiskinan tentunya dengan kita juga ikut memfasilitasi apabila ada KPM yang membutuhkan jaringan dalam usaha yang mereka bangun"[138].

Senada juga keterangan dari Warno Selaku Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas

"dalam program PKH peran sangat penting sebenarnya ada di tangan Pendamping PKH, dan dapat di bilang bahwa Pendamping PKH adalah Ujungtombak dalam program PKH dimana mereka bukan hanya di tuntut dalam memastikan bantuan di terima KPM dan pemutakhiran data KPM Verifikasi faskes kesos dan fasdik, lebih dari itu pendamping PKH harus bias menjadi partner bagi KPM yang mempunyai usaha paling tidak pendamping PKH dapat memfasilitasi agar usaha KPM terebut berkembang, tidak sampai di situ pendamping PKH juga harus dapat memotivasi agar KPM tidak lagi menjadi warga tidak mampu, dengan pendampingan P2K2 juga Pendamping PKH harus dapat merubah perilaku KPM agar kedepanya dapat mandiri dan tidak tergantung pada bantuan sosial, memahami

[138] Wawancara Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Raras tanggal 22 Februari 2021 jam 10:00

isi dari FDS, agar di jauhkan adari rentenir, paham akan gizi agar terhindar dari stunting dan sadar pentingnya pendidikan anak, pendamping PKH juga memfasilitasi KPM PKH apabila ada yang belum mendapatkan bantuan BPNT, KIS, KIP,.”[139]

Dari hasil wawancara dengan raras dan warno di atas bahwa apabila di rujuk Pedoman Umum 2020 maka pendampingan KPM PKH di Kabupaten Banyumas sesui dengan apa yang tercantum pada Pedoman Umum PKH 2020 pendampingan KPM yang tertera di pedoman PKH, dimana di Kabupaten Banyumas tugas yang di emban melebihi yang terdapat dalam pedoman umum 2020 dimana harus sebagai motivator, fasiltator, sekaligus partner KPM PKH dalam segala bidang, bukan Cuma memastikan bantuan PKH sudah di terima KPM, pemutakhran data dan verifikasi saja.

g) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Keluarga (P2K2) atau biasa disebut Family Development Session (FDS) merupakan intervensi terstruktur untuk mengubah perilaku KPM PKH. P2K2 diberikan kepada semua KPM PKH sejak pertama keanggotaan PKH secara resmi atau setelah mendapatkan bantuan pertama kali.

Tujuan P2K2 adalah Meningkatkan pengetahuan KPM PKH tentang pengasuhan anak dan mendukung pendidikan anak di sekolah, serta cara meningkatkan pendapatan dengan membuka usaha dan mengatur keuangan keluarga. Peningkatan kesadaran KPM PKH terkait dengan kesehatan, terutama pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, dengan perhatian khusus pada kesehatan ibu hamil dan bayi. menyadarkan KPM PKH untuk pencegahan kekerasan terhadap anak dan

[139] Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00

pemenuhan hak anak, KPM PKH sadar akan hak lansia dan penyandang disabilitas. Secara umum meningkatkan kesadaran KPM PKH tentang hak dan kewajibannya sebagai masyarakat, terutama saat menggunakan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kondisi kesehatan dan pendidikan.

Modul P2K2 adalah Komponen yang sangat butuhkan dalam pelaksanaan P2K2. Modul P2K2 adalah modul pembelajaran terstruktur yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat miskin dengan fokus pada bidang ekonomi, pendidikan anak usia dini, kesehatan dan perlindungan anak. P2K2 Modul P2K2 yang dibahas adalah modul pendidikan dan pengasuhan anak, modul ekonomi, modul kesehatan, modul perlindungan sosial, dan modul kesejahteraan sosial.

Wawancara dengan Warno Korkab PKH kabupaten Banyumas

"P2K2 yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga,disilah peran penting merubah perilaku dari KPM, yang mungkin sebelumnya KPM masih tidak peduli akan Pendidikan anak, kesehatan dan gizi balita, lansia atau kurang nya kesadaraan hak hak anak yang mempunyai disabiltas, dengan pertemuan rutin ini di harpkan mulai ada perubahan yang terjadi, bukan hanya itu, perubahan dari KPM yang bermental miskin akan berubah pandanganya, KPM yang tergantung pada bantuan, akan dapat bia mandiri, KPm yang sebelum nya terjerat rentir akan sadar bahayanya rentenir dan dapat mengatur keuanga sendiri dan dapat mendapat pandangan baru tentang berusaha dalam arti berjualan atau produksi yang dapat di jual untuk meningkatkan perekonomian, yang puncaknya adalah KPM terbebas dari kemiskinan dan dapat mandiri sehingga mau untuk graduasi mandiri."[140]

[140] Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00

Berdasarkan wawancara dengan kordinator pendamping PKH dan pedoman umum PKH 2020 dapat di simpulkan bahwa yang dilaksanakan pada kabupaten Banyumas sudah sesuai Pedoman umum, tentang P2K2.

h) Verifikasi Komitmen

Verifikasi Komitmen bertujuan untuk memantau Komitmen anggota KPM PKH pada kehadiran di fasilitas Kesehatan seperti posyandu balita, posyandu lansia, memeriksakan kehamilanya dan keaktifan anak sekolah dalam komponen Pendidikan secara rutin.

Pendamping PKH dalam Pelaksanaan verifikasi mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu anak dan lansia untuk memantau keaktifan anggota KPM, untuk fasilitas Pendidikan pendamping pkh berordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan juga keaktifan aggota KPM PKH aktif sekolah, setelah merekap Bersama layana kesehatan dan Pendidikan pendamping PKH memasukan rekapan data tadi ke sistem menggunakan system E-PKH. Hasil verifikasi komitmen merupakan salah satu dasar keputusan akumulasi apakah KPM tetap mendapat Bantuan atau penangguhan, bahkan atau dapat penghentian bantuan.

IAI

"Verifikasi komitmen kita lakukan setiap bulan. Kita melakukan Verifikasi komitmen fasilitas kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan berkordinasi sekolah yang ada di Kabupaten Banyumas apabila memungkinkan pendamping datang langsung tetapi ketika tidak memungkinkan karena kondesi pandemic, pendamping dapat berkordinasi dengan layana online. Kita mencatat tingkat keaktifan dan kehadiran Komponen KPM PKH, kemudian data itu kita input dalam system Epkh dan nanti Epkh akan Mengolah dan secara

otomatis dapat menentukan pada tahap berikutnya apakah KPM tersebut yang masih diberikan bantuan, dan dihentikan." [141]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kordinator pendamping PKH, jika merujuk pada pedoman umu PKH 2020 maka pendamping PKH sudah melakukan salah satu tugas nya yaitu Verifikasi Pendidikan , kesehatan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan pedoman PKH 202, dimana pada saat melakukan Verifikasi pendamping PKH berkordinasi dengan sekolah, Pusekesmas, dan kemudian merkap jumlah kehadiran para anggota KPM PKH setelah itu di Input di E-PKH.

i) Pemutakhiran Data

Tujuan Pemutakhiran data adalah untuk mengetahui keadaan terkini adakah perubahan status Pendidikan, sosial atau yang lain dari anggota KPM PKH. Data ini akan digunakan sebagai data pedoman program kesejahteraan sosial. Khususnya untuk PKH, data tersebut akan digunakan dalam pengambilan keputusan apakah KPM masih mendapat penyaluran atau penangguhan atau malah penghentian bantuan. Adapun Beberapa perubahan informasi atau status dari anggota KPM sebagai berikut: Perubahan status eligibilitas KPM kata lain, dari KPM yang masih mendapatkan bantuan menjadi KPM yang di berhentikan bantuanya; Perubahan status komponen kepesertaan yang mempengaruhi besaran bantuan yang akan di dapatkan; Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses dari posiyandu ke puskemas atau sebaliknya; Perubahan fasilitas Pendidikan yang diakses dari SD naik SMP atau dari SMA ke lulus; Perubahan domisili KPM; dan Perubahan data terbaru

[141] Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00

bantuan program komplementer seperti penambahan BPNT ataupun lainya.

Pelaksanaan pemutahiran data menggunakan system PKH yaitu EPKH yang digunakan oleh pendamping untuk mengupdate atau melaporkan kondisi terkini pada setiap anggota KPM PKH.

Berdasarkan wawancara dengan Raras Maftukhah selaku pendamping PKH Kabupaten Banyumas mengatakan bahwa

> "Pemutakhiran data merupakan salah satu hal yang penting dalam proses bisnis PKH, salah satu juanya adalah untuk mengetahui kondisi terkini anggota KPM PKH. Apakah ada perubahan status Pendidikan atau layanan penddidikan atau kesehatan, pemutakhiran data bertujuan untuk memperbaharuai data KPM seperti contoh Anak KPM naik tingkat sekolah, atau verifikasi untuk melaporkan komitmen KPM, yang terpenting untuk melaporkan apabila ada KPM yang sudah mau untuk Gradusai Mandiri'.[142]

Berdasarkan hasil wawancara dengan raras pendamping PKH jika dikaitkan dengan aturan pedoman umu PKH maka, pendamping PKH sudah melakukan pemukthiran data sesuia dengan yang telah termaktub dalam pedoman umum PKH 2020, dimana pada saat pemukthiran data maka akan diketahui hasilnya apakah KPM tersebut masih mendapatkan penyaluran bantuan, ditangguhkan atau malah di berhentikan atau dalam kata lain status kepesertaan apakah berstatus tergraduasi atau transisi.

Transformasi kepesertaan PKH adalah proses penghentian sebagai penerima PKH yang dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi. Semua KPM PKH di

[142] Wawancara Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Raras tanggal 22 Februari 2021 jam 10:00

evaluasi dan dinilai status keanggotaan dan status sosial ekonominya.

Graduasi terdiri atas graduasi mandiri dan gradusai alamiyah. adalah akhir masa kepesertaan bagi keluarga penerima PKH yang karena kriteria kepesertaan sudah tidak terpenuhi lagi. Sedangkan graduasi mandiri adalah hasil pemutakhiran sosial ekonomi merupakan berakhirnya masa kepesertaan keluarga penerima PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi atau di katakan sudah mampu dan mandiri.

Wawancara dengan Warno Korkab PKH kabupaten Banyumas

> "Graduasi yaitu keluar dari PKH atau mengundurkan diri dari PKH, P2K2 kedua simandiri dapat dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan program KPM, karena graduasi KPM mandiri itu berubah sadar tingkah lakunya yang sebelumnya hanya menerima bantuan sekarang menjadi Mandiri. Tingkat graduasi mandiri di Kabupaten Banyumas, meningkat sekali karena pendamping ini memberikan edukasi terus – menerus kepada KPM."[143]

Dari keteranga di atasa dapat di simpulkan bahwa semakin banyak dan besar presentase graduasi mandiri, semakin sukses program PKH dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

j) Pengaduan

Sebagai wujud tata kelola program yang baik, PKH menawarkan sistem pengaduan bersama (sistem pengaduan). Masyarakat dapat mengakses layanan ini untuk memastikan

[143] Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00

bahwa KPM mendapatkan layanan yang berkualitas dan mempertahankan hak-haknya..

Pengaduan dapat disampaikan dengan menyampaikan informasi, pengaduan atau permasalahan, keluhan terkait pelaksanaan PKH. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis KPM oleh PKH kepada SDM PKH , mitra kerja melalui Contact Center PKH.

Tindak lanjut pengaduan dilakukan dalam pembahasan kasus (case conference) yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, mengkaji manfaat pengaduan, mengklarifikasi, mengevaluasi bukti dan mengklasifikasikan kasus pengaduan yang tidak berada di level contact center Penyelenggara, yang dijalankan oleh Tim manajemen pusat dan penanganan pengaduan.

Wawancara dengan Warno Korkab PKH kabupaten Banyumas menjelaskan bukan Cuma Call Center pusat tetapi Sekretariat PPKH kabupaten, beseerta pemerintahan kabupaten Banyumas juga menyediakan layanan pengaduan.

IAI

"Sistem pengaduan di Banyumas ada banyak, pemerintahan kabupaten juga mnyedian system pengaduan pada laporbup dan web lapor, di UPPKH yang di fasilitasi oleh Dinas sosial Disini juga kami menerima pengaduan dengan cara melaporkan langsung ataupun jauh dapat dengan ke laporbup atau ke UPPKH tingkat Kecamatan atau bisa berkordinasi pendamping di setiap kecamatan. Atau KPM PKH juga dapat mengakses beberapa Layanan Pengaduan seperti nomor-nomor telepon yang dapat dihubungi Call Center PKH : 1500299, Lapor Bup Banyumas Nomor Whatsapp 081297167008, dan Lapak Aduan : https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-Banyumas, kita dengan tangan terbuka siap memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat."[144]

[144] Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00

Berdasakan wawancara dengan pendamping PKH jika dikatkan dengan teori maka sistem pengaduan PKH sudah sesuai dengan pedoman PKH, yaitu apabila ada yang ingin mangadukan tentang ketidakpuasan terhadap pelayanan dari pendamping PKH bisa mengadukan ke Contact Center PKH.

Alur calon KPM PKH sampai mendapat KPM PKH dan perjalanan menjadi KPM dan sampai Graduasi yaitu calon KPM divalidasi kemudian mendapatkan persetujuan untuk burekol atau pembukaan rekening kemudian Dapat bantuan dananya cair setiap bulan p2k2 diverifikasi komitmen datanya di mutahirkan, memberikan edukasi agar KPM itu siap digraduasi kalo sudah mampu lulus menjadi KPM PKH di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pedum PKH tahun 2020.

4) Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan

a) Faktor pendukungnya

Faktor Pendukung salah satunya yaitu Komunikasi yang berjalan dengan terjalin dengan baik antara Pendamping dan KPM PKH. Komunikasi yang dapat mempermudah pekerjaan pendamping dalam Pemutakhiran Data sehingga dapat membuat KPM mendapatkan bantuanya tanpa ada kesalahan data yang terjadi. Komunikasi ini juga dapat lebih memhamkan KPM apabila ada sebuah kesalah pahaman yang terjadi sehingga tidak selalu melulu langsung melaporkan ke call center ketika ada permasalahan yang sepele. tersebut juga memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada KPM untuk memenuhi syarat dan ketentuan ketika ada perubahan aturan.

Factor kedua adalah Sumber daya Pendamping PKH yang Cakap merupakan sarana untuk mendukung keberhasilan

IAIN PURWOKERTO

program PKH, dengan kecakapan Pendamping PKH dengan berbagainya dapat terselesaikan dan dapat berjalan maksimal, seperti Pendamping PKH dapat berperan sebagai Fasilitator, Motivator, Eksekutor data, bahkan partner bagi KPM sehingga mempermudah KPM PKH ketika membutuhkan sesuatu.

Struktur Birokrasi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, yang telah ikut serta mendukung implementasi PKH di kabupaten Banyumas dengan memfasilitasi UPPKH dalam hal yang di butuhkan UPPKH alopun beum maksimal, tentunya dapat memberikan kontribusi positif. Dengan adanya Adanya komitmen dari pemerintahan daerah kabupaten Banyumas yang kuat untuk Program Keluarga Harapan sehingga dapat keselarasan tujuan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

b) Faktor Penghambat

i. Kurang nya Peran Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Pemerintah Kabupaten Banyumas mendukung kesuksesan Program Keluarga Harapan ini agar dapat membantu pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang sangat sulit untuk dihilangkan tetapi kurangnya Dukungan yang ditunjukkan seperti tidak adanya honor daerah atau dengan pengadaan Kendaraan yang dapat digunakan oleh para pendamping PKH untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh dan sulit. Dukungan Tidak cukup dukungan Moril saja tetapi dukungan bagaimana caranya untuk pelaksanaan kebijakan akan lebih mempermudah pelaksanaan Program PKH.

IAIN PURWOKERTO

ii. Kondisi Geografis

Wilayah Banyumas yang luas sehingga sulit dijangkau para pendamping dibutuhkan biaya ekstra dan waktu yang tidak sebentar terutama saat validasi data yang mana para pendamping harus datang ke tiap rumah KPM yang jaraknya cukup jauh meskipun dalam 1 wilayah kecamatan, pendidikan masyarakat yang rendah sehingga membutuhkan usaha lebih dari para pendamping dalam melakukan sosialisasi, koordinasi dengan pihak desa dan kecamatan yang terkadang sulit untuk dilakukan sehingga sosialisasi terkadang harus ditunda, dan yang terkahir adalah masyarakat yang sudah lama menerima bantuan tetapi tidak ada menggunakan dana bantuan tersebut dengan bijak sehingga tidak ada perubahan dalam kehidupannya walaupun sudah enam tahun menerima bantuan.

iii. KPM Pada Zona Nyaman

KPM terlalu nyaman dengan bantuan Faktor yang menjadi penghambat selanjutnya adalah KPM yang terlalu nyaman dengan bantuan yang ada. Maksudnya adalah para penerima KPM ini ingin mendapatkan bantuan ini secara terus-menerus yang mana ini sudah tidak sesuai dengan tujuan diadakannya PKH ini. Pada kenyataannya, di Kabupaten Banyumas sendiri masih KPM angkatan pertama masuk masih menjadi kpm tanpa ada perubahan perilaku atau motivasi untuk mengundurkan diri .

IAIN PURWOKERTO

5) Solusi Kendala Dalam Implemnetasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentu ada kendala yang akan dihadapi baik kendala yang bersifat kecil maupun besar. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan

Program Keluarga Harapan melalukan berbagai upaya agar hambatan yang ada tidak begitu berarti sehingga tujuan yang telah dicanangkan tetap dapat tercapai. Adapun upaya tersebut adalah sebagai berikut

a) Meningkatkan pendampingan kepada para KPM. Pendampingan yang intens kepada para KPM. Tujuan jangka panjang diadakannya PKH ini adalah untuk membentuk pola pikir masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan. Memberi motivasi lebih kepada KPM yang belum ada perubahan perilaku dan KPM yang masih menginginkan Bantuan PKH selamanya
b) Pemberian Fasilitas bagi para Pendamping PKH Pemerintah Kabupaten Banyumas membahas dengan DPRD tentang ada nya Honor daerah dan Fasiltas Kendaraan Bagi pendamping PKH Sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini, yang diharapkan dengan adanya Kendaraan tersebut dapat memudahkan pendamping untuk menjangkau rumah- rumah KPM yang jauh.

IAIN PURWOKERTO

2. Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas

Program PKH bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar melalui perlindungan sosial adaptif dengan indikator kinerja program: Persentase (%) PKH KPM yang perubahan perilaku (terkait pendidikan, kesehatan dan ekonomi) dan persentase (%) KPM PKH yang telah gradusi mandiri dalam rangka meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial.

Tujuan PKH tidak hanya untuk membantu masyarakat miskin, tetapi untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Penyaluran PKH ke bidang Pendidikan dimaksudkan agar negara Indonesia dapat menggunakan pendidikan untuk mewujudkan kehidupan dunia di masa depan. Dan PKH ke bidang Kesehatan Indonesia diharapkan memiliki gizi yang baik sehingga dapat bekerja secara produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Hasil yang paling dirasakan karena adanya dana bantuan PKH adalah meningktanya pendapatan keluarga dan terpenuhinya kbutuhan sandang pangan Keluarga penerima manfaat PKH, apabila dari segi itu hasil yang di rasakan KPM dari program ini adalah memuaskan. Kesimpulan ini dapat di lihat dari hasil graduasi mandiri selama 3 tahun terakhir yaitu 3971 KPM, dan dapat di lihat dari Wawancara dengan beberapa KPM salah satunya Bu ida, awancara tanggal 21 Februari 2021

> "Bantuan PKH sangat meringankan dan membantu perekonomian keluarga kami yang masih sangat berkebutuhan, uang penghasilan keluarga saya hanya cukup untuk sehari hari, dan bantuan PKH dapat saya gunakan untuk jualan kecil-kecilan sekarang saya juga tidak bingung lagi untuk menyekolahkan anak, "[145]

IAIN PURWOKERTO

selain itu dapat di lihat dari keterangan ibu Irma salah satu KPM graduasi PKH kabupaten Banyumas

> "saya masuk PKH tahun 2013 dan saya mengundurka diri pada tahun 2019 lalu, saya sama suami pedagang sate kelinci di lokawisata baturaden, saya mengundurkan diri dari PKH karena saya merasa sudah menjadi keluarga yang bias mandiri dan masih banyak keluarga yang belum menerima banyuan PKH yang ekonominya jauh di bawah saya. Dulu saya mendapat bantuan PKH ambil sendiri lewat ATM, Alhamdulilah bantuan PKH selain untuk membayar anak sekolah juga membantu dagangan sate kelinci saya"[146]

---

[145] Wawancara KPM PKH Kabupaten Banyumas, Ida tanggal 22 Februari 2021 jam 11:00

[146] Wawancara KPM PKH Graduasi Kabupaten Banyumas, Irma tanggal 22 Februari 2021 jam 11:00

senada apa yang di katakana KPM PKH, Kordinator pendmping PKH juga mencontohkan berbagai macam KPM graduasi yang menjadi sukses karena program PKH dan omsetnya sekarang jutaan dan selalu menjadi pembicara dan motivasi bagi KPM ketika ada acara besar.

Dari wawancara tersebut inilah yang diharapkan dari pelaksaan program ini. KPM disini merasa bahwa peran mereka dalam proses memenuhi kebutuhan anak – anaknya untuk bersekolah dan biaya pemeriksaan balita maupun ibu hamil tergantikan dengan adanya dana bantuan program keluarga harapan. dengan meningkatnya partisipasi orang tua akan penting Pendidikan anak – anak dan pentingnya kesehatan anak – anak agar dapat lebih baik mereka yang nantinya akan menuju / mencapai asnyarakat yang sejahtera yang terbebas dari kebodohan, penyakit, dan kemiskinan. sehingga pada akhirnya mata rantai kemiskinan di Kabupaten Banyumas terputus.

Tabel 4.9 **Graduasi Kpm Pkh Dari Tahun 2018 -2020 Kab Banyumas**

KECAMATAN	TAHUN	QUISINONE				Total
		Graduasi Alamiah	**Graduasi Sejahtera Mandiri**	**Lansia Tunggal**	**Graduasi Alamiah**	
AJIBARANG	2018	174	95	0	174	273
	2019	237	141	0	237	394
	2020	795	377	3	795	1190
BANYUMAS	2018	59	5	0	59	65
	2019	78	12	0	78	103
	2020	401	54	4	401	465
BATURRADEN	2018	72	17	0	72	94

IAIN PURWOKERTO

	2019	110	51	0	110	165
	2020	345	43	1	345	392
CILONGOK	2018	193	17	0	193	214
	2019	241	50	0	241	306
	2020	1422	342	0	1422	1784
GUMELAR	2018	180	4	0	180	194
	2019	186	21	0	186	223
	2020	597	75	8	597	696
JATILAWANG	2018	38	8	0	38	47
	2019	83	36	0	83	124
	2020	516	44	0	516	573
KALIBAGOR	2018	80	15	0	80	95
	2019	96	51	0	96	155
	2020	465	70	1	465	548
KARANGLEWAS	2018	48	15	0	48	67
	2019	113	110	0	113	240
	2020	450	139	0	450	605
KEBASEN	2018	89	5	0	89	100
	2019	130	22	0	130	154
	2020	618	52	0	618	690
KEDUNG BANTENG	2018	102	2	0	102	107
	2019	123	56	0	123	185
	2020	499	85	0	499	590

IAIN PURWOKERTO

KEMBARAN	2018	100	10	0	100	118
	2019	122	36	0	122	169
	2020	632	75	1	632	720
KEMRANJEN	2018	118	8	0	118	128
	2019	122	92	0	122	225
	2020	654	119	0	654	794
LUMBIR	2018	97	2	0	97	99
	2019	142	10	0	142	154
	2020	783	64	1	783	870
PATIKRAJA	2018	71	6	0	71	79
	2019	94	5	0	94	101
	2020	433	38	1	433	478
PEKUNCEN	2018	76	36	0	76	119
	2019	200	53	0	200	261
	2020	538	146	0	538	692
PURWOJATI	2018	75	11	0	75	86
	2019	69	24	0	69	94
	2020	463	86	0	463	561
PURWOKERTO BARAT	2018	24	3	0	24	28
	2019	38	19	0	38	61
	2020	148	33	0	148	185
PURWOKERTO SELATAN	2018	22	7	0	22	31
	2019	41	12	0	41	59

IAIN PURWOKERTO

	2020	210	24	0	210	248
PURWOKERTO TIMUR	2018	24	1	0	24	26
	2019	31	32	0	31	64
	2020	138	16	0	138	158
PURWOKERTO UTARA	2018	18	2	0	18	20
	2019	41	5	0	41	47
	2020	130	11	0	130	142
RAWALO	2018	44	12	0	44	62
	2019	111	30	0	111	163
	2020	539	37	1	539	588
SOKARAJA	2018	65	22	0	65	91
	2019	119	35	0	119	169
	2020	497	68	0	497	575
SOMAGEDE	2018	62	8	0	62	74
	2019	82	15	0	82	100
	2020	394	42	0	394	446
SUMBANG	2018	242	76	0	242	328
	2019	274	78	0	274	360
	2020	1000	171	0	1000	1171
SUMPIUH	2018	57	19	0	57	79
	2019	119	22	0	119	149
	2020	560	29	19	560	632
TAMBAK	2018	68	15	0	68	86

IAIN PURWOKERTO

	2019	108	27	0	108	146
	2020	444	107	0	444	565
WANGON	2018	121	20	0	121	142
	2019	155	57	0	155	218
	2020	748	81	0	748	847
Grand Total		**20003**	**3971**	**40**	**20003**	**24646**

Dari di lihat dari table di atas dapat dikatan Setiap tahun hampir disetiap kecamatan terdapat graduasi mandiri, dan graduasi mandiri dapat dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan program KPM, karena graduasi KPM mandiri itu berubah sadar tingkah lakunya yang sebelumnya hanya menerima bantuan sekarang menjadi Mandiri, adanya keberhasilan Program PKH dalam kontribusi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

Memang graduasi adalah salah satu tolak ukur keberhasilan Program PKH, tetapi pemerintahan janganterlalu memberikan sebuah target yang tinggi kepada pendamping PKH dalam menggraduasi karena ketika Pendamping PKH ketika di berikan tuntutan tinggi untuk graduasi mandiri di takutka, kwalitas dari graduasi mandiri itu sendiri tidak ada. Semisal karena hanya tuntutan pekerjaan tentang graduasi mandiri, maka pendamping memaksa KPM yang belum benar-benar Mandiri untuk mengundurkan diri, dan apabila hal itu terjadi maka dapat di simpulkan akan banyak KPM graduasi Mandiri yang sebenarnya belum mandiri, dan pengentasan kemiskinan / graduasi mandiri yang angkanya tinggi hanya sebatas angka tidak ada kualitas kemandirian yang nyata pada KPM graduasi Mandiri.

IAIN PURWOKERTO

1) Kontribusi PKH Dalam Bidang Kesehatan

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin sehat situasi sosial, semakin dapat mendukung proses dan momentum pembangunan ekonomi, terutama dalam hal peningkatan produktivitas. PKH melaksanakan pendampingan P2K2 dan Verifikasi Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di bidang kesehatan untuk Memastikan KPM PKH Mendapatkan pelayanan publik yang nyaman, misalnya tujuan utama menurunkan angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta menurunkan angka kejadian kurang gizi dan gizi buruk. tingkat dan memperpanjang harapan hidup. KPM PKH pun Di bekali dengan program komplementer salah satunya Kartu Indonesia Sehat agar dapat peningkatan akses fasilitas kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, dan obat-obatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Indikator yang dapat menggambarkan derajat kesehatan suatu daerah adalah banyaknya keluhan kesehatan penduduk. Keluhan kesehatan menunjukkan gejala penyakit atau kondisi fisik yang tidak sehat. Morbiditas (Angka Kesakitan) menunjukkan bahwa gangguan/keluhan kesehatan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari, termasuk pekerjaan, sekolah, perawatan keluarga, atau aktivitas lainnya

IAIN PURWOKERTO

Tabel 4.10 **Tabel Morbiditas Tahun 2019 -2020 Kab Banyumas**

Daerah Tempat	**Keluhan Kesehehatan**		**Agka Kesakitan**	
	2019	2020	2019	2020
Perkotaan	33,94	40,50	17,14	20,98
Pedesaan	43,87	38,42	27,51	23,47
Kota + Desa	38,16	39,64	21,55	22,02

BPS Kabupaten Banyumas 2020

Hasil SUSENAS 2020 menunjukkan angka kesakitan penduduk Banyumas mencapai 22,04 persen, mengalami peningkatan 0,49 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan angka kesakitan terjadi di wilayah perkotaan, adapun di wilayah perdesaan mengalami penurunan angka kesakitan. Angka kesakitan penduduk perkotaan cenderung lebih rendah daripada perdesaan, hal ini kemungkinan akses tehadap fasilitas kesehatan di kota lebih cepat dari pada di desa sehingga angka kesakitannya lebih rendah.[147]

Angka tersebut memang tidak sepenuhnya dampak dari PKH karena banyak faktor seperti program pemerintah Pemda Banyumas yang meningkatkan fasilitas kesehatan minggkatkan pelayanan, distribusi nakes keseluruh ilayah tetapi tidak memungkiri bahwa P2K2 / FDS PKH juga ikut serta dalam meningkatkan kesadaran KPM PKH dalam Bidang Pendidikan Seperti Pada Modul P2K2 tentang Kesehatan. dapat di lihat dari Wawancara dengan beberapa KPM salah satunya Bu Bariyah, awancara tanggal 22 Februari 2021

"orang yang dapat PKH mulai memahami pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti pentingnya cuci tangan pakai sabun, pentingnya buang air besar di WC, dan pemahaman tentang rasa sakit yang dapat mengganggu anak dan bagaimana untuk mencegahnya dan mengatasinya, untuk sekarang

[147] Dokumrn BPS Tingkat Kesejhteraan Kabupaten Banyumas 2020

IAIN PURWOKERTO

juga di ajarkan pakai masker, menjaga jarak fan tifak keluar rumah kalo tidak penting, “[148]

Wawancara dengan Warno Korkab PKH kabupaten Banyumas

“KPM disini mulai memahami konsep gizi seimbang Selain menekankan materi FDS dalam modul KG, juga terjalin kerjasama antara bidan desa dan Pendamping sosial aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepuasan gizi keluarga..”[149]

2) Kontribusi PKH dalam Bidang Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan dan pengetahuannya, serta dapat digambarkan dengan tingkat pendidikan yang telah diselesaikannya. Orang yang telah menyelesaikan pendidikan untuk mencapai jenjang pendidikan yang tinggi dapat memiliki berbagai pengetahuan dan keterampilan/keterampilan yang tinggi. Dengan meningkatnya keterampilan/pengetahuan profesional, akan lebih mudah untuk mendapatkan kesempatan kerja. Indikator tingkat ketuntasan pendidikan juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan rencana wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah. Angka partisipasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pendidikan dari berbagai tingkat pendidikan dan kelompok umur. .Tingkat partisipasi sekolah yang terukur meliputi angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi murni.

IAIN PURWOKERTO

[148] Wawancara KPM PKH Kabupaten Banyumas, Bariyah tanggal 22 Februari 2021 jam 11:00

[149] Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00

Tabel 4.11 **Tabel Angka Pendidikan Tahun 2019 -2020 Kab Banyumas**

Kelompok Umur	2019			2020		
Jenis Kelamin	L	P	L&P	L	P	L&P
7-12	99,67	99,75	99,71	100	99,97	99,99
13-15	100	98,85	99,40	98,16	100	98.95
15-18	57,58	67,58	62,51	60,20	64,64	62,38

BPS Kabupaten Banyumas 2020

Menurut data Susenas 2020, dari tahun 2019 hingga 2020, angka partisipasi sekolah (APS) secara umum mengalami peningkatan. APS pada kelompok usia 7-12 tahun dapat dikatakan memuaskan karena skornya mendekati 100% untuk anak laki-laki dan perempuan. Yang perlu diperhatikan pada kelompok usia 15-18 adalah penurunan APS laki-laki, yang biasanya disebabkan oleh keterbatasan biaya dan tekanan ekonomi yang menyebabkan penduduk laki-laki bekerja lebih awal. Meski penurunannya kecil, namun tetap harus menjadi perhatian pemerintah dan PKH, karena penurunan APS menunjukkan dampak negatif pada sektor pendidikan.

IAIN PURWOKERTO

PKH dapat dikatakan berkontribusi dalam peningkatan dan kesadaran partisipasi anak bersekolah, karena tujuan lain dari pkh salah satunya memberi kesadaran bagi KPM PKH tentang penting nya anak belajar 9 tahun pada setiap P2K2 atau FDS seperti pada Wawancara dengan Warno Korkab PKH kabupaten Banyumas

> "Kegiatan FDS dalam modul pendidikan dan parenting membuat orang tua mengerti bahwa mereka memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku anaknya.Modul PPA FDS juga menekankan kepada KPM bahwa status miskin bukan berarti tidak mampu mengasuh anaknya. dapat mengatasi bagaimana memperbaiki perilaku anaknya.Perilaku yang baik, mengurangi

perilaku buruk anak. Untuk meningkatkan kedua aspek tersebut, KPM juga memahami bagaimana anak kecil belajar bagaimana membuat anak berhasil di sekolah dan pentingnya pendidikan sekolah 9 tahun. Materi modul ini antara lain menjadi orang tua yang lebih baik, memahami perilaku anak, memahami gaya belajar anak dan kurikulum untuk membantu anak sukses di sekolah."[150]

Dan di prkuat dengan Verifikasi Fasilitas Pendidikan untuk memantau anak dari KPM PKH dalam wawancara dengan Raras Maftukhah selaku pendamping PKH Kabupaten Banyumas mengatakan bahwa

"Di PKH sendiri juga ada verifikasi Pendidikan , jadi pendamping PKH setiap bulanya kunjunga kesekolah sekolah yang terdapat anak dari KPM PKH, Bersama pihak sekolah memverifikasi, apakah benar anaknya sekolah di sekolah tersebut, keaktifan juga dan tentang tanggung jab pembayaran sekolah, jadi apabila ada yang tidak sekolah dan anaknya tidak aktif berekolah , bantuan PKH dapat di tangguhkan , aabila sampai 3 bulan tidak ada perubahan , bantuan PKH dapat di cabut karena sudah melanggar komitmen di bidang pendidikan."[151]

3. Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas dan Pandangan Secara Islam Dan Konvensional Tentang Kebijakan PKH

1) Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas

IAIN PURWOKERTO

Pada tahun 2020, Covid-19 menjadi isu yang sangat memprihatinkan masyarakat. Banyak kerugian akibat pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian Indonesia. Setelah mengalami peningkatan kasus yang pesat, pemerintah merumuskan kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan mensosialisasikan PSBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

---

[150] Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Warno tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00

[151] Wawancara Pendamping PKH Kabupaten Banyumas, Raras tanggal 22 Februari 2021 jam 10:00

Akibat PSBB, semua aktivitas normal terpaksa dihentikan, semua aktivitas di sektor industri dan perkantoran terpaksa dihentikan sementara. Selain itu, sektor pendidikan, pelayanan publik, semua tempat ibadah, pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat wisata mengalami hal yang sama.Jarak sosial atau fisik berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Eksternalitas Covid-19 ini mengurangi peluang Masyarakat untuk menghasilkan pendapatan harian, dan PHK besar-besaran mencapai 1.943.916 orang, termasuk 114.340 perusahaan. Jika wabah ini berlangsung lama, jumlah kejadian seperti itu akan meningkat, dan jumlahnya akan terus meningkat. Selain itu, himbauan untuk "tinggal di rumah" kepada masyarakat akan mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat dari kehidupan sehari-hari secara signifikan, kegiatan ekonomi yang sangat terbatas, dan dampak lainnya yang mengikuti.

Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan dalam menanggapi pandemi COVID-19 yang saat ini meluas. Kebijakan yang ada memberikan dampak positif secara langsung, namun secara tidak langsung juga dapat berdampak negatif.Salah satu hal yang dapat kita ketahui saat ini adalah penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dampak pandemi terhadap sektor ekonomi Indonesia antara lain PHK, munculnya PMI Manufacturing Indonesia, penurunan impor, kenaikan harga (inflasi), dan kerugian pariwisata yang menyebabkan penurunan tingkat hunian.

Multiplier effect dari pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 telah mempengaruhi Situasi perekonomian Indonesia secara keseluruhan, termasuk Banyumas. Perekonomian Banyumas Ini adalah pertama kalinya sejak 2010 mengalami kontraksi -1,65%, dan mampu mencapai pertumbuhan lebih dari 5% dalam sepuluh tahun sebelumnya. Berawal dari pembatasan

IAIN PURWOKERTO

kegiatan masyarakat (PKM), bekerja dari rumah (work from home), belajar di rumah (schooling at home), pelarangan mudik dan pembatasan, segala bentuk kebijakan pemerintah dapat menekan penyebaran Covid-19 di hari besar. perayaan tahun 2020. Pembatasan transportasi menekan kinerja semua bidang usaha, terutama Distribusi dan penyimpanan yang mengandalkan mobilitas masyarakat.

Selama periode 2017-2019, jumlah dan persentase penduduk miskin di Banyumas menunjukkan tren penurunan. Namun pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Banyumas mengalami peningkatan.[152] Hal ini mungkin dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak penduduk yang bekerja kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempat mereka bekerja bangkrut, sehingga mereka harus mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup sementara perusahaan selama masa pandemi COVID-19.

Tabel 4.12 **Tabel Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017 -2020 Kab Banyumas**

IAIN PURWOKERTO

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin
2017	283,20	17,05
2018	228,20	13,50
2019	211,65	12,53
2020	225,80	13,26

BPS Kabupaten Banyumas 2020

[152] Dokumrn BPS Tingkat Kesejhteraan Kabupaten Banyumas 2020

Garis kemiskinan digunakan sebagai batas antara masyarakat miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah mereka yang rata-rata pengeluaran bulanannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Banyumas secara bertahap meningkat dari tahun 2017 hingga 2020. Pada tahun 2020, garis kemiskinan pendapatan perkapita perbulan di Banyumas adalah Rp. 366.442 kemudian akan meningkat menjadi Rp 406.250 pada tahun 2020[153].

Tabel 4.13 **Tabel Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2017 - 2020 Kab Banyumas**

Indikator	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	357.748	366.442	385.140	406.250
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,19	2,60	2,52	2,25
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,85	0,70	0,67	0,50

BPS Kabupaten Banyumas 2020

IAIN PURWOKERTO

Kenaikan garis kemiskinan dipengaruhi oleh gaya hidup penduduk yang semakin meningkat dan kenaikan harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Apalagi dengan adanya Salah satu kebijakan yang diambil yaitu dengan memberlakukan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) untuk pekerja dan meliburkan sekolah hingga universitas untuk siswa dan mahasiswa. Ternyata kebijakan tersebut berimbas pada pengeluaran masyarakat terutama soal kebutuhan paket data internet.

[153] Dokumrn BPS Tingkat Kesejhteraan Kabupaten Banyumas 2020

Di sisi lain Pemerintah menggandakan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) selama tiga bulan pada kuartal II tahun ini. Hal ini bertujuan meredam dampak pandemi corona terhadap perekonomian masyarakat. Alokasi untuk bantuan PKH meningkat Rp 8 triliun dari Rp 29,13 triliun menjadi Rp 37,4 triliun Rinciannya, bantuan untuk ibu hamil akan naik dari Rp 3 juta menjadi Rp 3,75 juta per tahun. Lalu, untukm anak usia dini meningkat dari Rp 3 juta menjadi Rp 3,75 juta per tahun. Sedangkan siswa SD, bantuannya naik dari Rp 900 ribu menjadi Rp 1,25 juta per tahun. Bagi siswa SMP naik dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,87 juta per tahun. Lalu, siswa SMA dari Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta. Penerima PKH disabilitas juga melonjak dari dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta. Terakhir, untuk lansia naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun. Tetapi Hal tersebut belum benar benar meredam akibat dari Covid-19, dan baru dapat mengurangi beban pengluaran KPM PKH dan dan memenuhi kebutuhan KPM PKH, Tetapi Masyarakat di luar penerima PKH masih banyak yang harus berjuang sendiri tanpa ada nya bantuan sosial apapun, terutama bagi masyarkat miskin baru yang kemiskinannya terjadi karena Pandemi Covid 19.

IAIN PURWOKERTO

Dalam data Graduasi Mandiri 2020 Kabupaten PKH memang dapat menghasilkan banyak KPM yang keluar karena kesadaran KPM PKH atas peningkatan ekonominya tetapi di sisi ain, amukan Covid 19, menghasilkan orang jatuh miskin lagi d luar KPM PKH. Iini juga menjadi perhatian sangat besar untuk PKH agar tidak mudah menggraduasi KPM PKH ketika memang belum belum siap, karena dapat jatuh miskin lagi ketika lepas dari bantuan PKH. Kabupaten Banyumas juga harus memberikan jarring pengaman sosial kepada seluruh warga masyarakat, karena yang terdampak Covid 19 bukanlah hanya orang miskin, orang yang kelas menengah

pun terdampak dan tergoyangkan ekonominya, Pemkab harus hadir untuk menjaga masyarakat tidak jatuh miskin kembali.

Dalam hal ini Pemerintah sebenarnya dapat menggandeng Lembaga- Lembaga zakat yang ada di Indonesia untuk sama sama mengentaskan kemiskinan, karena kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerinta tapi tanggng jawab kita semua. Pemerintah dan badan amil zakat dapat berkolaborasi memaksimalkan potensi zakat yang belum di maksimalkan.

Selama ini, meskipun Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim memiliki potensi zakat yang besar, namun pentingnya zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan masih dipandang sebelah mata. Indonesia memiliki potensi zakat yang besar. Namun, jumlah pelaksanaan zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat pemerintah dan swasta masih sangat sedikit. Jika realisasi zakat yang dipungut dibandingkan dengan anggaran pengentasan kemiskinan pemerintah, jumlahnya masih kecil, namun proporsinya meningkat dari tahun ke tahun. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hal ini membuktikan bahwa zakat dikelola oleh badan amal profesional yang terpercaya, sehingga dapat mencapai makna mengurangi jumlah keluarga miskin dan mengurangi kesenjangan pendapatan penerima zakat.

IAIN PURWOKERTO

Imam Syafi'i, An-Nasa'i dan lain-lain menyatakan bahwa jika mustahik zakat mampu berdagang, ia harus memperoleh zakat produktif dalam bentuk modal komersial sehingga ia dapat memperoleh keuntungan yang memenuhi kebutuhan dasar. Demikian pula, jika personel yang relevan memiliki keterampilan tertentu, mereka dapat dilengkapi dengan peralatan produksi yang sesuai untuk pekerjaan mereka. Alokasi dana zakat produktif dapat

dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, sesuai dengan bakat, ketrampilan, dan kekuatan fisik si penerima, dana diberikan untuk memulai usaha. Zakat produktif juga dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan tanah pada suatu areal tertentu bagi penerima zakat, dan hasil tanah tersebut menjadi hak pengelola atau penerima. Oleh karena itu, pengembangan zakat produktif adalah untuk mencapai salah satu tujuan zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan cara ini, secara langsung membantu rencana pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.

2) Pandangan Secara Islam Dan Konvensional Tentang Kebijakan PKH

a) Pandangan secara konvensional tentang kebijakan PKH

Definisi Soeharto tentang kesejahteraan sosial adalah: Kesejahteraan sosial juga merupakan proses atau upaya yang direncanakan oleh individu, lembaga sosial, masyarakat, dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemberian pelayanan dan manfaat sosial.[154] Dan PKH dapat disimpulkan bahwa tujuan PKH Menciptakan keadaan sosial yang sejahtera ketika setiap individu mengalami situasi di mana kebutuhannya dipenuhi secara fisik, psikologis dan sosial agar dapat berperan dalam masyarakat sesuai dengan tugas perkembangannya. sesuai dengan definisi tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera dalam hal kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan hubungan sosial dan ekologi..

IAIN PURWOKERTO

[154] Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial)*, Bandung , PT Reflika Aditama 2006 hlm 3

Sedangkan Walter A.Friedlander memahami kesejahteraan sosial yang berarti: Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari lembaga sosial dan institusi sosial, yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mengembangkan hubungan individu, dan untuk menyediakan hubungan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilannya secara maksimal dan meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.[155]

Dalam hal ini PKH Atau PPKH sebagai Program Kementerian Sosial sebagai lembaga yang memberikan pelayanan penunjang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, taraf hidup dan kebutuhan sosial, baik secara individu maupun kelompok, dimana kebutuhan keluarga dan masyarakat dapat terpenuhi.

b) Pandangan Kesejahteraan Sosial Islam Tentang PKH

Dalam Dalam Pandangan Kesejahteraan sosial islam PKH adalah salah satu program tanggung jawab Penerintah kepada rakyatnya agar dapat mendapatkan kehiupan yang layak seperti dan itu sesuai konsep *damān al Ijtimā'ī* yang di kemukakan oleh Menurut Muhammad Syauqi al-fanjari yaitu *damān al Ijtimā'ī* adalah tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya untuk memberikan kepada mereka kehidupan yang baik, sekurangnya tercukupi keperluan asas dalam hidup mereka melalui bantuan dana yang mencukupi.

PKH menjadi bukti bahwa negara hadir dan bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan semua warga negara. Negara berkewajiban untuk menjamin terwujudnya

IAIN PURWOKERTO

[155] Walter. A Friedlander, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, Gema Insani Press, 1961 hlm 3

iklim *ta'abbud* (kemudahan beribadah), kesejahteraan, keamanan dan jaminan kebutuhan dasarnya. Dan jaminan sosial merupakan sistem yang sebenarnya telah tercermin sejak berdirinya negara Islam. Misalnya adanya kebijakan Nabi Muhammad SAW yang memberikan dukungan keuangan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu dari lembaga keuangan publik. Siklus untuk sistem ini adalah pekerja yang mampu secara ekonomi memberikan dukungan material kepada orang sakit, cacat, tidak mampu, lanjut usia dll melalui negara sebagai penghubung.[156]

Hussein Abdul Latif Hamdani meyakini bahwa jaminan sosial adalah undang-undang yang memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat dan menjamin hilangnya pendapatan untuk menjaga kehidupan dasar masyarakat pada standar minimum. Untuk menjaga martabat manusia, pekerjaan yang disebabkan oleh disabilitas, penyakit, kecelakaan , usia tua, persalinan (perempuan) dan kematian, semua orang yang termasuk dalam kelompok yang disebutkan di atas harus menikmati jaminan keamanan sesuai dengan hukum nasional. Mengenai dasar hukum Program Keluarga Harapan (PKH), harap mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 (Permensos 1/2018) dan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, penyaluran bantuan pangan nontunai. Sebagai salah satu aturan dasar, pemerintah memberikan jaminan sosial yang merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan sosial masyarakat .

Tujuan PKH sama seprti arti sebuah Kesejahteraan yaitu, dengan bantuan sosial yang di berikan orang yang tidak mampu menjadi terbebas dari jeratan kemiskinan, dan denga

IAIN PURWOKERTO

[156] Syufa'at, *Fikih Jaminan Sosial Perspektif Ibnu Hazm*, STAIN Press, Purwokerto 2015 hlm

adanya P2K2 di harapkan terbebas dari kebodohan, dan menujun Manusia yang melek akan pengetahuan, sehingga terhindar dari rasa takut sehingga orang-orang dapat memperoleh Kehidupan yang nyaman aman Tentram secara lahir maupun batin.

Seperti halnya dalam Islam Kita diperintahkan untuk menghapus kemiskinan, ketidaktahuan, ketakutan atau kekhawatiran agar aman secara fisik dan mental. Ketika Alquran mengatakan bahwa Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu lebih dari yang lain, itu berarti kebodohan adalah salah satu penyebab turunnya dan terbelakangnya harkat manusia, sebaliknya menjadikan kebodohan sebagai perbuatan yang jahat..

Kegoncangan hati, Kekacauan jiwa, ketidak-tentraman batin, dendam, sentiment dan macam-macam penyakit batin lainnya adalah akibat langsung dari perilaku tidak bermoral (*al-Maksiyah*). Akibat dari perilaku tidak etis (seperti pembunuhan, perjudian, atau perilaku lainnya) adalah seberapa besar kerusakan sosial yang ditimbulkan, dan keluarga, lingkungan, dan martabat individu juga rusak. Untuk menghindari hal tersebut maka disediakan kebutuhan dhruriyah (kebutuhan primer) yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan hidup dan mati seseorang, seperti kebutuhan oksigen, makanan dan minuman. Manusia harus terus bekerja keras untuk menopang kehidupan dengan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam lingkup kebutuhan daripada kebutuhan yang berlebihan, dan PKH telah berperan dalam hal ini.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Program PKH dalam Pengentasan Kemiskinan di Banyumas dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait pokok rumusan masalah dalam Penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1) Implementasi PKH di kabupaten Banyumas dari Pendataan Calon KPM PKH sampai mendapat Bantuan PKH dan perjalanan menjadi KPM dan sampai Graduasi yaitu calon KPM divalidasi kemudian mendapatkan persetujuan untuk burekol atau pembukaan rekening kemudian Dapat bantuan dananya cair setiap bulan p2k2 diverifikasi komitmen datanya di mutahirkan, memberikan edukasi agar KPM itu siap digraduasi kalo sudah mampu lulus menjadi KPM PKH di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pedum PKH tahun 2020 dan Sumber daya Pendamping PKH yang Cakap merupakan sarana untuk mendukung keberhasilan program PKH, dengan kecakapan Pendamping PKH dengan berbagainya dapat terselesaikan dan dapatberjalan maksimal, seperti Pendamping PKH dapat berperan sebagai Fasilitator, Motivator, Eksekutor data, bahkan partner bagi KPM

IAIN PURWOKERTO

2) Program Keluarga Harapan (PKH) juga memberikan dampak positif pada kondisi masyarakat sekarang yaitu mewujudkan kemajuan dalam masyarakat terutama kemajuan kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat, Dampak lain yang ditimbulkan dari program tersebut diantaranya adalah dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Banyumas. Setiap tahun hampir disetiap kecamatan terdapat graduasi mandiri, dari 3 tahun terakir terdapat 3971 KPM yang graduasi mandiri dan graduasi mandiri dapat dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan program KPM, adanya keberhasilan Program PKH dalam kontribusi Pengentasan Kemiskinan

di Kabupaten Banyumas. Dan Tujuan PKH sama seprti arti sebuah Kesejahteraan yaitu, dengan bantuan sosial yang di berikan orang yang tidak mampu menjadi terbebas dari jeratan kemiskinan, dan denga adanya P2K2 di harapkan terbebas dari kebodohan, dan menujun Manusia yang melek akan pengetahuan, sehingga terhindar dari rasa takut sehingga orang-orang dapat memperoleh Kehidupan yang nyaman aman Tentram secara lahir maupun batin sesuai dengan kesejahteraan dalam islam.

3) Selama periode 2017-2019, jumlah dan persentase penduduk miskin di Banyumas menunjukkan tren penurunan. Namun pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Banyumas mengalami peningkatan. Hal ini mungkin dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Garis kemiskinan pendapatan perkapita perbulan di Banyumas adalah Rp. 366.442 kemudian akan meningkat menjadi Rp 406.250 pada tahun 2020 di karenakan gaya hidup baru dan meningkatnya kebutuhan seperti kuota internet karena mengikuti kebijakan Belajar dari Rumah bagi pelajar dan WFH pekerja. Dalam hal ini Pemerintah sebenarnya dapat menggandeng Lembaga- Lembaga zakat yang ada di Indonesia untuk sama sama mengentaskan kemiskinan. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

1) Perlu adanya rencana strategis dalam penangan kemiskinan bukan dalam pandangan normal tetapi penangan kemiskinan dalam kejadian luar biasa seperti Pandemi Virus dan keadaan darurat seperti perang atau konflik untuk lebih mengantisipasi dan mempersiapkan hal yang dapat membuat orang mati karena kemiskinan, orang jatuh miskin karena daruratnya situasi.
2) Dengan dasar Penyelenggaraan otonomi daerah pada Peraturan Bupati Banyumas No 67 Tahun 2018 pemkab Banyumas dapat Membuat

program pengentasan kemiskinan sendiri dengan Potensi wilayah masing masing serta membantu program pemerintah puat dalam penangan kemiskinan.

3) Mengoptimalisasi P2K2 dalam mengembangkan dana bantuan, sehingga Bantuan PKH atau program penanggulangan kemiskinan lainya tidak menjadi candu yang membuat KPM ketergantuan dengan Bantuan Sosial.
4) Memang graduasi adalah salah satu tolak ukur keberhasilan Program PKH, tetapi pemerintahan jangan terlalu memberikan sebuah target yang tinggi kepada pendamping PKH dalam menggraduasi karena ketika Pendamping PKH ketika di berikan tuntutan tinggi untuk graduasi mandiri di takutka, kwalitas dari graduasi mandiri itu sendiri tidak ada membuka jaringan pada pihak pemerintah dan swasta.
5) Kurangnya Dukungan yang ditunjukkan oleh pemkab Banyumas seperti tidak adanya honor daerah atau dengan pengadaan Kendaraan yang dapat digunakan oleh para pendamping PKH untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh dan sulit. Dukungan Tidak cukup dukungan Moril saja tetapi dukungan bagaimana caranya untuk pelaksanaan kebijakan akan lebih mempermudah pelaksanaan Program PKH.
6) Dalam Kemiskinan Pemerintah dapat menggandeng Lembaga- Lembaga zakat yang ada di Indonesia untuk sama sama mengentaskan kemiskinan, karena kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerinta tapi tanggng jawab kita semua. Pemerintah dan badan amil zakat dapat berkolaborasi memaksimalkan potensi zakat yang belum di maksimalkan.

IAIN PURWOKERTO

C. Rekomendasi

Setelah penulis menyusun laporan penelitian tentang Program Keluarga Harapan dalam pengentasan Kemiskinan ini, penulis merekomendasikan kepada para peneliti dan akademisi. Banyak aspek dalam penelitian ini yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan riset lebih jauh. Seperti meneliti evaluasi Kebijakan PKH. Ini akan menarik dengan melihat efektivitas dari Program Keluarga Harapan dalam pengentasan Kemiskinan dan penelitian tersebut akan memungkinkan kita dalam menyusun konsep kemitraan program pesantrenisasi yang lebih generic.

Demikian hasil dari penelitian yang dapat penulis susun. Penulis berharap kritik danmasukan yang konstruktif untuk kesempurnaan karya ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Billahitaufiq wal hidayah

Kawunganten. 12 Juni 2021

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RUJUKAN

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Keempat,* (Jakarta: PT Grafindo Persada)

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Keempat,* Jakarta: PT Grafindo Persada

Ahmad Tanzen, 2011. *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras)

Aidil Alfin. 2011, Konsep Jaminan Sosial Dalam Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Istilah Takāful Al-Ijti Mā'î, Damān Al-Ijti Mā'î Dan Ta'min Al-Ijti Mā'î). Jurnal Stain Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi,

Amri Marzali, 2012 . *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,

Andi Prastowo. 2012. Metode Penelitian Kualittaif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media)

Aprilia Saraswati, 2018. *Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi,

Burhan Bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Cholid Narkubo, 2003. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara)

Chriswardani Suryawati, 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, (JurnaL Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 08/No.03/September/2005)

Cik Hasan Bisri, 2003. *Model Penelitian Fiqih*, Cet 1, Bogor: Kencana,

Conny semiawan, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: gramediA)

Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*

Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2021.Buku Kerja Pendampingan Program Keluarga Harapan ED. Revisi,

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Buku Kerja Pendampingan Program Keluarga Harapan (ED. Revisi, 2012)

Dokumen BPS Kabupaten Banyumas, 2020. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas 2020*. Banyumas

Dokumen *Data Final Closing*, UPPKH Dinas Sosial Kab Banyumas Februari 2021

Dokumen Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 Hlm 14-16

IAIN PURWOKERTO

Dokumen Peraturan Bupati Banyumas No 67 Tahun 2018 *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa* Kabupaten Banyumas

Dokumen Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2018 *Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas* Tahun 2018 Bab II

Dokumen *Rencana Strategis Kementrian Sosial.* 2020-2025 BAB 3

Eky Riswiana, 2020. Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Keluarga Miskin Di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus Di Kecamatan Wonopringgo). Tesis .

Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.185.

Faisal Basri, 2005. .*Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga)

Guru PPKN. 2021. Tujuan Kebijakan Publik. Dalam https://www.google.com/gmp/s/guruppkn.com/tujuan-kebijakan-publik/amp diakses tanggal 17 Februari 2021

https://www.prakerja.go.id/, diakses pada tanggal 12 Februari 2021

Hudiyanto. 2014. *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakrta, Linkar Media

Husen Umar.2005. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syari'ah, Edisi Revisi*, Jakarta: PT Grafindo Persada

Istiana Hermawati, Dkk, 2015. *Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan*, Yogyakarta: B2P3KS Press

Judith Belib, 2006. *Melakukan Proyek Penelitian Secara Mandiri*, Cet. IV (Jakarta: PT Indeks)

K. Denzin dan Yunonns S. Lincoln, 2009. *Handbook of Qualitative Research* (Terj) Darianto, Jakarta: Pustaka Pelajar

Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, (Ed. Revisi, 2013)

Kementrian Sosial RI, *Pedoman Umum PKH* Tahun 2020, (Jakarta)

Kementrian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta),

Kementrian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2020*, (Jakarta)

Kementrian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2020*, (Jakarta)

Kementrian Sosial RI, Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2020, (Jakarta), hlm.4.

IAIN PURWOKERTO

Lexi J. Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya)

Lincolin Arsyad. 2015. *Ekonomi Pembnagunan, Edisi 5,* Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan,Teori, Masalah dan Kebijakan, (Yogyakarta: YKPN, 2002)*

Muhammad Iqbal, 2017. *Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Islam*

Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2009. *Ekonomi Islam,* Jakarta: Rajawali Press,

Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam,* (Jakarta: Rajawali Press, 2009)

Rulan Ahmadi, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya),* Jurnal Administrasi Publik Vol. 10, No.2 (Desember 2012)

Saparinah Faisal, 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar- Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3 Malang

Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (*Bandung, Alfabeta)

Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta,

Suharsimi Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT Rineka Cipta)

Suharto Edi, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial).* Bandung : PT Reflika Aditama.

Sukandarrumidi, 2004. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)

Sutrisno Hadi, 2002. *Metodologi Research, Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Ofset)

Syufa'at . Fikih, 2015. *Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ibn Hazm (994-1064 M).* Jurnal IAIN Purwokerto

TNP2K, 2017. Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, Jakarta: Kementrian Sosial RI,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 *Tentang Penanganan Fakir Miskin* Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

IAIN PURWOKERTO

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Viqra Ramadanti, *Kebijakan Berbasis Bukti (Based Policy Evidence) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Bappeda Kota Makassar)*, (Thesis tidak diterbitkan Universitas Negeri Makassar)
Walter. A Friedlander, 1961.*Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Gema Insani Press.
Wawancara Kepala Bidang Kejahteraan Sosial. Penanganan fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas. Lili Mudjianto. tanggal 22 Februari 2021 jam 09:30
Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas. Warno. tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00.
Wawancara KPM PKH Graduasi Kabupaten Banyumas. Irma tanggal 22 Februari 2021 jam 11:00.
Wawancara KPM PKH Kabupaten Banyumas. Ida tanggal 22 Februari 2021 jam 11:00.
Wawancara KPM PKH Kabupaten Banyumas. sumiyati KPM PKH lainya, wawancara Pada 23 Februari 2021. jam 10:00
Wawancara KPM PKH Kabupaten Banyumas. Waryanti tanggal 22 Februari 2021, jam 09:00.
Wawancara Pendamping PKH Kabupaten Banyumas. Dendi. Pendamping Sosial Kabupaten Banyumas 25 Februari 17 : 23
Wawancara Pendamping PKH Kabupaten Banyumas. Raras. tanggal 22 Februari 2021 jam 10:00.
Wisnu Indrajid V. O. 2014. Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan).* Malang: Intrans Publishing
Yulianto Kadji, *Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya*. Jurnal. Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ung
Zainal Arifin, 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
IAIN PURWOKERTO

Wawancara Dengan Kordinator Kabupaten Pendamping PKH Banyumas

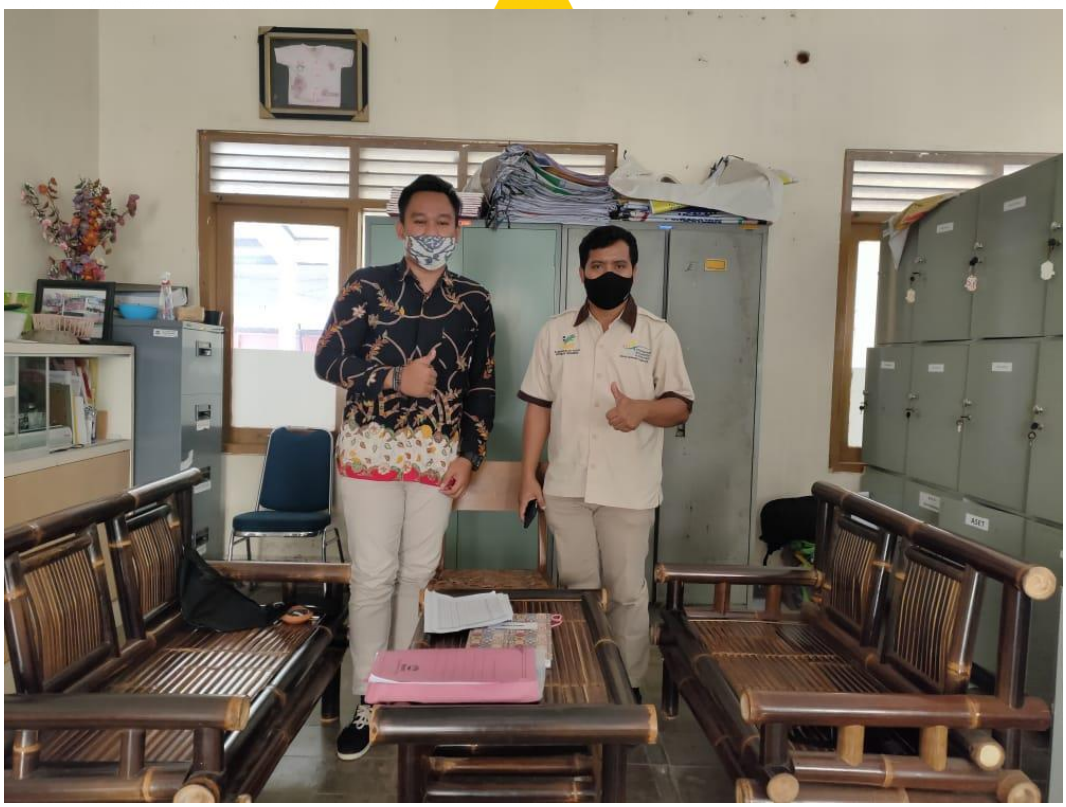

Wawancara Dengan Bapak Warno Selaku Kordinator Kabupaten Pendamping PKH Banyumas

Wawancara Dengan Bapak Lili KepalaBidang Penangan Fakis Miskin dan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Banyumas

Wawancara Dengan Raras Maftukhah Pendamping PKH Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

Wawancara Dengan Pengurus KPM PKH Kabupaten Banyumas

Observasi Pertemuan Kelompok Rutinan KPM PKH di Kabupaten Banyumas